



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**BERBAGI TANAH  
SUATU KAJIAN PRANATA PENGUASAAN TANAH  
PADA KELOMPOK PETANI TAMBAK  
DI KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING  
JAKARTA UTARA**

**SKRIPSI**

**FAHRUDIN  
0706285511**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
DEPOK  
DESEMBER 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**BERBAGI TANAH  
SUATU KAJIAN PRANATA PENGUASAAN TANAH  
PADA KELOMPOK PETANI TANBAK  
DI KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING  
JAKARTA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Sosial**

**FAHRUDIN  
0706285511**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
DEPOK  
DESEMBER 2011**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Bogor, 30 Desember 2011**



**FAHRUDIN**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fahrudin

NPM : 0706285511

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2011

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fahrudin  
NPM : 0706285511  
Program Studi : Antropologi Sosial  
Judul Skripsi : Berbagi Tanah: Suatu Kajian Penguasaan Tanah Pada Kelompok Petani Tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Dr. Semiarto Aji Purwanto

*Jespeprawat*<sup>10</sup>/<sub>7</sub>12  
( )

Penguji : Dr. Prihandoko Sanjatmiko

*Prihandoko*  
( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 30 Desember 2011

**HALAMAN PERNYATAAN  
JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin  
NPM : 0706285511  
Program Studi : S1 Antropologi Sosial  
Departemen : Antropologi Sosial  
Jenis Karya Akhir : Skripsi

Demi keakuratan data informasi akademik Universitas Indonesia, dengan ini saya menyampaikan dan menyatakan judul karya akhir saya dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan *Hard Cover* terakhir yang diserahkan ke Program/Perpustakaan dan sudah selesai dengan data yang dimasukkan dalam SIAK NG sebagai berikut:

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Indonesia:

Berbagi Tanah: Suatu Kajian Penguasaan Tanah Pada Kelompok Petani Tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

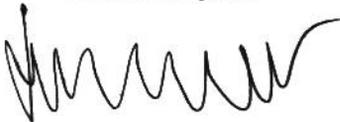
Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Inggris:

Land Share: a Description About Institution of Land Tenure in a Group of Fish Farmer in Marunda, sub-district Cilincing, North Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

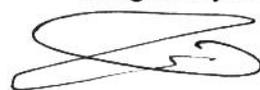
Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 30 Desember 2011  
Mengetahui,

Ketua Program



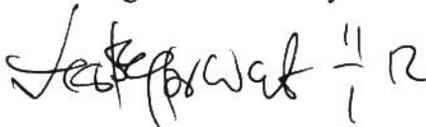
(Dr. Jajang Gunawijaya, MA )

Yang Menyatakan



(Fahrudin)

Pembimbing Penulisan Karya Akhir



(Dr. Semiarto Aji Purwanto)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menjalani masa-masa perkuliahan dengan sebaik-baiknya sampai dengan penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di program studi Antropologi UI. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak menghadapi berbagai hambatan baik dari dalam diri saya maupun dari luar diri saya. Namun atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT semua hambatan tersebut dapat saya lalui, sehingga penulisan skripsi ini selesai. Hal ini tidak terlepas juga berkat motivasi dan doa dari keluarga dan teman-teman. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Semiarto Aji Purwanto karena telah bersedia sebagai dosen pembimbing dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, evaluasi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengetahuan yang luas dan referensi beliau memudahkan saya untuk menyusun ide mengenai petani tambak.
2. Bapak Dr. Prihandoko Sandjarmiko selaku dosen penguji, saya sampaikan terima kasih karena telah memberikan masukan dan komentar sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.
3. Panitia Ujian Akhir yang diketuai oleh Bapak Dr. Jajang Gunawijaya, MA dengan sekretaris sidang Bapak Hilarius Taryanto yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Untuk kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Damanhuri dan Ibu Siti Kulsum yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tulus menyemangati buah hatinya ini untuk menyelesaikan studi dan mewujudkan impiannya. Semoga gelar sarjana untuk kali pertama dalam keluarga besar ini menjadi berkah dan bermanfaat.
5. Seluruh informan saya di Sungai Tiram Kelurahan Marunda (Pak Atilah, Pak Taufik, Pak Antari, Pak Matrozi, Pak Kasman, Bu RT, dan Pak Lurah

Sunarta), Pak Kasmuri selaku Ketua RT 03/04 yang telah bersedia memberikan tempat tinggal selama penelitian, rekan-rekan Biologi UI yang memperkenalkan dunia tambak kepada saya, dan juga Ibu Titi Soedjiati selaku dosen Biologi UI yang memperkenalkan saya kepada petani tambak di Kelurahan Marunda.

6. Pihak yayasan Karya Salemba Empat (KSE) yang telah memberikan dukungan materi maupun non-materi selama saya menjalani masa-masa perkuliahan. Kepada Pak Hengky selaku kakak pembina KSE saya ucapkan terima kasih karena telah membina dan membimbing saya sejak saya diterima sebagai penerima beasiswa KSE. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Helmi, Mas Agus, Mba Maya, dan para staf KSE lainnya yang telah tulus ikhlas membantu kelancaran beasiswa kami.
7. PT. Indofood dalam hal ini Pak Chris dan Pak Sujarwo Ilyas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan karakter dan kepribadian serta jiwa kepemimpinan melalui Beasiswa Indofood Sukses Makmur (BISMA) Batch III di Akmil Magelang tahun 2011.
8. PT. Bank Mandiri saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya di penghujung masa perkuliahan di UI untuk mengikuti pelatihan Mandiri Leadership Camp 2012.
9. Semua teman-teman jurusan Antropologi angkatan 2007, teman “sepermainan” di jurusan Antropologi: Jaman, Bahtiar, dan Yudi yang telah menemani hari-hari saya selama kuliah di UI. Juga kepada Rio dengan pemikirannya yang kritis dan komentar “pedas” membantu saya untuk belajar berfikir kritis.
10. Sahabat-sahabat tim Kuliah Kerja Nyata (K2N) UI 2010 Pulau Befondi-Papua yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan studi. Mereka menempati ruang istimewa di hati saya: Adila (FKM’07), Ardhi (FH’07), Taufika (FISIP’07), Rini (FISIP’07), Dewi (Psikologi’06), Tia (FIB’07), Gina (FIB’07), Fidinila (Psikologi’07), dan Afif (FISIP’06).
11. Rekan-rekan Paguyuban Karya Salemba Empat UI: Panja, Ardhi, Dhika, Rico, Saleh, Rijal, Arif, April, Icu, Ima, Wida, dan rekan-rekan lainnya yang telah menularkan semangatnya untuk membangun dan mewujudkan

impian. *sharing, networking, and developing* semoga tetap melekat dalam diri kita.

12. Teman-teman organisasi kampus: Forum Studi Islam, Al-Hikmah Research Center, Himpunan Mahasiswa Antropologi (HeMan) UI, CSR Paguyuban KSE UI.
13. Rekan-rekan kerja di Surat Kabar Harian Kompas, PPMT UI (Mba UtI, Atul, Mas Andes), dan Career Development Center UI (Sapta, Mas Rahmat, Mas Uci, Mas Amir, Mba Dian, Bu Nur, dan Bu Fika). Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di dunia kerja.
14. Teman-teman di Kontarakan Institute: Wa Eko, Danu, Udin, Afif, dan Bahtiar. Saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman diskusi dan mau berbagi pengetahuan kepada saya yang masih masih minim konsep dan pengetahuan.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bogor, 30 Desember 2011

Fahrudin

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin  
NPM : 0706285511  
Program Studi : S1 Antropologi Sosial  
Departemen : Antropologi Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **BERBAGI TANAH: SUATU KAJIAN PENGUASAAN TANAH PADA KELOMPOK PETANI TAMBAK DI KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2012

Yang menyatakan



(Fahrudin)

## ABSTRAK

Nama : Fahrudin  
Program Studi : Antropologi Sosial  
Judul Skripsi : Berbagi Tanah: Suatu Kajian Pranata Penguasaan Tanah Pada Kelompok Petani Tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.  
Pembimbing : Dr. Semiarto Aji Purwanto  
[Abstrak + xiii + 119 halaman + 9 tabel + 9 gambar + Bibliografi 43 (1979-2010)]

Skripsi ini menguraikan pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Fokus perhatian dalam skripsi ini pada pembentukan dan pemeliharaan pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak. Pranata penguasaan ini mengatur bagaimana suatu tanah dimanfaatkan dan dikuasai oleh petani tambak. Pranata penguasaan ini terwujud dalam suatu mekanisme di antara aktor-aktor yang terlibat dalam penguasaan tanah.

Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa masalah tanah di kota bukan hanya menyangkut hubungan penduduk dengan tanah, melainkan adanya hubungan atau relasi kekuasaan dalam memanfaatkan tanah di kota. Hubungan yang terjalin berlandaskan pada hubungan patron-klien. Hubungan patron-klien ini mampu memperlihatkan corak hubungan vertikal maupun hubungan horisontal. Hubungan vertikal terjadi di antara pemilik tanah, perantara, dan petani tambak. Sementara itu, hubungan horisontal terjadi di antara sesama petani tambak dan warga sekitar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Analisa yang diterapkan dalam skripsi ini adalah lebih berlandaskan pada hasil-hasil kerja lapangan (field work) yang kemudian dapat disebut sebagai analisa terhadap data primer. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu, kajian ini dilengkapi pula dengan analisa terhadap data sekunder

Kata kunci: hubungan patron-klien, pranata, dan penguasaan tanah

## ABSTRACT

Name : Fahrudin  
Study Program : Social Anthropology  
Title : Land Share: a Description about Institution of Land Tenure in a Group of Fish Farmer in Marunda, sub-district Cilincing, North Jakarta.  
Supervisor : Dr. Semiarto Aji Purwanto  
[Abstract + xiii + 119 pages + 9 tabulations + 9 visuals + Bibliography 43 (1979-2010)]

This thesis described about the institution of land tenure in a group of fish farmer in Marunda, sub-district Cilincing, North Jakarta. The main focus of this thesis is the creation process and the value-preserved for land tenure in that group. This institution of land tenure maintained how the land has its value in use and its authority for the fish farmer. This institution is showed in a mechanism which involved many actors / subjects.

The result of my research shows that problems of the land not only invoke the relation between society and land, but also the power relation for land-maintaining in the city. This relation grows based on the relation "patron-client". This kind of relation can really show the variety of vertical and horizontal relationship. Vertical relationship happens between the owner of land, mediator, and the fish famer. Mean while, horizontal relationship is the relation between the fish farmer and society.

Method used in the research is quality method with deeper observation and interview. The analysis applied in this thesis is based on the field works called by primer data analysis. But in certain part, the description also completed by the secondary data analysis.

Key words: patron-client relation, institution and land tenure

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Signifikansi Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1 Mengenai Konsep Kota .....	8
1.5.2 Penguasaan Tanah .....	17
1.5.3 Petani Tambak .....	19
1.5.4 Hubungan Patron-Klien .....	23
1.5.5 Persoalan Akses dalam Penguasaan Tanah .....	24
1.6 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB 2 METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
2.1 Pendekatan Penelitian .....	29
2.2 Proses Pencarian Data .....	30
2.3 Menentukan Informan dan Lokasi Penelitian .....	39
2.4 Tipe Penelitian .....	42
<b>BAB 3 MARUNDA: LINGKUNGAN ALAM, MASYARAKAT, DAN PERKEMBANGANNYA .....</b>	<b>43</b>
3.1 Profil Kelurahan Marunda .....	43
3.2 Topografis Kelurahan Marunda .....	48
3.3 Kondisi Kependudukan di Kelurahan Marunda .....	50
3.4 Sejarah Marunda: Dulu Pernah Menjadi Pelabuhan yang Ramai .....	58
3.5 Jenis Pekerjaan: Antara Mayoritas dan Minoritas Menjadi Petani Tambak di Kelurahan Marunda .....	62
<b>BAB 4 PENGELOLAAN TAMBAK DI MARUNDA .....</b>	<b>65</b>
4.1 Rancang Bangun Tambak Marunda: Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) .....	65
4.2 Praktik Budidaya Tambak di Marunda .....	67

4.3	Pengelolaan Lahan Tambak .....	76
	4.3.1 Tambak yang Dikerjakan Sendiri .....	76
	4.3.2 Tambak dengan Bantuan Buruh Tambak .....	77
	4.3.3 Tambak dengan Sistem Sewa, Kontrak atau Gadai .....	79
<b>BAB 5 PRANATA PENGUASAAN TANAH</b>		
<b>PADA PETANI TAMBAK MARUNDA .....</b>		
5.1	Pemanfaatan Tanah di Marunda .....	82
5.2	Proses Pengajuan Hak Garap Tanah .....	86
5.3	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penguasaan Lahan Tambak ...	89
5.4	Pemeliharaan Akses Penguasaan Lahan Tambak .....	92
	5.4.1 Pemeliharaan Hubungan Antar Aktor .....	93
	5.4.1.1 Pemeliharaan Hubungan Vertikal .....	93
	5.4.1.2 Pemeliharaan Hubungan Horisontal .....	96
	5.4.2 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tambak .....	99
<b>BAB 6 PRANATA PENGUASAAN TANAH DI KOTA:</b>		
<b>BEBERAPA KESIMPULAN .....</b>		
		107
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>		111
<b>LAMPIRAN .....</b>		115

**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL****GAMBAR**

- Gambar 1. Peta DKI Jakarta ~ 44  
Gambar 2. Peta Kelurahan Marunda ~ 45  
Gambar 3. Kegiatan Membangun Tanggul Tambak ~ 73  
Gambar 4. Pintu Masuk Kawasan Lantamal III ~ 84  
Gambar 5. Tambak di Atas Tanah Milik Mabes TNI AL ~ 85  
Gambar 6. Mekanisme Berjenjang dalam Penguasaan Tanah Mabes TNI AL di Marunda ~ 92  
Gambar 7. Bukti Pembayaran Uang Sewa Lahan Tambak ~ 94  
Gambar 8. Sekretariat Kelompok Tambak BMW ~ 102  
Gambar 9. Struktur Organisasi Kelompok Bina Marunda Windu ~ 105

**TABEL**

- Tabel 1. Posisi yang dikaitkan dengan sebundel hak-hak ~ 19  
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Jakarta Utara 2007-2009 ~ 50  
Tabel 3. Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Administrasi Jakarta Utara ~ 51  
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Marunda di Tiap RW ~ 52  
Tabel 5. Jumlah dan Jenis Bangunan Rumah Penduduk Marunda ~ 53  
Tabel 6. Jumlah Penduduk Marunda Berdasarkan Jenis Pekerjaan ~ 55  
Tabel 7. Jumlah Penduduk Marunda Berdasarkan Pendidikan ~ 56  
Tabel 8. Jumlah Gedung Sekolah, Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kelurahan Marunda ~ 57  
Tabel 9. Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah di Marunda ~ 83

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Kajian tentang urbanisasi dan kehidupan kota memang telah banyak dilakukan, misalnya kajian yang telah dilakukan Evers (1995), Gilbert dan Gugler (1996), dan Suparlan (2004). Banyak segi telah dibahas dan kemajuan-kemajuan pesat telah diperoleh dalam memahami proses urbanisasi dan perubahan struktur sosial kota. Namun demikian, masih sedikit dijumpai pembahasan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah di kota. Hal ini lebih mengherankan lagi karena begitu banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemilikan, penguasaan, dan sewa-menyewa tanah di desa terutama dalam usaha menganalisis hubungan antara kepadatan penduduk dan pemanfaatan tanah [lihat misalnya; Hardjono (1990), Rajagukguk (1995), Bachriadi dan Lucas (2001), Wiradi (2008)]. Penelitian mengenai pemanfaatan tanah di wilayah pesisir kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi masih jarang ditemukan. Kajian-kajian yang terkait dengan masalah-masalah mengenai bagaimana tanah kota digunakan, siapa yang mendiaminya, dan bagaimana pranata penguasaan tanah di kota masih jarang ditemui.

Studi ini ingin memberikan gambaran dengan sebaik-baiknya mengenai pranata penguasaan tanah di kota pada komunitas petani tambak. Di Indonesia ada beberapa tempat yang cocok untuk melangsungkan penelitian seperti ini, dan satu di antaranya adalah wilayah pesisir utara Kota Jakarta.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di pulau-pulau Indonesia, seluas 5.000 km dari ujung timur sampai ujung barat dan 1.000 km dari ujung selatan sampai ujung utara, hidup lebih dari 300 suku yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri (Kitagawa, 1996:301). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 orang yang mendiami kepulauan Indonesia, dengan laju pertumbuhan 1,49 persen pertahun

antara tahun 1990 dan 2000. Dari jumlah penduduk keseluruhan, 136.610.590 orang hidup di Pulau Jawa atau mencapai lebih dari 50 persen hidup di Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Jakarta sebanyak 9.607.787 orang<sup>1</sup>. Jumlah penduduk ini kian meningkat setiap tahunnya. Ditambah lagi arus urbanisasi yang semakin meningkat menuju Kota Jakarta.

Banyak kota di tanah air menghadapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, bahkan di luar kapasitas daya dukungnya. Proyeksi pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai 189 juta jiwa. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 185% dari rekaman populasi urban pada tahun 2010 [Bappenas (2005) dalam Soehendera (2010:2)]. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota semakin meningkat.

Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus meningkat seringkali tidak diimbangi dengan lahan penopangnya yang tetap. Ketika terjadi ketidakseimbangan ini muncul berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang seringkali kali ditemui yakni berkurangnya luas tanah untuk dijadikan tempat tinggal atau hunian terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Berdasarkan data BPS tahun 2010 tercatat bahwa Kota Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Jakarta pada tahun 2000 tercatat sebanyak 8.389.443 orang. Dalam kurun waktu 10 tahun meningkat menjadi 9.607.787 orang pada tahun 2010<sup>2</sup>. Bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta tidak hanya mengakibatkan pengangguran yang tinggi karena kurangnya kesempatan kerja yang memadai, tetapi juga memunculkan permasalahan tidak tersedianya fasilitas perumahan yang memadai.

Menurut Soehendera (2010:2), langkanya persediaan rumah erat kaitannya dengan ketersediaan dan keberadaan tanah. Rumah adalah sebuah satuan tata ruang yang paling baku dan selalu ada dalam kehidupan manusia di masyarakat manapun. Keberadaan rumah menjadi penting sebagai tempat untuk kegiatan melangsungkan kehidupan manusia, yang mencakup kegiatan-kegiatan reproduksi, ekonomi, pengasuhan dan pendidikan anak, perawatan terhadap orang tua/jompo, kehidupan sosial, emosi dan lain-lain (Suparlan, 2004:21). Namun

---

<sup>1</sup> "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010". ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

<sup>2</sup> *Ibid.*

demikian permasalahan luas tanah dan pertumbuhan penduduk tidak hanya terkait dengan tempat tinggal, tetapi juga masalah tanah sebagai penopang kebutuhan hidup masyarakat.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (Evers, 2002). Artinya, di atas tanah inilah sebagian besar manusia melakukan berbagai aktivitas hidup sehari-hari. Keberadaan tanah dengan demikian menjadi penting bagi manusia agar tetap bisa melakukan berbagai kegiatan. Akan tetapi, luas tanah mulai tidak sebanding dengan jumlah manusia yang terus-menerus mengalami pertumbuhan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terutama dalam hal penguasaan tanah.

Masalah pertanahan secara prinsipil bukanlah soal hubungan antara “penduduk dengan tanah” atau “penduduk dengan sumber daya”, melainkan merupakan persoalan hubungan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat (*social relations and power relations*) [White (2004) dikutip Soehendera (2010:4)]. Menurut Soehendera (2010), hubungan ini bisa terjalin antara sesama warga, ataupun antara kelompok-kelompok masyarakat, dan terutama antara warga dengan pemerintah. Sejalan dengan Wiradi (2008:347), hubungan penguasaan tanah bukan saja menyangkut hubungan antara manusia dengan tanahnya, yang di negara-negara agraris umumnya dipandang sebagai bersifat “religio-magis”, melainkan juga dan terutama menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan ini juga dapat berupa pembatasan mengenai siapa yang boleh mengakses sumber daya dan siapa yang tidak boleh mengakses sumber daya (Peluso dan Ribot, 2003).

Tekanan atas tanah kota dengan demikian meningkat, tidak hanya oleh bertambahnya penduduk kota, tetapi juga oleh kurangnya alternatif terhadap penanaman modal. Harga tanah bergerak secara spiral, dan kota-kota Dunia Ketiga termasuk Jakarta dilanda gelombang spekulasi tanah, segera setelah terjadi perkembangan ekonomi (Evers, 1995:25). Spekulasi tanah ini menyebabkan tanah menjadi barang langka di kota. Selain itu, spekulasi tanah dan peningkatan jumlah penduduk di kota berakibat terjadinya perluasan daerah liar (yaitu di mana norma kepemilikan tanah tidak ditegakkan).

Fenomena spekulasi tanah tidak hanya melibatkan elit kota pemilik tanah, tetapi juga para petinggi pemerintah dan para perwira militer ternyata terlibat dalam spekulasi tanah di Jakarta dan sekitarnya sejak diberlakukannya Undang-Undang *Landreform* tahun 1960 (Evers, 1995). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hanya anggota-anggota ABRI dan pejabat-pejabat pemerintah yang diperkenankan memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggalnya. Juga di sini pemilikan tanah secara absentee nampak semakin meningkat sebagai akibat perkembangan kota dan bertambahnya kemakmuran relatif golongan tertinggi kota (Evers, 1995:28). Namun sayang, penduduk golongan miskin di perkotaan menjadi semakin terbatas akses terhadap kepemilikan tanah di kota karena golongan ini tidak mampu membeli tanah di kota yang semakin meningkat harganya. Sehingga distribusi tanah di kota terutama di Jakarta menjadi tidak seimbang.

Distribusi tanah yang tidak seimbang di wilayah kota-kota besar, terutama di Jakarta dapat dilihat dengan adanya pemilik tanah yang tanahnya luas dan tersebar di mana-mana, namun yang hanya memiliki tanah dalam luasan yang sangat kecil. Itu pula sebabnya mengapa rumah tangga yang bukan pemilik tanah hanya mungkin mendapatkan akses tanah melalui perjanjian sewa-menyewa (*tenancy arrangement*) [Loffer (1996:30) dikutip Soehendera (2010:83)]. Sebenarnya, hak atas tanah dan legitimasi penguasaannya, setidaknya dari sudut pandang formal merupakan soal yang sangat penting bagi penduduk perkotaan. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di perkotaan dianggap dapat melindungi yang bersangkutan dari aksi penyerobotan ataupun pengusuran (Soehendera, 2010:4).

Permasalahan tanah semakin kompleks ketika terjadi di wilayah perkotaan di mana kepadatan jumlah penduduknya yang terus meningkat dengan berbagai masalah lingkungan hidup kota yang kompleks. Menurut Suparlan (2004:29), kompleksitas kota dalam hal ini Jakarta terwujud karena kota Jakarta merupakan pusat jaringan-jaringan politik, administrasi, ekonomi, dan komunikasi yang diatur dalam suatu sistem yang mencerminkan hubungan-hubungan hierarki kota dan desa-desa yang ada di Indonesia, di mana Jakarta sebagai pusatnya. Kompleksitas ini juga terwujud karena penduduk kota Jakarta tidak hanya

penduduk asli kota Jakarta (Betawi), tetapi juga para pendatang dari berbagai suku bangsa. Kompleksitas kota dapat terlihat juga pada pemilikan dan penguasaan tanah di kota di mana warga yang tidak mempunyai sertifikat tanah atau kepemilikan formal mampu mengakses dan menguasai tanah yang diatur dalam suatu pranata penguasaan tanah.

Kepala BPN [(2004:vii) dikutip Soehendera (2010:84)] menyatakan bahwa pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan terutama Kota Jakarta merupakan persoalan strategis. Disebut strategis, karena bobot politik, sosial dan ekonominya jauh melebihi hal yang sama dalam konteks pedesaan. Seperti yang dikemukakan oleh Wiradi (2008:346) bahwa masalah penguasaan tanah di pedesaan merupakan masalah yang rumit, karena ia menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik, dan sosial. Maka dapat dipastikan masalah penguasaan tanah di perkotaan terutama Kota Jakarta lebih rumit dan kompleks karena menyangkut juga urbanisasi dan perkembangan kota yang cepat.

Sebuah gambaran tentang pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah di kota tampak terlihat dalam kasus petani tambak yang berada di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara. Para petani tambak mampu menguasai dan mengusahakan tanah-tanah kosong di Marunda untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Pengamatan saya pada praktik penguasaan tanah yang dilakukan petani tambak di Kelurahan Marunda memperlihatkan bahwa petani tambak dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengembangkan pranata penguasaan tanah yang diyakini mengatur bagaimana suatu tanah dapat dikuasai dan dimanfaatkan.

## 1.2 Masalah Penelitian

Hal menarik untuk disimak adalah ketergantungan petani tambak terhadap tanah berkaitan dengan penguasaan tanah. Penguasaan tanah ini menentukan eksistensi petani tambak dalam melaksanakan praktik budidaya tambak. Namun, tanah di kota yang saat ini tidak bersifat *open access* dan mulai langka menuntut petani tambak dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengembangkan pranata sosial untuk mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah terutama tanah-tanah kosong yang belum digunakan pemilik tanah. Berdasarkan fakta itu, muncul

pertanyaan: Bagaimana bentuk pranata sosial penguasaan tanah yang berlaku di kalangan petani tambak dalam rangka mendapatkan tanah untuk dijadikan lahan tambak? Bagaimana hubungan yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam praktik penguasaan tanah tersebut?

Berdasarkan permasalahan di atas, saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Apa dan bagaimana pranata penguasaan tanah terbentuk dan terpelihara?
- Praktik-praktik apa saja yang dilakukan oleh petani tambak dalam praktik pemeliharaan penguasaan tanah? Bagaimana mereka melakukannya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran yang sebaik-baiknya mengenai pengalaman para petani tambak dalam memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak yang dipercayai berdasarkan pranata penguasaan tanah yang telah dipraktekkan oleh masyarakat selama ini. Gambaran ini meliputi bagaimana pranata penguasaan tanah terbentuk dan terpelihara. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal yang digambarkan. Pertama, pranata penguasaan tanah yang berlaku di kalangan petani tambak. Kedua, proses terbentuknya pranata penguasaan tanah. Ketiga, praktik pemeliharaan penguasaan tanah yang dilakukan petani tambak.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Skripsi ini akan menunjukkan gambaran pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak sebagai aturan yang berlaku pada kelompok petani tambak dan aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah-tanah kosong di Marunda untuk dijadikan lahan tambak. Pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak menunjukkan bahwa permasalahan tanah tidak hanya menyangkut hubungan antara “penduduk dengan tanah” atau “penduduk dengan sumber daya”, melainkan persoalan hubungan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat (*social relations and power*).

Dengan memberikan perhatian pada pranata penguasaan tanah dalam mengatur bagaimana pemanfaatan tanah di kota, skripsi ini menjadi masukan yang

signifikan dalam kajian antropologi perkotaan, khususnya kajian mengenai permasalahan tanah di kota. Skripsi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh petani tambak memberikan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara petani tambak dan pemilik tanah. Bagi petani tambak, tanah yang mereka garap untuk budidaya tambak mampu memberikan alternatif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, bagi pemilik tanah, pemanfaatan tanah oleh petani tambak mampu menjadi alat kontrol dalam memelihara dan menjaga keberadaan tanah mereka di kota yang dianggap rawan terjadinya sengketa dan konflik tanah. Lebih khusus lagi, skripsi ini mengisi kekosongan pada penelitian tentang permasalahan tanah di perkotaan terutama di DKI Jakarta yang dianggap masih langka. Harapan dari skripsi ini dapat memberikan satu sumbangan yang bermanfaat, baik untuk kepentingan ilmu antropologi maupun untuk kepentingan kebijakan yang terkait dengan permasalahan tanah di DKI Jakarta.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pada bagian ini saya akan meninjau berbagai teori mengenai penguasaan tanah. Tinjauan ini menjadi penting untuk dilakukan secara kritis untuk memberikan gambaran sebaik-baiknya mengenai penguasaan tanah pada kelompok petani tambak. Tinjauan ini bukan sebagai hipotesis untuk diuji kebenarannya di lapangan, melainkan sebagai jawaban sementara dan panduan dalam penelitian etnografi. Etnografi, ditinjau secara harfiah, berarti tulisan atau laporan tentang suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan (*field work*) selama sekian bulan atau sekian tahun (Marzali, 2006:vii). Etnografi juga dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara (Creswell, 2009:20). Etnografi sendiri bukanlah penelitian untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori tertentu mengenai sebuah fenomena dalam masyarakat untuk mendapatkan kebenaran (Agar, 1980), melainkan penelitian dengan memasuki kehidupan subjek yang dikaji untuk memperoleh penjelasan mengenai fenomena

dalam masyarakat tersebut (Have, 2004). Dengan menguraikan pranata penguasaan tanah dalam konteks kota, saya meninjau terlebih dahulu kajian-kajian mengenai kota pada konteks kota di negara-negara berkembang.

### **1.5.1 Mengenai konsep kota**

Menurut Suparlan (2004:50) dalam mengkaji mengenai kota setidaknya mencakup pertanyaan apakah kota itu? Apa makna kota bagi kehidupan manusia? Bagaimana mereka itu hidup di kota? Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk memahami hakekat kota dan fungsinya bagi kehidupan manusia di mana teori-teorinya tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai permasalahan kota yang dihadapi masa kini. Suparlan (2004:3) mengatakan masalah-masalah perkotaan adalah masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam kehidupan kota dan menjadi ciri-ciri dari hakekat kota itu sendiri yang berbeda dari ciri-ciri kehidupan desa. Kota dengan demikian diperlakukan sebagai konteks atau variabel yang menjelaskan keberadaan permasalahan yang ada di dalam kehidupan perkotaan, dan kota adalah juga sebagai permasalahan perkotaan itu sendiri. Untuk mengawali pembahasan mengenai permasalahan kota, perlu kiranya meninjau terlebih dahulu definisi mengenai kota.

Definisi kota yang digunakan oleh BPS yakni setiap unit administratif desa/kelurahan digolongkan sebagai desa atau kota, tergantung pada tiga kriteria: kepadatan populasi, persentase keluarga yang terlibat dalam kegiatan bukan pertanian, dan kehadiran fasilitas serta jasa "kota" (Dorleans, 2007:268-9). Dengan definisi kota berdasarkan jumlah penduduk, maka kategorisasi atas suatu wilayah menjadi perkotaan atau pedesaan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara statistik oleh pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Inoguchi (2003:1) mendefinisikan kota sebagai pusat kreativitas, budaya, dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang manusia, juga melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, jutaan orang, bahkan milyaran orang menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi serta

menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan Suparlan, Suparlan (2004:72) mendefinisikan kota sebagai sebuah tempat tinggal manusia yang dihuni secara permanen, di mana warga atau penduduknya membentuk sebuah kesatuan kehidupan yang lebih besar pengelompokannya daripada kelompok klen atau keluarga. Kota juga merupakan sebuah tempat di mana terdapat adanya kesempatan-kesempatan dan permintaan-permintaan yang mewujudkan terciptanya sistem pembagian kerja, kelas-kelas atau lapisan sosial yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hal fungsi, hak, keistimewaan-keistimewaan, dan tanggung jawab di antara golongan-golongan sosial yang ada; dan adanya berbagai bentuk serta corak spesialisasi pembagian kerja sesuai dengan tingkat perkembangan dan macamnya kota yang sesuai dengan peranan khusus dari kota dalam kedudukan fungsionalnya dengan daerah-daerah pedesaan atau pedalaman yang terletak di sekelilingnya dan berada dalam kekuasaannya.

Kota tidak hanya dapat diwujudkan dari kepadatan penduduk saja, tetapi juga perlu dilihat syarat-syarat terwujudnya kota. Suparlan (2004:53) mengatakan bahwa untuk mewujudkan kota diperlukan syarat-syarat. *Pertama*, harus terletak di persimpangan jalur lalu lintas darat dan air. *Kedua*, para warganya mempunyai kelebihan teknologi dan kekuatan militer sehingga mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah pertanian dan pedalaman yang ada di sekitarnya dan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dari warga wilayah di sekeliling kota tersebut, dan menjaga keamanannya. Dari uraian tersebut nampak bahwa faktor lingkungan amat penting dalam menentukan tempat atau lokasi bagi munculnya dan berkembangnya sebuah kota.

Pendapat lainnya, Daljoeni, mendefinisikan kota yang biasa disebut sebagai *urban* dan desa dengan *rural*, meskipun merupakan konsep yang bermanfaat, tetapi sebenarnya di antara kedua pengertian itu tidak terdapat batas-batas yang tegas, nyatanya, perkembangan kota sendiri mendorong sub-urbanisasi, yakni lahirnya daerah pinggiran kota, begitu juga kemajuan pedesaan menjadikannya mengalami urbanisasi pula (Daldjoeni, 1979:128). Walaupun tidak terdapat batas-batas yang tegas, desa dan kota menjalin hubungan sebagai satu struktur hubungan yang fungsional guna memenuhi kebutuhan masing-masing

sesuai dengan kedudukannya dalam struktur tersebut. Corak hubungan tersebut adalah hubungan saling ketergantungan antara yang mendominasi dan yang didominasi (Suparlan, 2004:73). Corak hubungan ini memperlihatkan bahwa desa dan kota memiliki corak kehidupan yang berbeda.

Suparlan (2004:73-4) memaparkan perbedaan corak kehidupan desa dan kota. Secara garis besar, yang membedakan kota dengan desa adalah: *Pertama*, kepadatan penduduk di kota lebih tinggi di daripada di desa. *Kedua*, masyarakat dan kebudayaan di kota lebih kompleks dan heterogen dibandingkan di desa. *Ketiga*, kota adalah pusat kegiatan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik, pertahanan dan keamanan, sedangkan desa adalah yang dilayani atau diatur untuk menjamin berlangsungnya pelayanan mereka akan bahan mentah dan tenaga kasar manusia. *Keempat*, kota mempunyai kedudukan sebagai pusat pendorongan atas wilayah pedesaan atau pedalaman di sekelilingnya, sesuai dengan kedudukan kota yang bersangkutan dalam sistem administrasi negara.

Suparlan (2004:74) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan pusat perhatian mengenai struktur perkotaan, tingkat kompleksitas di perkotaan adalah sebenarnya yang menjadi landasan bagi corak struktur perkotaan yang membedakan dari struktur pedesaan. Lebih khusus lagi, kompleksitas dari struktur perkotaan tersebut dilandasi kehidupan kompleksitas dalam struktur kehidupan ekonomi dan dalam struktur sosial perkotaan. Suparlan menambahkan bahwa kompleksitas kehidupan di perkotaan juga terlihat dari struktur ekonomi kota.

Faktor lain yang turut memainkan peranan dalam hal keberadaan dan pertumbuhan suatu kota adalah faktor-faktor sosial. Suparlan (2004:53) mengatakan bahwa faktor-faktor ini terutama terwujud dalam bentuk urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, baik untuk menetap di kota maupun untuk tinggal sementara, karena ingin menaikkan status sosial melalui pekerjaan dengan pendapatan ekonomi yang lebih baik dari pada yang diperoleh desa.

Di kotalah, menurut Suparlan (2004:72) terdapat adanya kesempatan-kesempatan dan permintaan-permintaan yang mewujudkan terciptanya sistem pembagian kerja, kelas-kelas atau lapisan-lapisan sosial yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hal fungsi, hak, keistimewaan-keistimewaan, dan

tanggung jawab di antara golongan-golongan sosial yang ada; dan adanya berbagai bentuk serta corak spesialisasi pembagian kerja sesuai dengan tingkat perkembangan dan macamnya kota yang sesuai dengan peranan khusus dari kota dalam kedudukan fungsionalnya dengan daerah-daerah pedesaan atau pedalaman yang terletak di sekelilingnya dan berada dalam kekuasaannya.

Definisi kota yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa kota tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja seperti kepadatan penduduk, tetapi juga dapat dilihat dari aspek sosial dan budaya. Terlepas dari definisi mengenai kota, di kota terdapat berbagai macam permasalahan yang cukup beragam. Berbagai permasalahan urbanisasi, urbanisme, kepadatan jumlah penduduk kota yang terus berkembang, kekumuhan dan berbagai masalah lingkungan hidup kota [lihat Suparlan (2004:4)] termasuk aspek pertanahannya. Untuk memberikan wawasan dan penuntun bagi saya ketika mengupas persoalan utama yakni persoalan tanah yang hendak diangkat dalam skripsi ini, saya rasa perlu memaparkan beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli perkotaan maupun ahli ilmu sosial lain yang mengupas masalah perkotaan, terutama masalah tanah.

Tinjauan teoritik yang pertama dipaparkan di sini adalah dari Lewis (1993) mengenai *Kebudayaan Kemiskinan*. Konsep *Kebudayaan Kemiskinan* pertama kali digunakan ketika Lewis (1993) menulis tentang kehidupan sehari-hari lima keluarga Meksiko, empat di antaranya adalah keluarga dengan penghasilan rendah. Tujuan kajiannya tersebut adalah menguraikan kebudayaan kemiskinan di Meksiko. Fokus kajiannya adalah keluarga, bukan masyarakat atau individu. Dalam tulisannya tersebut Lewis menelusuri dampak peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang sangat pesat terhadap kondisi perkampungan kumuh di kota-kota besar yang semakin buruk dan sesak.

Menurut Lewis (1993:5), kebudayaan kemiskinan berkembang pada masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi-kondisi seperti berikut: (1)sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan. (2)tetap tingginya pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil. (3)rendahnya upah buruh. (4)tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah. (5)sistem keluarga bilateral lebih menonjol

daripada sistem unilateral. (6)kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Kebudayaan kemiskinan dapat dipelajari dari berbagai segi: hubungan antara sub-kebudayaan dan masyarakat luas, hakikat mengenai masyarakat di wilayah *slum*<sup>3</sup>, hakikat kebudayaan keluarga, dan sikap-sikap, nilai-nilai, serta struktur watak dari individu. Ciri-ciri kebudayaan kemiskinan seperti yang dikatakan oleh Lewis (1993:7-10):

1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Ini merupakan masalah yang rumit dan merupakan akibat dari berbagai faktor termasuk langkanya sumber daya - sumber daya ekonomi, segregasi dan diskriminasi, ketakutan, kecurigaan atau apati, serta berkembangnya pemecahan-pemecahan masalah secara setempat.
2. Adanya rumah-rumah bobrok, penuh sesak, bergerombolan dan yang terpenting ialah rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas.
3. Masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, hidup bersama atau kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan antara ibu dan anak-anaknya, kecenderungan ke arah keluarga matrilineal dengan akibat semakin banyaknya hubungan sanak keluarga ibu.
4. Kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan, dan rendah diri.

Menurut Lewis (1993:5-6), kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas,

---

<sup>3</sup> *Slum* didefinisikan sebagai pemukiman kumuh. Menurut Suparlan (2004:54), pemukiman kumuh adalah suatu pemukiman yang kondisi fisik hunian dan tata ruangnya mengungkapkan kondisi kurang mampu atau miskin dari para penghuninya. Penataan ruang hunian dan pemukiman yang semrawut yang disebabkan oleh penggunaan ruang yang tinggi tingkat kepadatan volume maupun frekuensinya, dan serba kotor atau tidak terawat dengan baik.

sangat individualistis, dan berciri kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, Liebow (1993) memperlihatkan bagaimana frustrasi-frustrasi yang dimiliki oleh orang-orang miskin yang ditelitinya merupakan landasan bagi adanya perasaan-perasaan yang mendalam bahwa mereka akan selalu gagal dalam setiap usaha kerja mereka. Hal ini dinyatakan Liebow ketika menggambarkan objek penelitiannya.

Ia melamar pekerjaan itu dalam keadaan lunglai, capai karena semuanya sama saja, sadar akan ketidakmampuannya sendiri, cemas akan tanggung jawabnya, jangan-jangan nanti diuji lagi dan kembali tidak memenuhi syarat (Liebow, 1993:129).

Sadar akan ketidakmampuan mereka, mereka bukan hanya tidak mau mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi yang merupakan ujian bagi kemampuan-kemampuan mereka, melainkan mereka bahkan menghindari pekerjaan semacam itu, dan tetap berkisar secara berkelompok pada pekerjaan dan rutin yang tidak membawa tantangan dan dengan demikian tidak mengancam terhadap citra diri mereka sendiri yang memang sudah mengecil itu (Liebow, 1993:129:30).

Liebow (1993) memperlihatkan akan adanya pengaruh nilai-nilai yang dominan yang ada dalam masyarakat yang lebih luas di mana orang miskin itu hidup. Nilai-nilai yang dominan tersebut (yang dimiliki oleh golongan kelas menengah) terinternalisasi dalam nilai-nilai yang dimiliki oleh orang miskin, tetapi karena ketidaksanggupan ekonomi serta hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, maka kelakuan mereka jauh sekali berbeda dari yang dimiliki oleh golongan kelas menengah.

Menurut Liebow (1993:127), kemungkinan seseorang untuk bekerja secara teratur hanya ada kalau ia bersedia bekerja dengan imbalan upah yang kurang dibandingkan dengan yang dibutuhkannya untuk bisa tetap hidup, dan kadang-kadang kesempatan itu pun tidak merata. Semakin tinggi tingkatan upahnya, semakin sulit pula memperoleh pekerjaan tersebut, dan keselamatan kerjanya pun kurang.

Tinjauan berikutnya yakni mengenai peningkatan kebutuhan tanah di kota. Adalah Evers (1995) yang menguraikan dan menganalisis peningkatan kebutuhan tanah di perkotaan, terutama karena bertambahnya penduduk yang disebabkan oleh gejala urbanisasi. Menurut Evers (1995), pasti terdapat banyak masalah-masalah politik atau sosial yang berkaitan dengan pemilikan tanah di kota. Keresahan kota sering didasarkan atas sengketa antara pemilik dan penyewa tanah; perencanaan kota sering terhambat oleh para pemilik tanah yang kuasa; banyak korupsi besar-besaran terjadi dalam hubungan dengan masalah tanah kota dan perencanaan kota (Janssen dan Ratz, 1973 dalam Evers, 1995:22); meningkatnya spekulasi tanah, dan sebagai akibatnya, timbullah perbincangan yang semakin sering tentang perlunya nasionalisasi tanah kota (Evers, 1995:22-3).

Menurut Evers (1995:23), perluasan kota berbarengan dengan pengkaplingan dan pembagian pemilikan tanah. Proses pengkaplingan di wilayah perkotaan menghasilkan suatu pemusatan dari penempatan atas tanah di pinggiran kota, sedangkan di pusat kota mengalami tingginya harga sewa-menyewa. Ketika kota meluas ke arah pinggiran, pertama kali terjadi pembagian tanah-tanah yang luas. Namun kemudian terjadi periode singkat pengumpulan kembali, ketika para pembangun kota memborong tanah untuk perumahan [Wolf (1967) dalam Evers (1995:23-4)]. Perluasan kota tidak hanya mengambil bentuk perluasan fisik dan perubahan pemilikan tanah saja, tetapi juga menyebarnya konsep-konsep hukum yang berasal dari pusat kota dan secara historis berkaitan dengan urbanisasi dan kapitalisme

Tekanan atas tanah kota dengan demikian meningkat, tidak hanya oleh bertambahnya penduduk kota, tetapi juga oleh kurangnya alternatif terhadap penanaman modal. Harga tanah bergerak secara spiral, dan kota-kota Dunia Ketiga dilanda gelombang spekulasi tanah, segera setelah terjadi perkembangan ekonomi (Evers, 1995:25). Spekulasi tanah ini menyebabkan tanah menjadi barang langka di kota. Selain itu, spekulasi tanah dan peningkatan tanah berakibat terjadinya perluasan daerah liar (yaitu di mana norma kepemilikan tanah tidak ditegakkan) (Evers, 1995:26).

Menurut Evers (1995:28), pembangunan yang terjadi di pusat-pusat kota negara-negara Dunia Ketiga menjurus pada meningkatnya spekulasi tanah,

pengayaan elite kota pemilik tanah, peningkatan pemilikan tanah secara absentee di daerah pedesaan sekitar kota. Sekaligus dengan timbul ketergantungan sosial dan ekonomi yang semakin besar dari daerah-daerah pedesaan kepada kota. Perluasan kota dengan demikian menjangkau lebih luas daripada timbulnya daerah-daerah pinggiran kota, di mana pembagian dan pembangunan kota mungkin berlangsung.

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Gilbert dan Gugler (1996) yang mengkaji persoalan merebaknya kontradiksi ekonomi politik evolusi pertumbuhan perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga. Munculnya kontradiksi tersebut karena pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar negara Dunia Ketiga yang terjadi dengan kecepatan yang tinggi. Kota semakin berkembang, dan tanah-tanah kosong menjadi langka, lagi-lagi keluarga miskin ditekan dalam pembelian tanah. Berdasarkan standar pasar, ketersediaan tanah ditentukan oleh harga pasar. Sayangnya, standar harga tanah di kota-kota Dunia Ketiga itu melambung (Gilbert dan Gugler, 1996:122). Evers [(1995) dikutip oleh Gilebert dan Gugler (1996:122)] mencatat bahwa kota-kota di Asia penduduknya terus meningkat dan proses lainnya telah mengintensifikan tekanannya pada tanah perkotaan yang mengarah pada gelombang spekulasi harga tanah yang berlipat ganda.

Tinjauan berikutnya mengenai kota dan lingkungan. Menurut Inoguchi (2003), kota dan lingkungan menjadi penting untuk dikaji dalam rangka mencari solusi atas permasalahan lingkungan perkotaan seperti sampah, limbah beracun, dan polusi udara serta air merupakan masalah yang menjadi perhatian utama semua pihak yang terlibat di dalam pemerintahan perkotaan. Ada beberapa masalah yang dikemukakan oleh mereka, berkenaan dengan pembangunan perkotaan, yakni kegagalan pasar yang memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk ikut campur, kemudian kegagalan pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan perkotaan. Kesemuanya itu menyebabkan mereka mengusulkan adanya reformasi pemerintahan (Inoguchi, 2003:xxiv-xxv).

Inoguchi (2003) fokus terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan kota. Pembangunan kota dianggap sebagai penyebab munculnya permasalahan lingkungan alam dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sementara itu, penduduk perkotaan memberikan tuntutan besar atas persediaan air bersih, sistem

pembuangan kotoran, pengaturan sampah, perumahan, dan transportasi yang aman dan pantas (Inoguchi 2003:2). Solusi yang mereka tawarkan terkait permasalahan lingkungan perkotaan adalah kemitraan masyarakat yang berwawasan ekologi yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh perkotaan, khususnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok warga kota, kepentingan komersial dan industrial, tokoh-tokoh internasional, dan kalangan akademisi serta ilmiah (Inoguchi, 2003:8). Tujuan dari masyarakat berwawasan ekologi berkelanjutan yakni menyampaikan masalah-masalah yang secara nyata ada dan cenderung memburuk, dan menjadikan kota sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk bekerja, hidup, dan membesarkan anak-anak tanpa merusak kemampuan generasi masa depan untuk berbuat hal yang sama (Inoguchi, 2003:4).

Tulisan lainnya yakni Dorleans (2007) menunjukkan adanya penurunan jumlah populasi di DKI di bawah 50 persen dari total wilayah. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan populasi di wilayah BOTABEK yang berbatasan langsung dengan Jakarta meningkat dengan cepat - dari 4 persen menjadi 9 persen. Menurut Dorleans (2007:265-8), penurunan jumlah populasi ini bisa terjadi dalam waktu sedemikian singkat. *Pertama*, ada perubahan dalam penggunaan tanah, terutama di bagian pusat kota, dari pemukiman menjadi bukan pemukiman. *Kedua*, ada kecenderungan nyata dalam hal penyebaran pemukiman di dalam wilayah metropolitan, yang dipacu sebagian besar oleh sektor perumahan formal dan perubahan dalam infrastruktur transportasi, yang memungkinkan peningkatan pemisahan ruang tempat tinggal dan kerja, dan jarak pulang pergi kerja yang lebih panjang.

Menurut Dorleans (2007:277), kecenderungan demografis spasial di Jakarta terkini dan dalam skala lebih kecil di kota besar lain di Indonesia adalah perubahan dalam penggunaan tanah, terutama di pusat kota, dari penggunaan untuk pemukiman ke bukan pemukiman; penyebaran pemukiman di dalam daerah metropolitan didorong oleh sektor perumahan formal dan perubahan dalam infrastruktur transportasi yang berakibat pada makin meningkatnya pemisahan spasial antara pemukiman dan tempat kerja; pertumbuhan cepat di daerah pinggiran yang disertai oleh perpindahan menjauh dari pusat, dan perubahan dari

kehidupan pertanian desa ke pekerjaan kota. Kecenderungan-kecenderungan ini diikuti oleh proses perubahan dalam fungsi kota, yang makin menekankan kehebatan kota Jakarta, alias supremasi Jakarta dari kota-kota lain di Indonesia.

Tinjauan berikutnya yakni dari tulisan Soehendera (2010) yang menguraikan bagaimana pembangunan hukum yang bertujuan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara melakukan formalisasi hukum, khususnya sertifikasi kepemilikan tanah melalui pelaksanaan proyek Ajudikasi tanah. Menurut Soehendera (2010:86), kesempatan golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tertutup. Rumah adalah kebutuhan utama sehingga pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah dan pembelian secara "di bawah tangan" untuk didirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai pemukiman liar.

Masalah pertanahan secara prinsipil bukanlah soal hubungan antara "penduduk dengan tanah" atau "penduduk dengan sumber daya", melainkan merupakan perosalan hubungan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat (*social relations and power*) [White (2004) dalam Soehendera (2010:4)]. Hubungan demikian bisa terjalin antara sesama warga, ataupun antar kelompok-kelompok masyarakat, dan terutama warga dengan pemerintah. Hubungan-hubungan demikian dapat pula terwujud dalam bentuk pranata dalam hal ini terkait dengan pranata penguasaan tanah. Menurut Bank Dunia [(2003) dikutip Soehendera (2010:86)], tata guna lahan di perkotaan terutama di Jakarta, pada umumnya ditentukan oleh kompetisi, ketersediaan lahan, pola kepemilikan, kebijakan publik, dan peraturan lingkungan.

### **1.5.2 Penguasaan Tanah**

Dalam literatur Bahasa Inggris sering dijumpai istilah *land tenure* dan *land tenancy*. Kedua istilah ini sebenarnya merupakan dua sejoli, namun pengertiannya atau bidang yang diartikan oleh masing-masing istilah tersebut dalam penggunaannya, agak berbeda (Wiradi, 2008:351). Kedua istilah ini sebenarnya memiliki kesamaan, namun pengertiannya atau bidang yang diartikan oleh masing-masing istilah tersebut dalam penggunaannya agak berbeda. Kata *land*

memang sudah jelas yaitu tanah. Sedangkan kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa latin *tenere* yang mencakup arti memelihara, memegang, memiliki (Wiradi, 2008:351). Karena itu *land tenure* mempunyai arti hak atas tanah atau penguasaan tanah. Wiradi (Wiradi, 2008:351) menjelaskan bahwa istilah *land tenure* biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas hukum dari penguasaan tanah seperti hal milik, *pacht*, gadai, bagi hasil, sewa-menyewa, dan juga kedudukan buruh tani. Uraian itu menunjuk kepada pendekatan yuridis. Artinya penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapannya itu dapat berlangsung.

Pada objek hak yang sama, misalnya tanah, seringkali terdapat berbagai hak yang melekat. Hak-hak ini dapat saja dimiliki oleh tidak pada satu orang atau kelompok yang sama. Schlager dan Ostrom (1992) menyebutnya dengan istilah "*bundle of rights*" (sebundel hak-hak). Dalam tulisannya, Schlager dan Ostrom (1992:250) mengatakan bahwa hak-hak ini dapat diuraikan menjadi:

- a. Hak atas akses dan hak atas pemanfaatan. Hak atas akses (*rights of access*): "*The right to enter a de-fined physical property*". Hak atas akses ini merupakan hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu; hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*): "*The right to obtain the "products" of a resource (e.g., catch fish, appropriate water, etc.*" adalah hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanen sesuatu hasil alam seperti untuk memancing ikan, memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya;
- b. Hak pengelolaan (*rights of management*): "*The right to regulate in-ternal use patterns and transform the resource by making improve-ments*". Hak ini merupakan hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi;
- c. Hak pembatasan (*rights of exclusion*): "*The right to determine who will have an access right, and how that right may be trans-ferred*". Adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain); dan

- d. Hak pelepasan (*rights of alienation*): “*The right to sell or lease either or both of the above collective-choice rights*”. Adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

Tabel 1. Posisi yang dikaitkan dengan sebundel hak-hak (*bundles of rights*)

	Pemilik ( <i>owner</i> )	Kepunyaan ( <i>proprietor</i> )	Pemakai/penyewa ( <i>claimant</i> )	Pemanfaat yang diizinkan ( <i>authorized</i> )
Hak atas akses dan pemanfaatan	√	√	√	√
Hak pengelolaan	√	√	√	
Hak Pembatasan	√	√		
Hak Pelepasan	√			

Sumber: Schlager dan Ostrom (1992:252)

Tabel yang dibuat oleh Schlager dan Ostrom menunjukkan bahwa hanya pada *owner* atau “pemilik” terdapat semua hak dari “*bundle of rights*” (sebundel hak-hak) ini melekat padanya. Pada *proprietor* atau “kepunyaan” terdapat tiga hak yang melekat padanya. Hak ini meliputi hak atas akses dan pemanfaatan, pengelolaan, dan pembatasan. Pada “Pemakai/Penyewa” atau *claimant* hanya ada dua hak yang melekat padanya yaitu hak atas akses-pemanfaatan dan pengelolaan. Sedangkan pada pemanfaat yang diizinkan atau *authorized* hanya ada hak atas akses dan pemanfaatan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam.

### 1.5.3 Petani Tambak

Dalam skripsi ini frasa petani tambak digunakan untuk menyebut orang-orang yang memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Frasa ini memiliki dua konsep yakni petani dan tambak. Istilah petani dapat dilihat dari beberapa pendekatan, di antaranya Scott (1989:62) yang melihat petani dari segi moral yang hidup dalam pola subsisten dan enggan berisiko. Scott (1989) menambahkan bahwa keputusan-keputusan ekonomis petani, seperti prinsip

mendahulukan selamat (*safety first*) merupakan indikator bahwa orientasi subsistensi sangat mendasari pola hidup petani. Sementara itu, Redfield (1985:88) menggambarkan petani sebagai suatu “kehidupan yang baik” dari nilai-nilai petani yang berlaku. Redfield (1985:90) mengutip pendapat George Stuart yang mengatakan bahwa salah satu hubungan petani adalah sikap intim dan hormat terhadap tanah yang menganggap pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersial sebagai pekerjaan yang tidak terlalu baik. Ia menyebutnya sebagai “rasa samar-samar tentang sesuatu yang pantas dihormati di dalam tanah dan kegiatan pertanian”.

Sayogyo (1993:viii) mengutip pendapat Shanin yang mengatakan bahwa ciri-ciri masyarakat petani (*peasant*) sebagai berikut. *Pertama*, satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda. *Kedua*, petani hidup dari usahatani dengan mengolah tanah (lahan). *Ketiga*, pola kehidupan petani berciri tradisional dan khas. *Keempat*, petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat; mereka adalah “orang kecil” terhadap masyarakat di atas desa.

Sementara itu, istilah tambak diartikan sebagai lahan basah buatan berbentuk kolam berisi air payau atau air laut di daerah pesisir yang digunakan untuk membudidayakan hewan-hewan air payau (terutama ikan dan udang) (Wibowo, *et al.*, 1996 dalam Puspita, 2005:62). Istilah “tambak” berasal dari bahasa Jawa “nambak”, yang artinya membendung air dengan pematang sehingga berkumpul pada suatu tempat. Istilah tambak ini digunakan untuk menyatakan suatu empang di daerah pesisir yang berisi air payau atau air laut; ia tidak dinamakan “kolam”, karena istilah kolam khusus digunakan bagi petakan berpematang berisi air tawar yang terdapat di daerah daratan (*inland*) (Soeseno, 1987 dalam Puspita, 2005:62). Berbeda halnya dengan sawah. Sawah merupakan lahan basah buatan yang dibatasi oleh pematang (galengan) yang digunakan untuk menanam padi dan dialiri dengan pengairan teknis, tadah hujan, atau pasang surut. Ekosistem sawah selalu digenangi air dalam periode tertentu dan dibentuk berpetak-petak [(Tim Penyusun Kamus Penebar Swadaya, 1997) dalam Puspita, (2005:8)]. Tambak dan sawah memiliki persamaan yakni lahan basah buatan yang

dibuat manusia untuk mengolah tanah sehingga bisa memberikan manfaat bagi manusia.

Marzali (1998) mengategorikan petani menjadi 3 kategori yakni *petani primitif*, *petani peisan*, dan *petani farmer*. Menurut Marzali (1998:90), perbedaan petani primitif dan petani peisan terletak pada teknologi yang digunakan dalam pertanian. Petani primitif menggunakan peralatan yang sangat sederhana seperti tugal dan golok, sedangkan petani peisan sudah menggunakan pacul, bajak, dan garu. Namun tingkat ini nampaknya tidak dipandang sebagai kriteria yang penting dalam pembedaan kedua tipe petani ini. Marzali (1998) mengatakan kriteria penting yang membedakan mereka adalah hubungan dengan kota.

Petani peisan adalah masyarakat pedesaan, hidup berhubungan dengan kota-kota pusat pasar, kadang-kadang kota metropolitan. Sedangkan petani primitif relatif hidup terisolasi, tidak punya hubungan secara sosial-ekonomi-politik-budaya dengan kota (Marzali, 1998). Sementara itu, petani peisan dan petani farmer mempunyai hubungan dengan kota secara sosial, politis, ekonomis, dan kultural (Marzali, 1998:91). Marzali menambahkan bahwa perbedaan antara keduanya terletak pada sifat usaha pertanian mereka. Petani peisan mengolah tanah dengan bantuan tenaga keluarga sendiri untuk menghasilkan bahan makanan bagi keperluan hidup sehari-hari keluarga petani tersebut. Mereka disebut sebagai petani dengan cara hidup subsisten. Sebaliknya, petani farmer mengusahakan tanah pertanian mereka dengan bantuan tenaga buruh tani, dan menjalankan produksi dalam rangka untuk mencari keuntungan.

Petani tambak berbeda dengan nelayan di laut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari orientasi pekerjaannya. Merujuk kepada pandangan Redfield [(1985) dalam Suhendar (1997:10)] yang menyatakan bahwa petani cenderung dikotomis yakni melihat petani sebagai *part culture*. Petani sebagai bagian dari tradisi besar dan tradisi kecil sangat berorientasi pada sikap dan cara hidup (*way of life*) tipikal dalam proses menguasai dan mengelola sumber daya tanah. Redfield lebih menekankan pada aspek pengelolaan sumber daya tanah di mana manusia menjalin hubungan yang intim dengan sumber daya tanah. Konsep petani yang diajukan oleh Redfield dapat terlihat pada praktik budidaya tambak yang dilakukan petani tambak yang menjalin hubungan intim dengan sumber daya

tanah. Sedangkan nelayan di laut, tidak menjalin hubungan yang intim seperti yang dilakukan oleh petani. Menurut Redfield (1982:41), sebagian besar nelayan dipisahkan dari kehidupan di darat, dan medan perikanan adalah bebas, kompetitif, semakin tidak terikat kepada ikatan-ikatan yang dibentuk oleh kehidupan lokal. Oleh karena itu, jika merujuk kepada Redfield, maka nelayan berbeda dengan petani tambak.

Pola hidup petani tambak dapat dikategorikan sebagai petani subsisten atau petani komersial dilihat dari pandangan petani terhadap orientasi kerjanya. Suhendar (1997:10-11) mengatakan bahwa ada tiga indikator yang dipakai untuk memahami pola hidup petani apakah masuk dalam kategori pola hidup subsisten atau pola hidup komersial. *Pertama*, sikap atau cara petani memperlakukan faktor-faktor produksi yakni tanah dan sumber daya agraria. Jika bersikap tidak komersial, tidak eksploitatif terhadap tanah dan sumber daya agraria, menganggap peningkatan produksi tidak perlu dan hanya memproduksi sebatas kebutuhan keluarganya (sekalipun dengan penguasaan tanah yang luas), petani tersebut termasuk petani subsisten. Sebaliknya, jika sikapnya didasari oleh orientasi surplus produksi dan maksimalisasi produksi, mereka termasuk petani komersial.

*Kedua* adalah besar kecilnya usaha petani. Sekalipun hanya menguasai lahan dalam skala usaha kecil, jika didasari oleh pemikiran yang cenderung berorientasi pasar (mengejar surplus), petani itu dapat disebut sebagai petani komersial. Sebaliknya, petani yang berlahan sempit dengan skala usaha terbatas termasuk berpola hidup subsisten apabila dalam usahanya itu tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk memaksimalkan produksi karena keterbatasan skala usaha dan kemampuan berproduksi.

*Ketiga* adalah jenis komoditas yang dibudidayakan petani. Walaupun menguasai komoditas komersial, jika hanya digunakan sebatas keperluannya, seorang petani disebut petani subsisten. Apabila mengusahakan tanaman komersial dengan tujuan memperoleh surplus, walaupun tanah yang dikuasainya sangat terbatas, petani itu bukanlah seorang petani subsisten, melainkan petani komersial.

Dalam skripsi ini istilah petani tambak menjadi relevan untuk digunakan. Hal ini mengacu kepada pendapat Redfield yang menyatakan bahwa petani menjalin hubungan yang intim dengan sumber daya tanah. Begitu juga halnya yang dilakukan petani tambak di mana petani mengolah tanah untuk dijadikan lahan tambak sehingga dapat memberikan manfaat bagi petani.

#### 1.5.4 Hubungan Patron-Klien

Scott (1972:92) mengemukakan bahwa hubungan patron-klien sebagai suatu keadaan khusus dari persekutuan *dyadic* (dua orang) yang melibatkan sebagian besar persahabatan, sementara seorang atau kelompok yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi berperan sebagai patron, menggunakan pengaruh, dan penghasilannya untuk memberikan perlindungan dan kebaikan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah. Kelompok ini berperan sebagai klien, bersedia membalas budi berupa dukungan menyeluruh yang meliputi pelayanan pribadi kepada patron.

Scott (1972) menambahkan bahwa dalam mengemukakan ciri hubungan patron-klien perlu membedakan dengan hubungan sosial lain. Hubungan patron-klien memiliki ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. *Kedua*, adanya sifat tatap muka (*face to face character*), di mana hubungan ini bersifat instrumental yakni kedua belah pihak saling memperhitungkan untung-rugi, meskipun demikian masih terdapat unsur rasa yang tetap berpengaruh karena kedekatan hubungan. *Ketiga*, hubungan patron-klien bersifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*), sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungan pada kegiatan kerja saja, melainkan juga hubungan tetangga, kedekatan secara turun-temurun ataupun persahabatan di masa lalu. Selain itu, terdapat pertukaran bantuan tenaga (jasa), dan dukungan kekuatan selain jenis-jenis pertukaran uang dan barang.

Berkembangnya hubungan patron-klien menurut Scott (dalam Layn 2008:47) disebabkan oleh (1)adanya perbedaan yang menyolok dalam penguasaan kekayaan, status yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. (2)tidak adanya jaminan keselamatan fisik, status, posisi atau kekayaan. (3)kekerabatan yang ada

tidak mampu lagi berfungsi sebagai sarana pelindung bagi keamanan dan kesejahteraan pribadi.

#### 1.5.4 Persoalan Akses dalam Penguasaan Tanah

Dalam membahas mengenai konsep tenurial, beberapa ilmuwan sosial berpendapat bahwa konsep tenurial adalah konsep sosial, maka istilah ini berbicara tentang seluruh relasi atau hubungan sosial di dalam suatu masyarakat yang terkait dengan kepemilikan, akses, dan penguasaan tanah dan sumber-sumber alam.

Saya menggunakan pemikiran Ribot dan Peluso dalam membahas mengenai teori akses. Pemikiran ini saya anggap mampu menjelaskan fenomena mengenai penguasaan tanah. Ribot dan Peluso ketika membahas mengenai akses, memisahkan terlebih dahulu pengertian kepemilikan dan akses. Konsep akses berbeda dengan kepemilikan dalam banyak hal yang tidak terhitung secara sistematis dalam literatur. Dalam hal ini Ribot dan Peluso (2003:153-54) berpendapat, *“Access as the ability to benefit from things-including material object, persons, institutions, and symbols. By focusing on ability, rather than rights as in property theory.”* Ribot dan Peluso mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dari sesuatu atau sumber daya meliputi objek material, orang, institusi, dan simbol-simbol. Dengan fokus pada 'kemampuan', perhatian tertuju pada jangkauan yang lebih luas dari hubungan sosial yang dapat memungkinkan seseorang mengambil manfaat dari sumberdaya tanpa melihat pada hubungan kepemilikan.

Neale [(1998:48) dikutip Ribot dan Peluso (2003:154)] berpendapat bahwa akses berfokus pada isu siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat memanfaatkan sesuatu, dan kapan saatnya. *“... focus on the issues of who does (and who does not) get use what, what ways, and when (that is, in what circumstances.”* Perbedaan kunci antara akses dan kepemilikan bersandar pada perbedaan antara 'kemampuan' dan 'hak'. Kemampuan identik dengan kekuatan yang dapat didefinisikan ke dalam dua kalimat. Pertama, kapasitas seorang aktor untuk mempengaruhi ide dan tindakan orang lain, dan kedua dari mana kekuatan itu berasal. Akses adalah tentang makna semua kemungkinan yang dengannya

seseorang dapat mengambil manfaat dari sesuatu. Sedangkan kepemilikan lebih berorientasi pada klaim terhadap hak, cenderung diartikan dengan hukum, aturan, atau konvensi.

Akses atas sumber daya tersebut membutuhkan pola-pola hubungan sosial agar dapat dipelihara, dipertahankan dan dikontrol hingga dapat menghalangi orang atau kelompok lain yang ingin memperoleh akses yang sama. Menurut Ribot dan Peluso (2003), dalam beberapa hal memiliki akses itu mirip dengan memiliki kekuasaan. Akses merupakan berbagai cara yang memungkinkan seseorang atau suatu kelompok mendapatkan manfaat dari sesuatu atau sumber daya meskipun belum menjadi milik secara legal formal dari orang atau kelompok orang yang memanfaatkannya. Penggunaan kata legal maupun ilegal akses dapat diaktifkan berdasarkan hukum.

Menurut Ribot dan Peluso (2003:158), aspek politik-ekonomi dalam konsep di sini menjadi data saat memisahkan tindakan sosial kedalam kontrol akses dan pemeliharaan akses. Kontrol akses adalah kemampuan untuk menengahi akses orang lain, kontrol ini merujuk pada menguji dan tujuan dari tindakan, fungsi atau kekuatan mengarahkan dan mengatur tindakan bebas. Sementara pemeliharaan akses membutuhkan sumberdaya atau kekuatan untuk menjaga beberapa macam akses sumber daya terbuka. Namun Ribot menegaskan bahwa kontrol dan pemeliharaan adalah komplementer supaya akses atau sesuatu tetap terjaga dan tidak pindah pada kelompok lain.

Akses berbasis pada hak, berupa akses legal dan akses ilegal (Ribot dan Peluso, 2003:161). Arti dari akses berdasarkan hak mencakup keterlibatan komuniti, negara, dan pemerintah yang menguatkan klaim. Intinya hak didefinisikan oleh hukum, aturan, atau konvensi yang membentuk kontrol dan pengelolaan terhadap akses. Kepemilikan berdasarkan hukum mencakup akses lewat memegang hak milik dengan izin dan lisensi dimana pemegangnya dapat mengendalikan akses. Hukum yang mempengaruhi akses meliputi zonasi, perizinan, ijin, kuota, pajak, produk musiman, perlindungan spesies, dll (Ribot dan Peluso, 2003:161). Orang lain yang tidak memilikinya harus datang pada pemegang izin dan lisensi tersebut untuk memperoleh atau mengelola akses. Namun sering terdapat ambiguitas dalam hukum, aturan, dan konvensi untuk

mengalokasikan hak-hak untuk sumberdaya yang sama untuk pihak yang berbeda. Ambiguitas ini berlaku apalagi dimana terdapat pluralisme hukum.

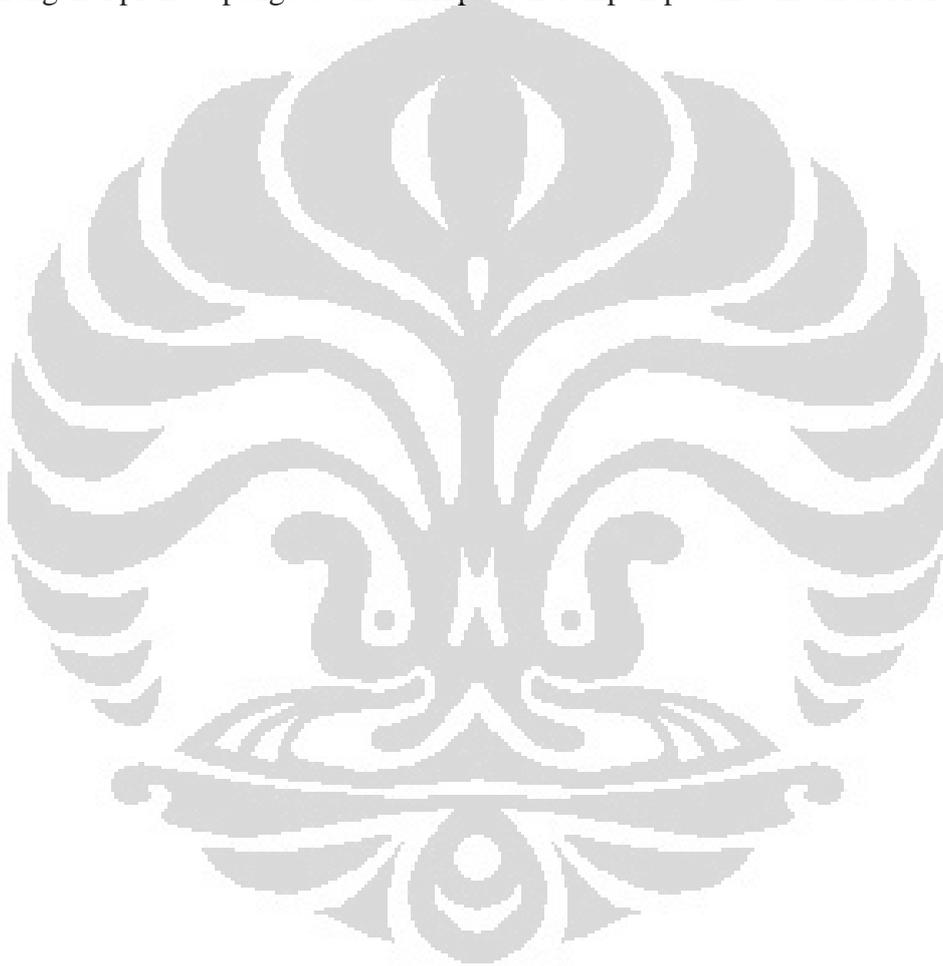
Ilegal akses juga berdasarkan hak; bergantung pada hubungan aktor pada hukum, bentuk aturan atau sanksi konvensional lainnya. Ilegal akses mengarah pada kesenangan mengambil manfaat dari sesuatu dengan cara yang secara sosial tidak dikenakan sanksi oleh negara maupun masyarakat. Akses tersebut diperoleh dengan cara kekerasan atau mencuri secara diam-diam, kemudian dibentuk oleh aktor yang terlibat dalam hubungan pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan dari akses itu sendiri (Ribot dan Peluso, 2003:164). Ilegal akses beroperasi lewat paksaan, artinya seseorang dapat mengelola akses secara ilegal dengan menyerang balik pemegang kontrol akses tersebut. Akhirnya kekerasan dan pencurian harus dipikirkan sebagai mekanisme hak-terlarang dalam akses.

Akses pada sumber daya dapat juga berupa teknologi, modal, pasar, pengetahuan, kekuasaan, identitas sosial dan hubungan sosial (Ribot dan Peluso, 2003:165). Pada intinya ini adalah bagaimana teknologi, modal, pasar, pengetahuan, kekuasaan, identitas sosial dan hubungan sosial dapat membentuk atau mempengaruhi akses. Banyak sumberdaya tidak dapat diekstraksi tanpa menggunakan teknologi. Teknologi yang lebih canggih bermanfaat untuk orang yang mempunyai akses pada sumberdaya tersebut, ini adalah akses terhadap teknologi. Gilbert dan Gugler (1996:82) berpendapat bahwa ada beberapa keuntungan memiliki akses terhadap teknologi tinggi, tetapi satu hal penting untuk teknologi tinggi tidak tepat untuk negara-negara miskin. Teknologi maju lebih cocok dengan negara-negara industri maju.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam 6 Bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka konsep yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, proses pencarian data, dan tipe penelitian. Bab 3 menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, kondisi sosial-ekonomi Kelurahan Marunda, kondisi kependudukan dan perkembangan yang terjadi di Marunda. Bab 4 memaparkan praktik

pengelolaan tambak di Marunda. Bab 5 merupakan pembahasan pranata penguasaan tanah yang berlaku di kalangan petani petani tambak. Pada bab ini akan ditunjukkan bagaimana pranata penguasaan tanah terbentuk dan terpelihara, praktik-praktik apa saja yang dilakukan petani tambak dalam memelihara akses terhadap tanah untuk dijadikan lahan tambak, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan tanah serta hubungan yang terjalin antar aktor tersebut. Terakhir, Bab 6 adalah bab penutup skripsi ini. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan umum mengenai pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak di Marunda.



## **BAB 2**

### **METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN**

Suatu penelitian antropologi yang berusaha memberikan gambaran mengenai pranata penguasaan tanah dalam suatu masyarakat akan sangat membantu dalam memahami aturan-aturan yang diyakini dan dijadikan pedoman masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah. Dengan melihat dari aspek pranata pada penguasaan tanah, yaitu bagaimana orang menguasai suatu tanah, saya akan mencoba memberikan gambaran dengan sebaik-baiknya mengenai pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak di Kelurahan Marunda. Untuk mendapatkan gambaran ini saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang terkait dengan tema penelitian skripsi saya mengenai pranata penguasaan tanah.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara mendalam terhadap informan dengan menggunakan panduan wawancara dan pengamatan terlibat terhadap objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari kantor Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, dan kantor Walikota Jakarta Utara serta dari literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

Untuk memperoleh informasi dan pemberitaan mengenai Marunda saya ikuti melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Melalui media massa ini saya juga mendapatkan data-data yang saya rasa penting yang terkait dengan wacana dan fenomena yang seringkali muncul di Marunda. Wacana dan fenomena ini menambah informasi yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi saya. Informasi ini juga membantu saya memahami kondisi sosial-budaya di Marunda terutama yang terkait dengan penggunaan dan penguasaan tanah.

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terfokus pada bagaimana pranata penguasaan tanah mengatur kelompok petani tambak di Kelurahan Marunda untuk memanfaatkan dan menguasai tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Pembatasan ruang lingkup ini meliputi bagaimana pranata penguasaan tanah

terbentuk dan terpelihara pada kelompok petani tambak dan pihak-pihak yang terlibat dalam pranata penguasaan tanah.

## 2.1 Pendekatan Penelitian

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berlangsung selama 3 bulan sejak 23 Januari 2011 sampai dengan 24 April 2011 dan dilanjutkan dengan penulisan hingga bulan Desember 2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendapatkan data secara mendalam mengenai pranata penguasaan tanah. Data secara mendalam ini meliputi pemaknaan dari setiap informasi yang diperoleh dari informan. Untuk mendapatkan data ini diperlukan suatu metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan terlibat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih dalam metode penelitian ini.

Pendekatan penelitian kualitatif dapat menggambarkan hasil penelitian secara holistik dan mendalam mengenai fokus penelitian yang saya ajukan. Holistik karena melibatkan usaha pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha pensketsaan atas gambaran besar yang muncul (Creswell, 2010:263). Pendekatan seperti ini juga dapat menghasilkan deskripsi kehidupan sosial-mikro (*micro social*) yang penekanannya pada kedalaman dari masyarakat yang diteliti dan biasanya terpusat pada sebuah pranata saja, dan karena itu penekanan kajiannya adalah pada satuan kehidupan yang kecil atau mikro (Suparlan, 2004:6).

Untuk mendapatkan data secara mendalam, pengumpulan data dalam pendekatan ini tidak hanya melalui satu teknik pengumpulan data saja, melainkan juga melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan terlibat, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan rinci. Melalui teknik wawancara mendalam saya dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai pranata penguasaan tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Untuk lebih mendalami kehidupan petani tambak, teknik pengamatan terlibat membantu saya memahami kondisi riil yang terjadi pada kelompok petani tambak.

Penelitian kualitatif yang telah saya lakukan bersifat penemuan pada kondisi alamiah dan dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara (lihat Creswell, 2010:20). Dalam penelitian kualitatif ini, saya sebagai seorang peneliti adalah instrumen kunci. Saya berusaha mengumpulkan sendiri data yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh petani tambak melalui dokumentasi, observasi perilaku, dan wawancara dengan partisipan. Saya menempatkan diri saya sebagai satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan data. Dari data yang saya peroleh ini saya membuat interpretasi atas apa yang saya lihat, dengar, dan pahami. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat subjektif.

## **2.2 Proses Pencarian Data**

Sebelum turun lapangan, persiapan yang saya lakukan sudah dimulai sejak berada di semester 7 tepatnya ketika menyusun proposal penelitian pada periode September sampai dengan Desember 2010. Saat itu saya mulai mantap untuk memilih permasalahan mengenai petani tambak terutama petani tambak yang berada di Kota Jakarta. Selama persiapan proposal penelitian, berbagai diskusi dilakukan dengan dosen mata kuliah Seminar Penelitian, beberapa dosen Antropologi UI, dosen Biologi UI dan studi literatur saya lakukan. Hampir enam bulan saya menyiapkan proposal penelitian sebelum saya memantapkan untuk turun lapangan. Selain melalui tahapan diskusi yang cukup panjang, saya juga mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan tema penelitian saya mengenai topik serupa dengan yang saya pilih.

Literatur yang saya kaji berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian serupa. Literatur ini saya dapatkan di beberapa perpustakaan, antara lain di perpustakaan Universitas Indonesia, di perpustakaan departemen Antropologi UI, di perpustakaan departemen Biologi UI, di perpustakaan Institut Pertanian Bogor, dan di perpustakaan Pusat Kajian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PKSPL) IPB. Beberapa data literatur dan informasi yang saya peroleh bersifat teknis dan teoritis mengenai tambak saja. Dari hasil temuan literatur yang saya peroleh masih sangat jarang saya temui kajian mengenai pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak.

Selama tahap studi literatur saya melakukan pencatatan terhadap kasus-kasus mengenai permasalahan tambak yang seringkali muncul di Indonesia. Proses pencatatan ini saya lakukan untuk menentukan permasalahan yang saya angkat dalam skripsi ini. Proses ini saya lakukan karena saya merasa perlu memahami betul kasus-kasus yang terjadi dan bagaimana penulis menjelaskan kasus-kasus tersebut serta isu teoritis apa yang muncul dalam kasus tersebut.

Setelah tahap studi literatur saya lakukan, saya juga mengurus perizinan untuk melakukan penelitian. Hal pertama yang saya lakukan yakni mengurus surat perizinan dari pihak kampus mengenai maksud dan tujuan penelitian yang ditujukan untuk instansi setempat dalam hal ini pihak Kelurahan Marunda. Saya mendapat kemudahan ketika saya mengajukan izin penelitian ini kepada pihak Kelurahan Marunda. Hal ini disebabkan di lokasi ini saya pernah terlibat dalam kegiatan program pelatihan pengolahan hasil budidaya tambak untuk warga Marunda yang dilaksanakan oleh Departemen Biologi UI pada tahun 2010 tepatnya di bulan Oktober.

Sebagai titik permulaan dari proses pencarian data di lapangan, saya menyebarkan kuesioner. Hal ini saya lakukan karena saya merasa membutuhkan data yang mendasar dan lebih terstruktur melalui metode kuantitatif. Data seperti ini saya perlukan untuk mengetahui gambaran mengenai berapa banyak petani yang ada di lokasi penelitian, berapa luas lahan yang mereka garap, komoditas apa yang dibudidayakan, dan produksi hasil budidaya tambak. Untuk mendapatkan data seperti ini saya rasa metode kuantitatif terutama penggunaan metode survei melalui penyebaran kuesioner lebih efektif dan cepat dalam menyajikannya. Namun, pengumpulan data melalui metode kuantitatif ini bukan berarti dengan analisis statistik, melainkan sekedar untuk mendapatkan data deskriptif mengenai petani tambak di lokasi tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai tema penelitian didapat melalui teknik wawancara mendalam terhadap petani tambak, Ketua RT, isteri-isteri petani tambak, dan ketua kelompok petani tambak, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan budidaya tambak seperti kuli tambak dan aparat kelurahan setempat. Semua pembicaraan dan pencatatan data dilakukan oleh saya sendiri. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, tetapi seringkali informan berbicara dalam

Bahasa Betawi. Informan yang saya temui memang beberapa di antaranya adalah orang Betawi. Namun hal ini tidak menjadi kendala bagi saya, karena Bahasa Betawi masih dapat saya pahami. Sejumlah kata atau istilah Bahasa Betawi yang tidak saya ketahui, saya catat untuk ditanyakan lebih lanjut. Pencatatan data saya tuliskan dalam suatu catatan lapangan mengenai temuan lapangan yang saya peroleh berdasarkan hasil pembicaraan dan hasil pengamatan di lapangan.

Untuk memudahkan dalam memperoleh data, beberapa pembicaraan dengan petani tambak saya rekam menggunakan alat perekam. Alat perekam ini memudahkan saya untuk mengingat kembali informasi dari hasil pembicaraan dengan informan. Selain alat perekam, saya juga menggunakan buku saku berukuran kecil yang mudah dibawa kapan saja dan ke mana saja saya perlukan. Hal-hal yang menurut saya penting, saya catat dalam buku saku ini dalam bentuk ringkasan maupun rincian kegiatan. Catatan lapangan ini saya tuliskan dan saya baca kembali untuk mengembangkan pertanyaan wawancara dan untuk analisis sementara.

Jangka waktu penelitian selama 3 bulan saya rasa cukup panjang untuk dapat memahami pranata penguasaan tanah, proses terbentuknya pranata penguasaan tanah, pemeliharaan akses terhadap tanah, mempelajari pemanfaatan tanah di Marunda terutama pemanfaatan tanah yang dilakukan petani tambak, kegiatan budidaya tambak, aktivitas di luar tambak, hasil produksi, interaksi antar petani tambak, kegiatan sosial dan keagamaan, dan hal-hal penting lainnya. Bersamaan dengan itu data-data juga dikumpulkan mengenai hubungan kekeluargaan pada petani tambak. Namun saya juga tidak memungkiri bahwa terdapat beberapa kendala untuk mendapatkan data yang benar dalam satu wawancara mengenai hal-hal sensitif, seperti status kepemilikan dan penguasaan tanah, sangatlah sulit. Untuk memperoleh data yang saya anggap benar, saya melakukan *cross check* dari setiap hasil pembicaraan dengan informan. Bentuk *cross check* ini saya lakukan dengan cara menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda.

Analisa yang digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh adalah lebih berlandaskan kepada hasil-hasil kerja lapangan (*field work*) yang kemudian dapat disebut sebagai analisa terhadap data primer dari hasil wawancara

dan pengamatan terlibat. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu, pembahasan ini dilengkapi juga dengan analisa terhadap data sekunder.

Untuk mendapatkan data mengenai pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak saya menggunakan teknik wawancara mendalam yang didukung oleh pengamatan terlibat. Sebelum melaksanakan proses wawancara, semua daftar pertanyaan yang akan saya gunakan dalam proses wawancara saya susun sebagai pedoman untuk mengembangkan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pengetahuan petani tambak yang terkait dengan pranata penguasaan tanah. Sedangkan teknik pengamatan terlibat saya lakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik-praktik yang dilakukan petani tambak terutama cara petani tambak untuk menguasai suatu lahan tambak.

Proses pencarian data melalui teknik wawancara tidak hanya dilakukan secara personal mendatangi satu informan saja, melainkan dengan dua atau lebih informan sekaligus. Hal ini untuk mendapatkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh satu informan dengan informan lainnya sehingga dapat mencatat di mana letak perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh informan. Tidak jarang dari pembicaraan yang saya lakukan kepada mereka, mereka berdebat satu sama lain terkait dengan pendapat yang dinilai berbeda. Perbedaan pengetahuan ini menyiratkan bahwa pengetahuan yang dimiliki informan tidaklah selalu sama.

Pada waktu melaksanakan penelitian lapangan saya melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat<sup>4</sup> di antaranya adalah: Pak Kasmuri yang merupakan Ketua RT 03/RW 04. Pak Kasmuri merupakan saudara dari Pak Kasman dan Pak Kasum yang juga sebagai petani tambak. Pak Kasmuri memiliki lahan garapan di tanah PT, sedangkan Pak Kasman memiliki lahan tambak di

---

<sup>4</sup> Penentuan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan pertama, informan yang saya pilih yakni informan yang sudah lama tinggal di lokasi penelitian. Informan seperti ini mengetahui informasi yang banyak mengenai Marunda dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Kedua, informan yang saya wawancarai adalah aparat setempat dalam hal ini pihak kelurahan, RW, dan RT. Selama proses pengumpulan data, aparat-aparat ini mampu memberikan informasi demografi masyarakat Marunda dan informasi lainnya terkait dengan Marunda.

dekat Banjir Kanal Timur yang lokasinya sudah masuk Kabupaten Bekasi. Untuk mencapai lokasi lahan tambak Pak Kasman dibutuhkan waktu lebih kurang satu jam perjalanan dari rumah Pak Kasmuri (Sungai Tiram). Sedangkan Pak Kasum merupakan buruh tambak yang memiliki waktu kerja tak menentu bergantung pada kebutuhan petani tambak. Sementara itu, untuk menggali data dan informasi mengenai keberadaan kelompok petani tambak dari Pak Ahmad Taufik yang merupakan ketua kelompok tambak Bina Marunda Windu. Informasi yang diperoleh dari Pak Taufik meliputi kegiatan kelompok tambak dan peran pemerintah terhadap keberadaan kelompok petani tambak. Pak Taufik aktif merangkul anggotanya dalam kegiatan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga pengalaman Pak Taufik dan anggotanya diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan baru melalui pelatihan tersebut. Informan lainnya yakni petani tambak yang terdiri dari Pak Atillah, Pak Sakri, Pak Kasman, Pak Kasno, Pak Antari dan Pak Matrozi; dan ibu rumah tangga yang suaminya berprofesi sebagai petani tambak.

Informasi yang dikumpulkan dalam wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan budidaya tambak, sejarah Marunda dan tambak di Marunda, bentuk-bentuk pengelolaan tambak, dan berbagai kegiatan sosial yang sering dilaksanakan di lokasi penelitian. Selain itu, saya juga menggali informasi mengenai berbagai pandangan mereka tentang alasan memilih menjadi petani tambak, bagaimana memperoleh akses terhadap tanah, hubungan dengan petani tambak lainnya dan pemilik tanah.

Dalam teknik wawancara ini saya mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab. Teknik ini digunakan dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum tercakup dalam pertanyaan dapat digali dengan teknik ini. Di dalam wawancara ini saya telah mengajukan beberapa pertanyaan yang di dalamnya terdapat pedoman wawancara mengenai informasi apa saja yang ingin saya peroleh. Pertanyaan-pertanyaan yang saya susun dalam pedoman wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan etnografis (lihat Spradley, 2006).

Spradley (2006:87-8) mengidentifikasi tiga tipe utama dalam pertanyaan etnografis. *Tipe pertama*, pertanyaan deskriptif. Tipe pertanyaan ini

memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan satu sampel yang terjadi dalam bahasa informan. Pertanyaan deskriptif merupakan tipe pertanyaan yang paling mudah untuk diajukan dan digunakan di semua jenis wawancara. Dalam pertanyaan ini, informan diminta untuk menggambarkan suatu fenomena. *Tipe kedua*, pertanyaan struktural. Pertanyaan jenis ini memungkinkan saya selaku peneliti untuk menemukan pengetahuan informan mengenai domain unsur-unsur dasar dalam pengetahuan budaya seorang informan. Pertanyaan-pertanyaan ini juga memungkinkan saya untuk menemukan bagaimana informan mengorganisir pengetahuan mereka. Pertanyaan seperti bagaimana proses pengajuan izin menggarap dan prosedur dalam budidaya tambak ditanyakan dalam pertanyaan ini. *Tipe ketiga*, pertanyaan kontras. Etnografer ingin menemukan berbagai hal yang dimaksudkan oleh informan dengan berbagai istilah yang digunakan dalam bahasa aslinya. Pertanyaan kontras memungkinkan etnografer menemukan dimensi makna yang dipakai oleh informan untuk membedakan berbagai objek dan peristiwa dalam dunia informan. Ketiga tipe pertanyaan ini saya muat dalam pedoman wawancara yang saya susun.

Untuk pelaksanaan wawancara dilakukan secara formal dan informal. Teknik pengumpulan melalui wawancara formal dilakukan dengan cara mendatangi satu informan. Saat wawancara berlangsung, saya menjelaskan maksud dan tujuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Hal ini dilakukan agar informan menyadari dan tahu bahwa dia sedang diwawancarai dan dimintai pendapat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Pada situasi seperti ini, selain menjadikan pedoman wawancara sebagai urutan pertanyaan dan rincian pertanyaan, saya juga mengembangkan pembicaraan yang berasal dari jawaban informan sehingga saya bisa masuk dalam arena pengetahuan mereka.

Proses pengumpulan data melalui wawancara tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dilakukan secara informal. Wawancara informal ini serupa dengan pendapat Koentjaraningrat mengenai wawancara sambil lalu yaitu wawancara tanpa rencana yang informannya tidak dipilih secara ketat kecuali siapa saja yang kebetulan dijumpai (Koentjaraningrat, 1981:175). Wawancara informal lebih merujuk kepada keadaan informal ketika wawancara berlangsung.

Wawancara informal dilakukan ketika saya mengikuti obrolan santai di tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat berkumpul warga seperti warung, pos ronda, dan gubuk tempat istirahat petani tambak. Obrolan ini lebih mengarah kepada obrolan sehari-hari yang biasanya diperbincangkan oleh warga. Selama proses penelitian, obrolan-obrolan sehari-hari ini mampu memberikan informasi terbaru dan informasi yang sedang dibicarakan banyak orang di lokasi penelitian saya. Kualitas informasi yang dilakukan melalui wawancara ini lebih baik dibandingkan dengan wawancara formal. Hal ini disebabkan informasi yang disampaikan bukan informasi yang ideal dari informan, melainkan informasi yang benar-benar terjadi dan dialami oleh warga sehingga data yang saya peroleh lebih rinci dan kaya.

Teknik pencarian data melalui wawancara menjadi penting dilakukan. Hal ini disebabkan data utama yang saya cari adalah pengetahuan petani tambak terkait dengan penguasaan tanah. Pengetahuan ini meliputi bagaimana cara mereka memperoleh tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak, aturan-aturan yang mengatur penguasaan tanah, sistem pengelolaan tambak, pengalaman menjadi petani tambak, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tambak dan penguasaan tanah. Untuk mendapatkan informasi ini saya mengajukan pertanyaan dengan sangat hati-hati. Saya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk mereka pahami terutama penggunaan istilah-istilah Antropologi. Oleh karena itu, pemilihan bahasa menjadi penting ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam melakukan wawancara.

Dalam mengumpulkan data lapangan saya melakukannya seorang diri terutama ketika mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Saya memanfaatkan kesempatan mewawancarai informan untuk lebih akrab menjalin hubungan baik dengan warga walaupun beberapa informan sudah saya kenal ketika pelatihan hasil budidaya tambak di kantor Kelurahan Marunda. Hubungan baik ini menjadi penting untuk mengenal informan secara pribadi. Begitu juga sebaliknya, informan mampu mengenal saya secara lebih dekat terutama dalam membangun kepercayaan informan bahwa saya benar-benar bermaksud melakukan penelitian di lokasi ini. Dengan mengenal informan secara pribadi, saya bisa mendapatkan informasi yang seringkali tidak tercatat dalam pedoman wawancara. Saya pun

dapat mengembangkan pedoman wawancara. Ketika data lapangan sudah saya peroleh, saya melakukan konfirmasi kepada informan lain. Hal ini dilakukan sebagai *cross check* untuk menjaga validitas data atau triangulasi data. *Cross check* data yang saya lakukan yakni menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan lain. Dari hasil pengumpulan data yang saya peroleh terdapat jawaban-jawaban yang seringkali berbeda. Hal ini menyebabkan saya harus menanyakan kembali jawaban-jawaban yang berbeda tersebut dan menggali kembali informasi apa saja yang memiliki perbedaan mencolok.

Teknik lain yang saya gunakan untuk mengumpulkan data adalah pengamatan terlibat. Pengamatan terlibat menjadi teknik pengumpulan data yang signifikan karena penelitian tidak hanya bermanfaat untuk mendekatkan diri peneliti dengan masyarakat yang diteliti, tetapi juga untuk mendapatkan pengertian, penjelasan tindakan-tindakan masyarakat, pelajaran dan pengalaman saat peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan informan. Bernard dalam Borofksy mengatakan bahwa “... *most all of us (anthropologist) use the strategic method of participant observation to collect our primary data*” (1994:15). Melalui pengamatan terlibat ini saya dapat melihat langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang saya teliti dan mengantarkan saya kepada ritme kehidupan yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut.

Ketika pengamatan tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang saya teliti, maka partisipasi atau keterlibatan saya membantu saya memahami peristiwa yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut. Keterlibatan dengan objek yang diteliti telah memudahkan saya dalam melakukan *immersion* (Flick, 2005:139) dalam rangka memahami aktivitas dan pengalaman petani tambak sebagai hal yang bermakna dan penting. Penelitian yang saya lakukan ini terbantu oleh kedekatan emosional antara petani tambak dengan pihak UI melalui rangkaian kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan di kantor Kelurahan Marunda. Saat itu saya ikut terlibat dalam kegiatan pelatihan. Sedikit banyak saya dikenalkan oleh pihak kelurahan kepada petani tambak. Sejak saat itulah saya mulai mengenal mereka walaupun hanya sebatas nama.

Identitas saya sebagai bagian dari pihak UI yang memberikan pelatihan hasil budidaya tambak menjadikan keberadaan saya jadi lebih mudah diterima.

Akan tetapi, hal ini tidak menjamin saya dapat dengan mudah menggali data di tempat penelitian, sebagai individu yang berbeda, saya tetap harus membangun *rapport* (lihat Brewer, 2005). Proses membangun *rapport* ini memberikan banyak manfaat ketika saya membaur dan diterima sebagai bagian dari masyarakat yang saya teliti karena terdapat informasi-informasi yang tidak dapat diraih tanpa membangun *rapport* yang baik dengan masyarakat yang saya teliti. Ketika sudah diterima dengan baik oleh masyarakat, saya mampu mendapatkan informasi yang kaya dan rinci dari masyarakat yang saya teliti.

Partisipasi yang telah saya lakukan yakni berupa keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat terutama yang terkait dengan kegiatan budidaya tambak. Seperti yang diungkapkan Borofksy (1994:15) “*Anthropologist not only observe the people being studied but they also participate, with the people, in various activities.*” Kegiatan yang saya lakukan dalam rangka ikut berpartisipasi dengan objek penelitian meliputi keikutsertaan kegiatan budidaya tambak, duduk bersama dalam obrolan petani tambak, ikut *merogoh* (menangkap ikan dan udang) hasil panen, ikut obrolan di gubuk, dan ikut makan bersama di gubuk. Budidaya tambak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang saya teliti. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tambak ini saya mampu merasakan dan ikut mengalami apa saja yang dilakukan petani tambak dalam melakukan kegiatannya. Alasan mengapa harus terlibat dalam kegiatan seperti ini yakni saya mampu memahami peristiwa yang terjadi di masyarakat ketika melalui pengamatan secara kasat mata tidak mampu menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung di masyarakat.

Pengamatan yang telah saya lakukan yakni pengamatan terhadap keadaan lingkungan fisik seperti pemukiman penduduk, kondisi rumah, tambak, sungai, sistem pengairan tambak, sistem pemanfaatan tanah, sarana umum, dan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi penelitian. Saya juga melakukan pengamatan pada berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari pagi hari hingga malam hari; mengikuti rangkaian kegiatan petani tambak mulai dari berangkat ke tambak sampai pulang kembali ke rumah; melakukan pengamatan mengenai kegiatan bertambak seperti menguras tambak, panen tambak, *mendadani* tambak, menangkap hasil budidaya tambak, dan mencari pakan

tambak. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial seperti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Pondok Pesantren yatim piatu yang terletak di dekat Kelurahan Marunda dan ikut acara pernikahan salah satu petani tambak yang letaknya di Muara Gembong Kabupetan Bekasi. Sebagian dari kegiatan pengamatan ini saya lakukan secara terlibat aktif dengan turut melibatkan diri dalam kehidupan mereka.

Untuk mendapatkan pengalaman dan kehidupan petani tambak yang lebih mendalam, saya tinggal di rumah salah satu petani tambak di lokasi tersebut. Rumah yang menjadi tempat tinggal sementara saya di lokasi tersebut yakni rumah Pak Kasmuri. Beliau adalah ketua RT 03/R04. Rumah ini saya pilih dengan pertimbangan bahwa Ketua RT merupakan tokoh masyarakat di lokasi tersebut yang sedikit banyak kenal dengan karakteristik warga dan jumlah petani tambak. Melalui Ketua RT, saya mampu mendapatkan informasi mengenai data kependudukan dan kehidupan petani tambak. Penelitian saya sangat terbantu oleh Pak Kasmuri yang menjadi *gatekeeper* yang memudahkan akses saya untuk menggali data di lapangan dan memudahkan saya untuk diperkenalkan kepada petani tambak yang ada di lokasi tersebut., Brewer (2005: 83) menyebutkan bahwa "*gatekeepers are those individuals that have the power to grant access to the field. Access to a research setting is gained via a 'gatekeeper'*".

Selain menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan terlibat dan wawancara, saya juga menggunakan data sekunder, baik arsip-arsip yang dimiliki oleh petani tambak, data demografi, geografi, laporan bulanan Kelurahan Marunda maupun artikel serta manuskrip yang relevan untuk menunjang penelitian ini.

### **2.3 Menentukan Informan dan Lokasi Penelitian**

Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan untuk digali berbagai informasi yang ia miliki, namun tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik. Hubungan antara etnografer dengan informan penuh dengan kesulitan. Salah satu tantangan besar dalam melakukan etnografi adalah memulai, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan dengan informan yang

produktif (Spradley, 2006:65). Untuk itu perlu pertimbangan yang mumpuni dalam menentukan informan.

Sasaran informan utama yang saya pilih adalah mereka yang masih berprofesi sebagai petani tambak. Pertimbangan dalam menentukan informan ini yakni bagi mereka yang masih berprofesi sebagai petani tambak dapat diperoleh informasi mengenai kegiatan budidaya tambak untuk konteks saat ini ketika penelitian berlangsung. Sementara itu, saya juga mewawancarai mereka yang sudah tidak menjadi petani tambak. Hal ini dilakukan untuk dapat diperoleh informasi mengenai alasan mereka meninggalkan profesi sebagai petani tambak. Namun, pertimbangan ini saya rasa masih cukup luas. Untuk itu dalam menentukan informan, saya menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, informan yang dipilih adalah informan yang mengetahui budayanya dengan baik tanpa harus memikirkannya dalam hal ini pranata penguasaan tanah (lihat Spradley, 2006). Dalam pertimbangan yang pertama ini, rentang waktu juga menentukan dalam pemilihan informan. Saya memilih informan berdasarkan rentang waktu menjadi petani tambak. Semakin lama rentang waktu menjadi petani tambak diharapkan mampu mengetahui secara mendalam mengenai pranata penguasaan tanah untuk dijadikan lahan tambak.

Kedua, informan tersebut merupakan aktor yang terlibat secara penuh dalam budidaya tambak dan hal-hal lain terkait dengan penguasaan tanah. Orang yang terlibat secara aktif terkait budidaya tambak diharapkan mampu digali pengetahuannya terutama mengenai pranata penguasaan tanah. Ketiga, informan yang dipilih adalah informan yang memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam wawancara dan bersedia untuk dijadikan informan. Pada umumnya informan yang bersedia dan mau meluangkan waktunya untuk digali informasinya akan lebih proaktif dalam memberikan data. Namun terkadang informan yang mempunyai informasi yang mendalam terkait dengan tema skripsi, sulit atau terlalu sibuk untuk diwawancarai. Seringkali saya mewawancarainya sambil ia bekerja atau menjalankan aktivitasnya dengan catatan informan tersebut mengizinkan saya untuk mewawancarainya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang mengantarkan saya kepada informan-informan yang mampu memberikan

data yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Selain pertimbangan dalam menentukan informan, saya juga mempertimbangkan pemilihan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan Marunda ini merupakan daerah perbatasan DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi. Kelurahan Marunda merupakan salah satu wilayah pesisir utara Jakarta yang cukup ramai kegiatan ekonominya, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Marunda Centre. Di tengah-tengah kawasan kegiatan ekonomi skala besar ini terdapat suatu kelompok masyarakat yang masih mengolah tanah untuk dijadikan lahan tambak. Kelompok masyarakat ini adalah petani tambak. Petani tambak ini menyebar ke beberapa wilayah di Kelurahan Marunda. Wilayah ini meliputi Bambu Kuning, Sarang Bango, dan Sungai Tiram. Wilayah yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi tempat saya mengeksplorasi data mengenai petani tambak dengan pertimbangan jumlah petani tambak di lokasi ini cukup banyak.

Kriteria pertama yang digunakan untuk memilih Sungai Tiram yakni letaknya yang mencakup dua kawasan yang berbeda: kawasan industri Jakarta Utara dan kawasan Mabes TNI AL. Dari aspek pembangunan, di wilayah ini sedang gencar dilaksanakan proyek pembangunan dan menjadi salah satu wilayah yang dijadikan perluasan kota. Wilayah ini diprediksi akan menjadi pusat perekonomian di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Ditambah lagi Pemda DKI Jakarta sedang merancang Kawasan Ekonomi Khusus di Marunda. Tidak menutup kemungkinan dibutuhkan lahan yang luas untuk proyek pembangunan tersebut. Ketika proyek pembangunan sudah mulai berlangsung, maka hal pertama yang sering dilakukan adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini rawan terjadinya sengketa dan konflik tanah serta protes dari warga. Agar dapat meminimalisir sengketa dan konflik tanah ini perlu dipahami kondisi *de facto* penguasaan tanah oleh warga, selain kondisi *de jure* yang berdasarkan sertifikat tanah secara hukum formal.

Kriteria yang kedua, Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara adalah termasuk salah satu kelurahan yang termasuk dalam Evaluasi Rukun Warga Kumuh, dan Kelurahan Marunda merupakan kelurahan dengan

jumlah RT yang kumuh tertinggi dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing (Pelita, 31 Maret 2008)<sup>5</sup>.

Jumlah petani tambak di Marunda persebarannya cukup beragam untuk dapat dipelajari dengan teliti, maka saya memfokuskan pada satu RW, yakni RW 04. Jumlah petani tambak yang terdata di RW ini mencapai 20 orang. Di lokasi ini juga terdapat kelompok petani tambak Bina Marunda Windu (BMW) yang mendapat perhatian dari pemerintah setempat dalam hal ini dari Suku Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara. Dengan adanya perhatian ini, maka terdapat keterlibatan negara pada kelompok petani tambak di wilayah ini. Selain keterlibatan dari Suku Dinas P2K, terdapat juga pihak Mabes TNI AL selaku pemilik tanah yang tanahnya digarap oleh sejumlah petani tambak. Keterlibatan dua agen negara ini menambah kajian ini lebih kaya dan rinci karena dapat menggali peran aktor negara dalam pemilikan dan penguasaan tanah oleh warga terutama warga di pemukiman kumuh.

#### **2.4 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau realitas, dengan demikian penelitian akan berisi kutipan-kutipan data baik dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotipe, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Pertanyaan dengan kata tanya “mengapa, “alasan apa” dan “bagaimana” akan dimanfaatkan dalam penelitian ini (Moleong, 2006:11).

---

<sup>5</sup> Harian Umum Pelita, 31 Maret 2008, *Air Laut Pasang Disertai Angin Kencang Puluhan Rumah dan Tambak Ikan di Marunda Kebanjiran*.

### **BAB 3**

## **MARUNDA: LINGKUNGAN ALAM, MASYRAKAT, DAN PERKEMBANGANNYA**

Penguasaan tanah harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak begitu saja terbentuk di kalangan petani tambak di Marunda, tetapi bagian dari pranata penguasaan tanah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur hak-hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah. Pranata penguasaan tanah ini kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur petani tambak dalam menguasai tanah, mengatur siapa saja yang boleh memanfaatkan tanah dan siapa yang tidak boleh memanfaatkan. Dalam proses terbentuknya pranata ini lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik ikut mempengaruhi terbentuknya pranata penguasaan tanah.

Gambaran yang jelas mengenai lokasi penelitian amat signifikan untuk dijabarkan sebagai konteks dalam penelitian ini. Dari penjabaran ini, suatu lokasi penelitian tidak hanya terpaku pada batasan teritori, tetapi mencakup hal-hal yang memungkinkan suatu fenomena muncul. Penjabaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai lokasi penelitian sehingga dapat dipahami proses terbentuknya pranata penguasaan tanah. Demikian pentingnya gambaran mengenai lokasi penelitian dalam penelitian etnografi, peneliti harus menjelaskan dengan rinci mengenai lokasi penelitian tempat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, sebelum memaparkan pranata penguasaan tanah, penjabaran mengenai Marunda itu sendiri menjadi penting untuk dipaparkan dalam skripsi ini

### **3.1 Profil Kelurahan Marunda**

Marunda merupakan kelurahan di Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur; Laut Jawa di sebelah Utara; Kelurahan Sukapura dan Rorotan di sebelah selatan; dan Kelurahan Cilincing di sebelah barat (Laporan bulanan Kelurahan Marunda, September 2010).

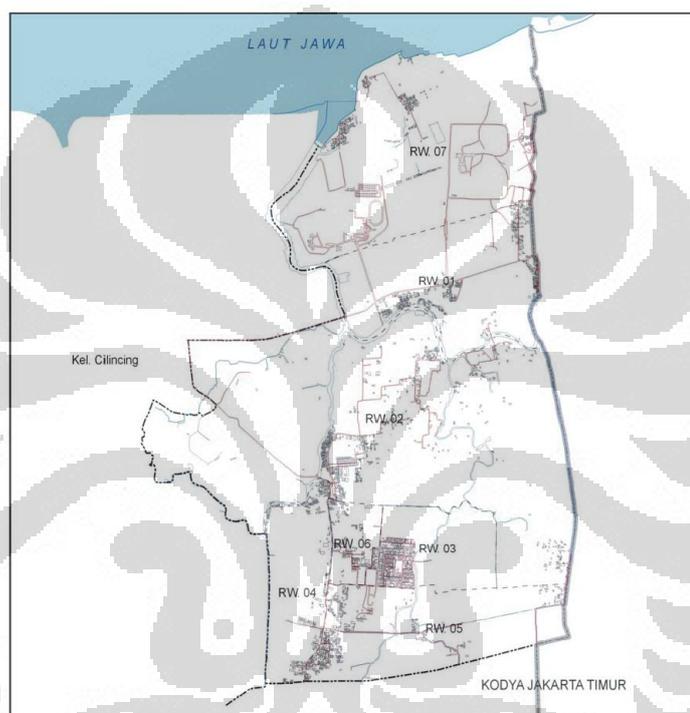


Gambar 1. Peta DKI Jakarta

Secara administratif Kelurahan Marunda merupakan bagian dari Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kelurahan Marunda menjadi bagian dari Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sejak akhir tahun 1975 bergabung dengan keempat kelurahan lainnya yakni Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Semper, dan Sukapura. Keempat kelurahan ini sudah lebih dahulu berada di bawah Kecamatan Cilincing. Awal mula terbentuknya Kelurahan Marunda karena adanya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 1975 tanggal 20 Desember 1975 mengenai penghapusan status daerah otonom, pembentukan, pengembangan, dan perubahan batas wilayah DKI Jakarta Raya dalam rangka pemekaran wilayah ibu kota tersebut (Swasono, 1991:117). Dengan adanya peraturan ini Kelurahan Marunda secara resmi masuk wilayah Daerah Ibu Kota Jakarta setelah sebelumnya wilayah Kelurahan Marunda merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi di Jawa Barat.

Pada awal pembentukannya Kelurahan Marunda semula hanya terdiri dari dua Rukun Warga (RW). Kemudian dibentuk pemukiman baru yakni Kampung Marunda Baru atau disebut juga Sarang Bango. Dengan adanya pemukiman baru

yang disediakan pemerintah di Marunda Baru, maka kampung tersebut kemudian dijadikan RW 03 Kelurahan Marunda. Karena pembangunannya memang direncanakan, maka pada Kampung Marunda Baru atau Sarang Bango ini, rumah-rumah dibangun dalam bentuk kavling-kavling dengan penataan rapi dan juga mengikuti pola perencanaan tata kota. Di samping itu, kavling-kavling itu dibuatkan sertifikat tanah melalui Prona (Swasono, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa Marunda merupakan bagian dari perencanaan tata kota.



Gambar 2. Peta Kelurahan Marunda

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pertanahan dan Pemetaan, 2010

Dalam perkembangannya yang terakhir yakni pada tahun 2011, Kelurahan Marunda dibagi menjadi 9 Rukun Warga dengan 81 Rukun Tetangga. Dari 9 RW tersebut terdapat satu RW yang merupakan kompleks pendidikan yaitu RW 08 yang khusus mengurus warga atau lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang terdiri dari dua RT, sedangkan 8 RW lainnya merupakan perkampungan biasa yang dikenal dengan Sungai Tirem, Bambu Kuning, Marunda Baru, Marunda Pulo, Marunda Besar, Marunda Kongsi, dan Bidara (Laporan Bulanan Kelurahan Marunda, September 2011).

Cara yang efektif menuju Kelurahan Marunda adalah melewati jalan darat yang dapat ditempuh menggunakan sepeda motor, mobil, atau bis. Sejumlah armada angkutan umum di daerah ini telah tersedia cukup baik sehingga memudahkan untuk menuju Marunda dengan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum ini didukung dengan adanya terminal Tanjung Priok dan stasiun kereta api Tanjung Priok. Dalam pengalaman saya, terminal Tanjung Priok hampir selalu ramai. Para penumpang hilir mudik di terminal ini dengan intensitas tinggi. Keramaian ini seringkali terjadi pada pagi hari dan sore hari menjelang malam hari. Berdasarkan data Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat bahwa pada tahun 2008 arus penumpang dalam kota yang tercatat di terminal Tanjung Priok menunjukkan angka 819 orang penumpang perhari. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 712 orang penumpang perhari. Jumlah penumpang ini diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengingat di kawasan Jakarta Utara sedang marak pembangunan lokasi industri (Sudin Perhubungan Kota Adm. Jakarta Utara, 2009). Peningkatan arus penumpang ini juga tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana lalu lintas yang ikut berperan dalam peningkatan jumlah arus penumpang di kawasan ini.

Berdasarkan data Sudin Perhubungan DKI Jakarta Utara tahun 2009, di Jakarta Utara terdapat sarana prasarana lalu lintas dan pelayanan angkutan umum yang meliputi terminal bus sebanyak 2 buah, halte bus sebanyak 396 buah, lampu lalu lintas dengan komputer sebanyak 11 buah, lampu lalu lintas tanpa komputer sebanyak 16 buah, rambu sebanyak 2.650 buah, bus antar kota sebanyak 140 buah, bus kota sebanyak 166 buah, mikro bus, sebanyak 222 buah, mikrolet sebanyak 295 buah, dan KWK sebanyak 356 buah. Pada tahun 2010 telah dibuka shelter busway koridor X jurusan Cililitan-Tanjung Priok. Keberadaan busway ini menambah daftar jenis angkutan umum yang masuk ke terminal ini sehingga penumpang memiliki berbagai alternatif pilihan di saat tingginya arus mobilisasi yang terjadi di kawasan Jakarta Utara.

Bagi saya, perjalanan menuju Marunda lebih menyenangkan menggunakan mobil atau jasa angkutan umum metromini dibandingkan sepeda motor. Pertimbangannya karena jalur Tanjung Priok menuju Cilincing selalu

ramai dilewati truk-truk besar yang mengangkut peti kemas dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok. Ditambah lagi di sepanjang jalan ini masih sering dijumpai kondisi jalan berlubang, baik berukuran kecil maupun besar, sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan terutama kecelakaan sepeda motor. Hal ini juga diakui warga sekitar yang sering melewati jalur ini bahwa jalur yang dikenal dengan sebutan jalur tengkorak ini memang rawan kecelakaan dan hampir setiap tahunnya jalur ini memakan korban jiwa.

Untuk mencapai Kelurahan Marunda dari Kampus UI Depok, saya menggunakan rute perjalanan menggunakan bis PATAS dari terminal Depok menuju terminal Tanjung Priok.. Setibanya di terminal Tanjung Priok, saya naik metromini 23 jurusan Tanjung Priok-Cilincing. Biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa metromini 23 sebesar Rp. 2.000,00. Saya berhenti diujung trayek ini yakni di Cilincing tepatnya di depan swalayan Lestari dekat kantor Kecamatan Cilincing. Di Lestari ini, saya menggunakan jasa angkutan umum KWK 02 jurusan Cilincing-Marunda dengan biaya angkutan sebesar Rp. 3.000,00 menuju lokasi penelitian yang letaknya di Sungai Tirem. Patokan untuk berhenti yakni di depan sekretariat RW 04. Untuk mencapai Sungai Tirem dari Lestari memang tidak ada pilihan alternatif angkutan murah lainnya selain KWK 02. Ada jasa angkutan lainnya yakni jasa ojek, namun harganya relatif mahal yakni Rp.10.000,00 sampai Rp. 15.000,00.

Angkutan KWK 02 merupakan satu-satunya angkutan umum yang menghubungkan Cilincing dengan kawasan-kawasan lainnya yang berada di Marunda. Ketika menggunakan angkutan ini pada siang hari, saya harus lebih bersabar karena angkutan ini sering *ngetem* lama di Lestari. Hal ini disebabkan penumpang yang menuju Marunda relatif jarang pada siang hari. Jumlah penumpang yang menuju kawasan Marunda akan ramai ketika sore hari ketika warganya yang bekerja di pusat kota dan sekitarnya pulang ke rumah mereka. Terbatasnya jumlah penumpang ini menyebabkan angkutan KWK 02 selalu mengangkut muatan penumpang melebihi kapasitas ketika mengantarkan penumpang ke kawasan Marunda. Hal ini persis dialami ketika saya menggunakan angkutan KWK 02 menuju lokasi penelitian yang letaknya di kawasan Marunda.

Menurut aturan dari Dinas Perhubungan yang tertera di badan mobil KWK 02, jumlah ideal yang boleh dimuati oleh satu angkutan KWK adalah 12 penumpang termasuk supir. Akan tetapi, pada kenyataannya aturan ini jarang sekali ditaati karena supir mempunyai aturannya sendiri dan aturan ini yang berlaku setiap harinya dalam KWK 02. Aturan ini yaitu 2 penumpang dan 1 orang supir di bangku depan, 4 penumpang di bangku belakang sebelah kiri, 6 penumpang di bangku belakang sebelah kanan, 2 orang duduk dibangku tambahan di dekat pintu, dan terakhir 2 orang bergayut di pintu KWK 02 sehingga genap 17 penumpang dalam satu kali perjalanan trayek KWK 02 menuju Marunda. Inilah keadaan normal yang biasa dialami penumpang KWK 02 ketika hendak menuju kawasan Marunda.

Imbas dari kondisi angkutan KWK 02 yang selalu penuh dengan muatan penumpang yang melebihi kapasitas yakni tidak ada ruang sisa bagi kaki penumpang untuk bergerak. Selain itu, suasana di dalam angkutan yang penuh dan sesak menyebabkan jendela-jendela angkutan dibuka selebar mungkin agar udara dari luar bisa mengisi asupan udara di dalam angkutan. Alih-alih mendapat udara segar, udara yang masuk malah udara yang bercampur dengan bau amis dan bau limbah yang berasal dari tempat-tempat kumuh di tepi sungai yang bermuara ke laut. Hal ini menggenapkan situasi yang serba sulit untuk menghirup udara segar ketika menggunakan angkutan ini. Di pihak supir, mengangkut muatan yang melebihi kapasitas dianggap sebagai strategi hidup mereka. Alasan mengejar setoran acapkali dilontarkan supir ketika ditanya mengapa angkutan KWK ini harus dipadatkan tanpa menyisakan ruang gerak. Pada kenyataannya, keadaan ini mau tidak mau harus diterima oleh penumpang karena mereka tidak punya alternatif angkutan murah lainnya untuk mencapai kawasan Marunda.

### **3.2 Topografis Kelurahan Marunda**

Secara topografis Kelurahan Marunda merupakan dataran rendah dengan luas tanah seluas 746.304 hektar dengan titik koordinat berada pada koordinat  $6^{\circ} 8^{\circ}$  LS dan  $106^{\circ} 48^{\circ}$  BT. Sebagian besar Kelurahan Marunda terdiri dari tanah daratan hasil dari pengurukan rawa-rawa yang mempunyai ketinggian rata-rata 0 sampai dengan 1 meter di atas permukaan laut terutama di sepanjang pantai utara

Jakarta. Luas ini tiap tahun makin berkurang dengan adanya abrasi laut yang terjadi dengan pesat. Abrasi laut ini menyebabkan penyusutan pantai di sebelah utara Kelurahan Marunda (Profil Kelurahan Marunda, 2009).

Marunda yang masuk dalam wilayah Jakarta Utara beriklim panas, suhu udara sepanjang tahun sekitar  $24^{\circ}$ - $32^{\circ}$ , karena letaknya di daerah Katulistiwa sehingga wilayah Jakarta Utara termasuk Marunda dipenuhi angin Muson Timur terjadi bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan November sampai dengan April. Lapisan tanah yang berbentuk daratan Jakarta adalah batuan endapan (*sediment stone*) yang berasal dari Zaman Ploitocene, yang berada 50 m di bawah permukaan tanah sekarang ini. Karena batumannya hasil pengendapan maka sifat batumannya tersebut tidak padat (*compact*) tetapi porous (*permeable*) sehingga air tanahnya terpengaruhi oleh air laut (Profil Kota Administrasi Jakarta Utara, 2009).

Kelurahan Marunda mempunyai beberapa potensi wilayah yang dapat dikembangkan. Potensi ini meliputi Rumah Tua si Pitung berlokasi di kawasan pesisir dan pantai Marunda yang berpotensi untuk pengembangan kawasan pariwisata rakyat. Ruang terbuka hijau atau lahan kosong di kelurahan ini masih luas diharapkan dapat dibangun berbagai sarana dan prasarana umum seperti Rumah Sakit, terminal, rumah susun dan pusat perbelanjaan. Adanya lokasi KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Industrial Estate dari PT. Bogasari diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Berdasarkan data Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara tahun 2009 Marunda menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi peternakan, perikanan, dan kelautan. Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kelurahan Marunda yakni budidaya tambak. Potensi pengembangan budidaya tambak ini didukung dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah kelurahan Kalibaru dan Cilincing yang lokasinya dekat dengan Kelurahan Marunda. Keberadaan TPI ini diharapkan mampu menjadi sarana pemasaran hasil budidaya tambak sehingga dapat mensuplai hasil budidaya tambak terutama udang dan bandeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya.

### 3.3 Kondisi Kependudukan di Kelurahan Marunda

Penduduk Jakarta Utara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil laporan Sulin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, jumlah penduduk Jakarta Utara pada tahun 2007 mencapai 1.197.970 jiwa. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan sehingga menjadi 1.201.431 jiwa dan 1.201.983 jiwa pada tahun 2009. Jumlah penduduk di Jakarta Utara selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh adanya migrasi masuk dan migrasi keluar.

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Jakarta Utara, 2007-2009

Uraian	2007	2008	2009
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.197.970	1.201.431	1.201.983
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	146.66	146.66	146.66
Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	8.168	8.192	8.196
Pertumbuhan penduduk (%)		0,29	0,05

Sumber: Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, 2007-2009

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jakarta Utara tercatat sebanyak 1.645.312 jiwa, yang terdiri atas 824.159 laki-laki dan 821.153 perempuan. Sekitar 81,51 persen penduduk tersebut tersebar di empat kecamatan, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Tanjung Priok sebesar 22,80 persen, kemudian diikuti Kecamatan Cilincing sebesar 22,57 persen, Kecamatan Penjaringan sebesar 18,62 persen, dan Kecamatan Koja sebesar 17,52 persen. Sedangkan Kecamatan Pademangan dan Kelapa Gading sebaran penduduknya berada di bawah 10 persen. Dengan luas wilayah yang mencapai 146,66 km<sup>2</sup> maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Jakarta Utara adalah sebanyak 11.219 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Koja sebesar 23.529 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Penjaringan sebesar 6.748 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS Jakarta Utara, 2010)

Tabel 3. Hasil Sensus Penduduk 2010

## Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan	Penduduk			
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
Penjaringan	152.584	153.767	306.351	99
Pademangan	76.962	72.634	149.596	106
Tanjung Priok	189.757	185.438	375.195	102
Koja	146.761	141.465	288.226	104
Kelapa Gading	73.103	81.465	154.568	90
Cilincing	184.992	186.384	371.376	99
Jakarta Utara	<b>824.159</b>	<b>821.153</b>	<b>1.645.312</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, 2010

Laju pertumbuhan penduduk Jakarta Utara per tahun selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing masing-masing sebesar 1,99 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Kelapa Gading sebesar 0,33 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Pademangan dan Koja besarnya hampir sama, yaitu sebesar 1,66 persen dan 1,54 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tanjung Priok sebesar 1,03 persen

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Marunda yakni 5.708 KK dengan jumlah penduduk mencapai 20.414 (Laporan bulanan Kelurahan Marunda, September 2011). Perincian mengenai jumlah penduduk Marunda tiap RW akan terlihat sebagai berikut.

Jumlah penduduk yang dikemukakan di sini adalah yang sesuai dengan laporan bulanan Kelurahan Marunda bulan September tahun 2011. Informasi mengenai jumlah penduduk ini digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk di wilayah Marunda. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah RW 03 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.840 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di wilayah RW 08 yang merupakan

wilayah yang khusus dijadikan tempat pendidikan STIP dengan jumlah penduduk sebanyak 524 jiwa.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Marunda di Tiap RW  
(data sampai akhir September 2011)

No.	RW	WNI		WNA		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	01	1.329	1.273	-	-	2.602
2	02	1.742	1.331	-	-	3.073
3	03	1.933	1.907	-	-	3.840
4	04	1.321	1.198	-	-	2.519
5	05	1.451	1.153	-	-	2.604
6	06	956	1.027	-	-	1.983
7	07	1.165	1.032	-	-	2.197
8	08	330	194	-	-	524
9	09	587	485	-	-	1.072
Jumlah		10.814	9.600	-	-	20.414

Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Marunda, September 2011

Tempat tinggal atau pemukiman penduduk Marunda terbagi menjadi tiga jenis bangunan yang terdiri dari jenis bangunan permanen, semi permanen, dan darurat. Jenis bangunan ini tersebar ke berbagai wilayah atau kampung yang berada di Marunda. Dari jenis bangunan ini dapat diukur tingkat perekonomian penduduk Marunda.

Jenis bangunan yang masuk kategori Permanen dapat dilihat dari jenis bahan bangunan yang digunakan, yaitu tembok batu (bata atau batako) yang menutupi seluruh dinding rumah, atap genting, lantai semen atau ubin dan jendela berkaca. Daun pintu terbuat dari bahan kayu, umumnya diberi kaca. Jenis bangunan semi permanen biasanya hanya mempunyai dinding yang separuh tembok (bata atau batako) tingginya kira-kira satu hingga satu setengah meter dan sisanya terbuat dari bahan anyaman bambu, mempunyai atap genting tanpa langit-langit (plafon) dan berlantai semen atau tanah. Sedangkan jenis bangunan darurat

biasanya terbuat dari bahan bambu dan kayu untuk dinding dan tiang-tiangnya, atap genting tanpa langit-langit, mempunyai jendela dengan daun jendela kayu serta berlantai tanah. Rumah-rumah tertentu bahkan beratapkan rumbia. (Swasono, 1991:129). Data mengenai rincian jenis bangunan penduduk Marunda sampai dengan bulan September 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah dan Jenis Bangunan Rumah  
Penduduk Marunda

No.	Jenis Bangunan	Jumlah
1	Permanen	3.041
2	Semi Permanen	1.225
3	Darurat	801
Jumlah		5.067

Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Marunda Bulan September 2011

Data mengenai jenis bangunan tidak hanya dijadikan ukuran tingkat perekonomian penduduk Marunda, jenis bangunan ini dapat juga sebagai informasi mengenai kepemilikan tanah penduduk Marunda. Menurut salah satu penuturan informan, rumah-rumah darurat pada umumnya tampak di sekitar empang-empang dan tepi laut. Rumah jenis ini memang dikondisikan dalam keadaan darurat supaya lebih mudah dipindahkan apabila terjadi abrasi laut. Ketika abrasi, penduduk pada umumnya memindahkan rumah darurat ini lebih ke pedalaman Marunda. Sedangkan ketika dalam kondisi normal atau tidak abrasi, mereka akan membangun kembali rumahnya di tepi laut. Alasan membangun rumah di dekat tepi laut untuk memudahkan jarak mereka dengan tempat bekerja mereka sebagai nelayan. Begitu juga halnya jenis rumah yang dibangun di sekitar empang supaya memudahkan perawatan dan penjagaan budidaya tambak. Cerita Pak Kasman dapat menggambarkan fenomena pembangunan rumah penduduk Marunda.

Pak Kasman adalah salah satu petani tambak yang memiliki lahan tambak di dekat Banjir Kanal Timur (BKT). Lokasi tambak yang jauh dengan rumah aslinya yang terletak di Sungai Tirem “memaksa” Pak Kasman untuk membangun

rumah seadanya di dekat tambaknya tersebut. Rumah Pak Kasman terbuat dari sisa-sisa kayu pembangunan rumah, beratapkan seng, dan berlantaikan tanah. Pak Kasman tinggal di tempat ini bersama isterinya. Di rumah ini tidak ada aliran listrik. Untuk keperluan mandi dan mencuci, Pak Kasman bersama isteri harus berjalan menuju pemukiman penduduk yang letaknya lebih kurang 500 meter. Ketika ditanya mengapa bersedia tinggal di tempat ini, Pak Kasman hanya mampu menjawab ini sebagai tuntutan pekerjaan yang harus dia jalani. Cerita ini menjadi gambaran kecil pekerjaan penduduk Marunda.

Penduduk Marunda mempunyai berbagai jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan penduduk Marunda dapat digolongkan ke dalam dua kategori yakni pekerjaan yang dilakukan disekitar lingkungan Kelurahan Marunda dan pekerjaan di luar lingkungan Marunda seperti di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Pekerjaan yang dilakukan di sekitar Kelurahan Marunda meliputi pekerjaan sebagai nelayan, petani tambak, pedagang ikan dan hasil laut lainnya seperti udang dan kerang, penjual kerang, pengasin dan pedagang ikan eceran, tengkulak ikan, pedagang warung, tukang ojek, supir angkot, dan penjaga keamanan wilayah kampung. Ada juga penduduk Marunda yang bekerja di pabrik dan pemerintahan setempat yang berlokasi di Kelurahan Marunda.

Pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan yang dilakukan di luar lingkungan Marunda meliputi buruh di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya, buruh pabrik, buruh bangunan, penjaga malam/keamanan pabrik, pegawai swasta dan anggota TNI, supir bis dan supir angkot. Akses transportasi yang memadai memungkinkan penduduk Marunda untuk bekerja di luar lingkungan Kelurahan Marunda dan masih tinggal di wilayah Kelurahan Marunda. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Marunda menurut pekerjaannya.

Sejumlah penduduk Marunda menyatakan pandangan bahwa lingkungan hidup mereka yang pada dasarnya memberikan kesusahan lahir dan batin. Namun, mereka masih mampu bertahan dengan menggantungkan hidup kepada alam dalam hal ini darat dan laut. Hasil laut yang dahulu sangat diandalkan oleh sejumlah penduduk Marunda, kini mulai beralih ke darat. Biaya yang dikeluarkan untuk melaut relatif tinggi dan selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan

nelayan harus mencari tempat yang jauh dari pantai karena arus lintas laut dan meningkatnya polusi di daerah pantai. Faktor pencemaran air limbah yang masuk ke laut menjadi alasan yang sering dilontarkan beberapa informan yang saya temui. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk yang dahulunya mengandalkan hasil laut kini mulai melirik ke potensi darat. Salah satu yang menjadi perhatian mereka yakni budidaya tambak.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tani	1.370	2.129	3.499
2.	Karyawan Swasta/Pemerintah/TNI	4.757	4.137	8.894
3.	Pedagang	1.006	1.354	2.360
4.	Nelayan	541	-	541
5.	Buruh Tani	512	151	663
6.	Pensiunan	507	126	633
7.	Pertukangan	250	-	250
8.	Pengangguran	338	-	338
9.	Fakir Miskin	-	-	-
10.	Lain-lain	1.533	1.703	3.236
Jumlah		10.814	9.600	20.414

Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Marunda Bulan September 2011

Menurut Pak Atilah, seorang informan penelitian saya, dia berpindah profesi menjadi petani tambak karena ongkos yang dikeluarkan untuk melaut sudah tidak sebanding dengan apa yang dia peroleh. Ia pun beralih ke tambak karena melihat teman-temannya berpindah profesi menjadi petani tambak. Hal ini didukung dengan bantuan temannya yang memperkenalkan usaha budidaya tambak kepadanya. Dengan bantuan modal dan lahan tambak, Pak Atilah mulai menggeluti usaha tambak sampai saat ini.

Jenis pekerjaan penduduk Marunda tidak terlepas dari keterampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Marunda. Berdasarkan data dari Kelurahan Marunda tahun 2011 tercatat bahwa jumlah penduduk yang tidak sekolah memuncaki daftar jumlah penduduk menurut pendidikan dengan jumlah penduduk mencapai 5.267 penduduk yang tidak sekolah. Rincian mengenai data ini dapat dilihat sebagai berikut.

Dari tabel berikut ini terlihat bahwa jumlah penduduk tidak sekolah merupakan jumlah tertinggi di Marunda. Jumlah penduduk tidak sekolah di Marunda paling banyak berjenis kelamin perempuan. Kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi sejumlah penduduk Marunda masih rendah. Sejumlah penduduk masih ada yang merasa pendidikan tidak perlu untuk mereka. Hal ini disebabkan sebagian dari mereka terdiri dari nelayan dan petani tambak, buruh, dan pedagang kecil. Bagi mereka pendidikan formal tidak begitu dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Selain itu, keterbatasan dana yang mereka miliki untuk pendidikan dinilai menjadi penyebab lainnya yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan  
(data sampai akhir September 2011)

No.	Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tidak Sekolah	2.485	2.782	5.267
2.	Tidak Tamat SD	2.334	2.726	5.060
3.	Tamat SD	1.817	1.428	3.245
4.	Tamat SMP	1.848	1.164	3.012
5.	Tamat SMA	2.062	1.295	3.357
6.	Tamat Akademi/PT	268	205	473
Jumlah		10.814	9.600	20.414

Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Marunda, September 2011

Perhatian pemerintah terhadap kemajuan pendidikan di Marunda masih dinilai rendah. Walaupun pada kenyataannya pemerintah telah menaruh perhatian

melalui penyediaan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang cukup memadai, tetapi keberadaannya atau lokasinya kurang menyebar di setiap RW sehingga ada RW yang cukup jauh dengan sarana pendidikan tersebut yaitu RW 01 dan RW 02. Selain fasilitas Sekolah Dasar, di Kelurahan Marunda terdapat fasilitas pendidikan lainnya yakni terdapat 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari 2 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta. Terdapat juga 5 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang salah satunya adalah SMK Negeri 49. Sedangkan sarana pendidikan Perguruan Tinggi (PT) yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan Akademi Djadajat.

Di Marunda, sebagian besar penduduknya beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Namun, data mengenai rincian penduduk menurut agama tidak saya dapatkan, kecuali data mengenai sarana peribadatan. Berdasarkan data laporan bulanan sampai akhir September 2011 di Kelurahan Marunda hanya ada data tiga jenis tempat peribadatan yakni 8 Masjid, 20 Mushola, dan 1 gereja.

Tabel 8. Jumlah Gedung Sekolah, Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kelurahan Marunda  
(data sampai akhir September 2011)

No.	Tingkat Pendidikan	Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	SD	6	7	1.943	46
2.	SMP	3	3	1.530	107
3.	SMA	5	5	1.991	145
Jumlah		14	15	5.464	298

Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Marunda Bulan September 2011

Akhir-akhir ini perkembangan praktek keagamaan dan pembinaan agama Islam terlihat aktif di daerah ini. Salah satu indikasi yang memperlihatkan peningkatan keseriusan penduduk dalam beragama terlihat dari pertumbuhan jumlah Masjid dan Mushola. Selain itu, di wilayah Marunda ini sering diadakan acara Tabligh Akbar dan Majelis Taklim ceramah umum agama Islam yang

didukung oleh para habib yang berasal dari lingkungan Marunda maupun yang berasal dari luar lingkungan Marunda. Pusat kegiatan keagamaan ini sering diadakan di Pondok Pesantren yatim piatu yang lokasinya berdekatan dengan kantor Kelurahan Marunda.

Perkembangan kegiatan keagamaan tidak hanya berlangsung di Majelis Taklim, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok tambak di daerah ini yakni oleh kelompok Bina Marunda Windu (BMW). Ketua kelompok BMW yang juga seorang Ustadz aktif mengajak para anggotanya untuk turut serta dalam kegiatan keagamaan yang dibuat kelompok seperti pengajian. Pengajian dilakukan rutin setiap minggunya. Pilihan hari Kamis atau malam Jumat menjadi waktu yang digunakan untuk mengadakan pengajian pembacaan surat Yasin. Untuk lokasi berlangsungnya kegiatan pengajian dilakukan secara bergiliran di rumah anggota kelompok. Setiap anggota mendapatkan kesempatan rumahnya digunakan untuk tempat pengajian. Menurut penuturan Pak Taufik selaku ketua kelompok tambak BMW, kegiatan keagamaan seperti pengajian ini dinilai positif untuk mengajarkan moral kepada semua anggotanya.

### **3.4 Sejarah Marunda: Dulu Pernah Menjadi Daerah Pelabuhan yang Ramai**

Dari aspek sejarah, Marunda memang sejak semula merupakan pangkalan untuk menunda kapal dan muatan. Kata “Marunda” sendiri diambil dari kata “menunda” atau “tunda” yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya “taruh” atau “simpan”. Jika diartikan, Marunda adalah tempat menimbun barang atau muatan kapal maupun persinggahan kapal berlabuh. Demikian kurang lebih asal mula nama Marunda yang dikenal hingga kini (Adrian, 1988).

Perkembangan wilayah Marunda mulai berkembang di kawasan Marunda yang terletak di sebelah timur pesisir Jakarta. Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan pesisir ini merupakan sebuah pemukiman nelayan di mana masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidup dari kegiatan menangkap ikan. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi desa pantai yang mayoritas penduduknya hidup sebagai nelayan.

Ketergantungan penduduk pesisir Marunda terhadap ekosistem pantai menyebabkan kegiatan pelelangan dan pendaratan ikan sangat tinggi. Hampir

setiap hari kegiatan pendaratan ikan terlihat di kawasan pesisir Marunda ini. Menurut penuturan Atilah salah seorang informan penelitian ini, kegiatan mencari ikan di pantai memang telah menjadi kegiatan utama masyarakat Marunda. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pendaratan ikan tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga warga sekitar baik ibu-ibu maupun anak-anak ikut meraup keuntungan dengan adanya kegiatan pendaratan ikan ini. Ibu-ibu berjualan di dekat tempat pelelangan ikan. Sedangkan anak-anak ikut mengumpulkan ikan-ikan sisa yang tidak terangkut di tempat pendaratan ikan ini.

Kegiatan pendaratan ikan semakin berkembang di Marunda. Hal ini terlihat dengan muncul juragan-juragan ikan di tempat pendaratan ikan ini. Para juragan ikan ini mempunyai perahu penangkapan ikan serta bagan ikan di Teluk Jakarta. Hasil tangkapan ikan mereka yang cukup berlimpah didaratkan di Marunda sehingga pertumbuhan kegiatan pendaratan ikan semakin tinggi sekaligus berkembangnya pasar jual beli ikan di kawasan Marunda. Sejak tahun 1950-an kegiatan pendaratan ikan yang terjadi di pantai Marunda tersebut dikoordinir oleh Pemerintah RI melalui Direktorat Perikanan Kementerian Pertanian<sup>6</sup> dan dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Marunda..

Keberadaan pelabuhan ikan Marunda berakhir setelah dikeluarkannya SK Gubernur DKI No. 268. Tahun 1977 tertanggal 6 Mei 1977 tentang Penutupan lokasi pendaratan ikan, pelelangan ikan dan bongkar muat ikan di pelabuhan ikan Marunda. Penutupan tempat pendaratan ikan ini dilakukan berselang sekitar 2 tahun setelah Marunda masuk ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1975., dan semua kegiatannya dipindahkan ke Muara Angke secara bertahap. Dengan penutupan tersebut aktivitas pelabuhan ikan di Marunda secara bertahap menurun. Walaupun tempat pelelangan ikan di tempat ini sudah ditutup, sejumlah warga masih menggunakan tempat ini untuk pendaratan ikan yang sifatnya tidak resmi karena lokasi pelabuhan ikan Marunda adalah lokasi pemukiman nelayan (*www.jakarta.go.id*)

Penutupan pelabuhan pendaratan ikan benar-benar berakhir setelah adanya proyek pembangunan pelabuhan kayu Marunda atau yang disebut dengan proyek

---

<sup>6</sup> Sumber data: <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/1842> diunduh pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul 10.15. Judul Artikel *Marunda, Pelabuhan*. Jakarta.go.id Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta.

Pusat Perkayuan Marunda (PPM). Pelabuhan ini dibangun dalam rangka mendukung kegiatan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) II Marunda atau sering dikenal dengan *Bonded Economy Zona* Nusantara Marunda. Untuk hal tersebut pelabuhan ini disebut dengan nama Pusat Perkayuan Marunda (PPM). Status pelabuhannya adalah pelabuhan khusus. Proyek yang berlangsung pada tahun 1987 ini menyebabkan kegiatan pelelangan yang sifatnya tidak resmi sekalipun berakhir (Swasono, 1991). Pemukiman nelayan dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah ke lokasi-lokasi Marunda yang lebih pedalaman. Penduduk yang sebelumnya bermatapencaharian sebagai nelayan kini mulai mencari pekerjaan lainnya. Namun ada juga yang masih bekerja sebagai nelayan. Penduduk yang masih mempertahankan pekerjaannya sebagai nelayan membangun rumah-rumah sementara di sekitar pesisir Marunda. Rumah-rumah sementara ini dibangun dengan pertimbangan jika sewaktu-waktu terjadi penggusuran, mereka tidak memperoleh kerugian yang besar. Namun, rumah-rumah ini mempunyai resiko cukup besar terkena badai. Tercatat 30 rumah di kawasan pesisir terkena badai pada tahun 2010 (Harian Kompas, 2010).

Kelurahan Marunda terbilang baru dibandingkan dengan keempat kelurahan lainnya. Pada kenyataannya kelurahan ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam hal proyek pembangunan. Kelurahan Marunda menjadi salah satu kelurahan DKI Jakarta yang menerima perubahan yang cepat akibat adanya proyek-proyek pembangunan fisik yang digencarkan sejak tahun 1980-an. Selang lima tahun sejak masuknya Marunda ke wilayah DKI Jakarta telah dibangun terusan besar yang bertujuan untuk menanggulangi banjir yang sering melanda Jakarta. Proyek pembangunan ini dikenal dengan nama Terusan Cakung atau *Cakung Drain*. Pembangunan ini memiliki dua dampak yang berbeda. Di satu sisi pembangunan ini dapat mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta. Namun di sisi lain, sejumlah besar penduduk harus dipindahkan dengan adanya terusan Cakung ini. Penduduk yang dipindahkan diberi pesangon untuk pindah tanpa adanya penyediaan tempat pemukiman baru yang resmi. Hal ini kemudian menjadi permasalahan baru di Marunda terkait dengan tempat tinggal (Swasono, 1991).

Sejak tahun 1981 telah dimulai proyek pembangunan yang lebih besar, yaitu perencanaan pembangunan Pusat Perkayuan Marunda dan pembangunan gudang amunisi milik TNI-AL. Pembangunan kedua proyek ini merupakan proyek jangka panjang dan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, dilakukan penataan lingkungan, yang dikelola oleh Proyek Pembangunan Lingkungan Marunda. Pada tahap berikutnya, berkembang pembangunan Pusat Perkayuan Marunda, yang di antaranya termasuk pembangunan pelabuhan dan pabrik pengolahan kayu yang besar dan kompleks. Sementara itu, di wilayah Marunda lainnya dilakukan pengurukan empang untuk keperluan pembangunan gudang amunisi milik TNI-AL yang baru.

Proyek pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 1980-an menyebabkan sejumlah tanah di wilayah Marunda telah dibebaskan dan sejumlah kampung di Kelurahan tersebut, khususnya Marunda Sawah dan Marunda Kelapa, dipindahkan dan penduduknya diberi tempat pemukiman baru ke lokasi di bagian pedalaman kelurahan yang sama (di bagian tanah darat) dan menempati salah satu bagian kampung yang bernama Sarang Bango. Tempat pemukiman ini kemudian disebut pula sebagai Marunda baru dan menjadi RW 03 Kelurahan Marunda. Pembebasan yang terjadi di wilayah ini disebabkan adanya proyek pembangunan Pusat Perkayuan Marunda (PPM) dan beberapa kepentingan nasional lainnya. Pembebasan tanah ini dilaksanakan secara bertahap dari luas tanah seluruhnya yang meliputi 410 ha. Akan tetapi, karena sebagian areal PPM mencakup wilayah yang semula merupakan Gudang Peluru TNI AL, maka secara bertahap dibebaskan pula tanah seluas sekitar 115 ha untuk dijadikan pengganti gudang peluru yang lama. Tanah yang dibebaskan itu berlokasi di bagian timur kelurahan, dekat dengan perbatasan DKI dengan provinsi Jawa Barat (Swasono, 1991).

Sejak tahun 1986 terjadi pembebasan lahan di beberapa wilayah Marunda ketika proyek pembangunan gencar dilakukan di Marunda. Penduduk Marunda yang tanahnya dibebaskan dengan adanya proyek pembangunan ini menempati wilayah-wilayah baru dengan karakteristik baru. Imbasnya adalah penduduk yang semula menjadi nelayan mulai beralih profesi ke pekerjaan lainnya. Walaupun masih ada penduduk yang bertahan dan menggantung hidup sebagai nelayan di

pesisir Marunda, namun sejumlah penduduk lainnya mulai beralih ke profesi lainnya. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai petani tambak (Adrian, 1988).

Profesi petani tambak mulai berkembang di kawasan Marunda sejak tahun 1980-an. Perkembangan ini didukung dengan adanya beberapa lahan yang masih kosong dan belum digunakan. Penduduk yang menjadi korban penggusuran dan pemindahan menempati wilayah yang dekat dengan lahan kosong. Seperti yang terjadi di daerah Sungai Tiram Marunda. Penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Tiram membuka usaha tambak di atas lahan TNI AL yang belum digunakan. Penduduk diberikan hak garap oleh pihak TNI AL untuk menggarap lahan TNI AL yang masih kosong. Hak garap ini diperoleh melalui suatu kesepakatan antara pihak TNI AL dengan petani tambak. Warga boleh memanfaatkan tanah kosong selama pihak TNI AL belum menggunakannya, namun ketika pihak TNI AL hendak menggunakan lahan tersebut, pihak warga atau petani tambak tidak boleh menuntut ganti rugi.

### **3.5 Jenis Pekerjaan: Antara Mayoritas dan Minoritas menjadi Petani Tambak di Marunda**

Meningkatnya profesi petani tambak tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemunculan tambak di Kelurahan Marunda. Menurut informasi yang diperoleh dari sejumlah informan, profesi petani tambak mulai marak pada dekade 1980-an. Saat itu sejumlah penduduk mulai beralih dari pekerjaan sebelumnya yakni petani padi ke petani tambak. Sebelum dijadikan lahan tambak, tanah di lokasi ini merupakan sawah padi. Sejumlah penduduk bekerja sebagai petani sawah di sekitar wilayah Marunda. Sumber air yang dijadikan irigasi sawah padi ini berasal dari sungai yang terletak di dekat pemukiman.

Produktivitas padi di Marunda mulai menurun sejak dekade 1980-an ketika air yang menjadi saluran irigasi mulai bersifat asin. Sungai yang menjadi harapan petani telah tercampur kandungan air laut yang masuk karena adanya abrasi yang cukup tinggi di wilayah ini. Petani padi tidak mempunyai alternatif lain ketika saluran air irigasi tercampur air yang bersifat asin. Air yang digunakan bersifat asin ini berdampak buruk bagi tanaman padi. Pertumbuhan padi di daerah ini mengalami pertumbuhan yang tidak bagus dan mereduksi produksi padi.

Pertanian padi akhirnya mulai ditinggalkan oleh penduduk yang dinilai sudah tidak lagi dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kualitas dan sifat air sungai sejak tahun 1980-an sudah tidak mendukung pertanian padi. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada perubahan mata pencarian di kalangan penduduk Marunda. Penduduk Marunda mulai mencari alternatif mata pencarian untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Alternatif pilihan pun jatuh kepada pekerjaan sebagai petani tambak yang dinilai lebih cocok untuk kondisi tanah dan kualitas air di wilayah ini.

Pekerjaan sebagai petani tambak muncul karena beberapa faktor. Berdasarkan penuturan sejumlah informan, faktor ekologi dan faktor ekonomi menjadi dua faktor dominan yang menjadi alasan untuk beralih mata pencarian menjadi petani tambak. Faktor ekologi yakni kondisi lingkungan dalam hal ini tanah dan air yang tidak memungkinkan untuk tetap mempertahankan pertanian padi. Jika tetap dipaksakan untuk menanam padi, para petani dihadapkan pada resiko tinggi mendapatkan kerugian. Resiko ini kemudian dihindari oleh petani mengingat keterbatasan modal yang mereka miliki.

Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi perubahan mata pencarian petani tambak yakni faktor ekonomi. Keterbatasan keahlian menjadikan sejumlah penduduk Marunda masih tetap bergantung terhadap potensi yang ada di Marunda. Salah satu potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan yakni budidaya tambak terutama budidaya udang dan ikan bandeng mengingat lokasi tempat tinggal mereka mempunyai potensi untuk budidaya tambak komoditas tersebut. Pemilihan kedua komoditas tersebut dipilih karena secara nilai jual kedua komoditas ini memiliki nilai jual yang tinggi.

Petani tambak di Marunda cukup bervariasi di antaranya merupakan warga asli Marunda dan ada juga warga pendatang yang bermigrasi ke Marunda. Dari sejumlah informan yang saya temui, jumlah petani tambak di Marunda lebih banyak berasal dari warga asli Marunda yang mayoritas suku Betawi. Namun, ada juga yang berasal dari luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi. Bagi warga asli Marunda, pekerjaan sebagai petani tambak merupakan warisan dari generasi sebelumnya yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Hal ini ditunjukkan dari

lahan tambak yang digarap oleh sejumlah petani tambak merupakan tanah garap warisan orang tua. Begitu juga halnya dengan keterampilan dan pengetahuan tentang budidaya tambak. Sejumlah petani tambak mengaku bahwa keterampilan dan pengetahuan tentang budidaya tambak diperoleh secara turun temurun dan belajar sendiri (dari keluarga dan teman).

Gambaran mengenai lokasi penelitian dalam bab ini menunjukkan bahwa petani tambak di Marunda mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sejumlah penduduk di Kelurahan Marunda. Petani tambak dengan pengelolaan yang masih terbilang sederhana tetap menggantungkan hidupnya melalui profesi tambak walaupun berbagai permasalahan seringkali dialami petani tambak. Permasalahan mengenai modal tidak hanya menjadi satu-satunya permasalahan petani tambak. Permasalahan mengenai ketersediaan lahan tambak juga menjadi amat signifikan mengingat lahan yang menopang hidupnya semakin berkurang. Untuk itu menjadi penting untuk melihat gambaran bagaimana pranata penguasaan tanah untuk lahan tambak terbentuk dan terpelihara di kalangan petani tambak.

## **BAB 4**

### **PENGELOLAAN TAMBAK DI MARUNDA**

#### **4.1 Rancang Bangun Tambak Marunda: Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)**

Potensi budidaya tambak ternyata tidak hanya menjadi sorotan penduduk Marunda. Pemerintah setempat pun ikut memperhatikan potensi budidaya tambak yang dimiliki Kelurahan Marunda. Berbagai bentuk perhatianpun disalurkan kepada petani tambak baik program bantuan modal produksi tambak maupun melalui bantuan peningkatan produktivitas tambak.

Berdasarkan data Suku Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara tahun 2011, bahwa potensi lahan budidaya air payau di kota administrasi Jakarta Utara mencapai 486,7 Ha, dengan rincian Kecamatan Penjaringan 154 Ha, dan Kecamatan Cilincing 332,7 Ha. Total produksi budidaya air payau sampai dengan tahun 2010 mencapai 668 ton, masing-masing kecamatan Penjaringan 308 ton dan Kecamatan Cilincing 360 ton, dimana komoditas yang mendominasi adalah bandeng dari total pembudidaya ikan sebanyak 258 yang tersebar di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing. Dari total lahan budidaya tersebut, secara umum kepemilikannya bukan di tangan masyarakat sekitar, namun berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah atau perantara yang dijadikan “perpanjangan-tangan” oleh pemilik tanah.

Dari data yang telah disebutkan di atas jelas terlihat bahwa Jakarta Utara menjadi wilayah potensial untuk dikembangkan budidaya tambak. Selain dapat memasok kebutuhan akan udang dan ikan segar di wilayahnya, hasil budidaya tambak juga dapat memenuhi kebutuhan udang dan ikan di wilayah sekitar Jakarta Utara. Sebagai wujud dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2011 telah mengalokasikan dana penguatan modal melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan budidaya Tahun 2011. Melalui Program ini diharapkan akan dikelola secara efektif dan mampu menopang peningkatan produksi udang dan bandeng.

Untuk memaksimalkan potensi budidaya tambak Marunda, pemerintah Kelurahan Marunda bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara memberikan pemberdayaan kepada petani tambak. Bentuk pemberdayaan ini berupa program peningkatan produksi tambak dan program bantuan modal produksi tambak. Pada tahun 2011 Kota Jakarta Utara mendapat alokasi PUMP sebanyak 3 (tiga) paket atau senilai Rp.300 juta seluruhnya untuk mendukung kegiatan budidaya baik payau maupun budidaya air tawar. Melalui PUMP ke depannya aktivitas budidaya secara total akan didominasi oleh budidaya bandeng. Pilihan tersebut disebabkan budidaya bandeng sangat minim resiko dibanding udang windu yaitu tingkat kelulushidupan mampu mencapai lebih dari 95 persen. Dengan adanya PUMP tentunya diharapkan akan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan anggota kelompok, mendorong diversifikasi produk budidaya Jakarta sebagai basis orientasi pasar bagi komoditas di semua sektor merupakan peluang tersendiri bagi pasar produk hasil perikanan. Oleh karena itu, kegiatan budidaya bandeng yang dilakukan di Marunda, hendaknya dilihat sebagai peluang usaha yang sangat prospektif.

Program dan perencanaan yang telah digencarkan pemerintah dapat menjelaskan bahwa budidaya tambak merupakan sektor signifikan untuk digarap dan dimaksimalkan penduduk Marunda terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Melalui Dinas Perikanan dan Kelautan diharapkan mampu mengembangkan potensi budidaya tambak di Marunda. Melihat kekuatan dan peluang tersebut, maka ke depan perlu ada langkah terobosan yaitu melalui diversifikasi produk budidaya bandeng sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk. Dengan menjadikan bandeng sebagai produk olahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, misalnya pengolahan bandeng duri lunak (presto) ataupun bandeng tanpa duri serta bentuk olahan lainnya. Ada 2 (dua) nilai tambah yang diperoleh: Pertama, dari aspek ekonomi akan memungkinkan adanya peningkatan nilai tambah produk; Kedua, dari aspek sosial akan mampu memberikan peluang tenaga kerja lebih banyak lagi misalnya melalui pemberdayaan para ibu-ibu di sekitar kawasan budidaya.

Konsep ini mendapat sambutan baik dari petani tambak, bahkan suku dinas berencana untuk mengalokasikan anggaran untuk penyediaan peralatan

pengolah. Tahun lalu nampaknya kelompok telah melakukan studi banding ke Kepulauan Seribu untuk melihat prosedur pengolahan bandeng tanpa duri. Ke depan, melalui diversifikasi produk, brand image “Bandeng Marunda” bukan tidak mungkin akan dikenal dan menjadi peluang usaha prospektif yang secara langsung mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal dan masyarakat Marunda khususnya. Ditengah kesenjangan sosial dan ekonomi di pinggiran Jakarta ini, sub sektor budidaya diharapkan menjadi alternatif utama dalam merubah nasib masyarakat pinggiran menjadi lebih baik. Sesuatu yang tidak mustahil untuk dicapai, jika ada kemauan, komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak. Fenomena semakin menurunnya kualitas perairan di sekitar Teluk Jakarta sebagai akibat dari cemaran dari aktivitas sosial, perlu disikapi secara serius dan segera ditindak lanjuti agar tidak berimbas secara langsung terhadap aktivitas perikanan budidaya disekitarnya.

Program dan perencanaan dari Pemerintah setempat masih menunjukkan suatu kebijakan *top-down*. Hal ini terlihat dengan penyaluran bantuan modal produksi tambak yang seringkali disalahgunakan petani tambak di Marunda. Penyalahgunaan dana bantuan ini terjadi karena minimnya pengawasan dan perencanaan yang tidak mudah direalisasikan. Beberapa petani tambak memanfaatkan modal bantuan produksi tambak ini untuk kebutuhan di luar dari produksi tambak. Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana bantuan modal produksi tambak, pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan, Pertanian, dan Kelautan memperketat pengawasan dan lebih meningkatkan peran penyuluh dan pembina yang ditugaskan di lokasi ini. Tidak hanya pengawasan yang lebih ditingkatkan, pemerintah juga lebih mengawasi peran kelompok tambak karena kelompok tambak ini yang menjadi tempat penyaluran dana bantuan modal produksi pertanian untuk disalurkan kepada petani tambak.

#### **4.2 Praktik Budidaya Tambak di Marunda**

Tambak merupakan lahan kegiatan budidaya hewan air payau (misalnya ikan dan udang) yang dipelihara di wilayah pesisir. Istilah umum yang digunakan

oleh petani tambak di Marunda untuk menyebut tambak yakni *empang*<sup>7</sup>. Secara harfiah, pengertian *empang* tidak jauh berbeda dengan istilah tambak yang biasa digunakan pada umumnya yakni sebuah kolam yang terletak di wilayah pesisir yang di dalamnya berisi air payau atau air laut yang digunakan untuk membudidayakan hewan-hewan air payau. Konstruksi tambak dibangun sedemikian rupa agar ia dapat menjadi tempat hidup atau habitat yang mampu mendukung pertumbuhan ikan, udang, dan hewan payau budidaya lainnya.

Perkembangan tambak di Marunda dapat dihubungkan dengan berbagai aspek. Aspek-aspek ini meliputi sejarah hubungannya dengan masyarakat dan pemanfaatan tanah di Marunda; pertimbangan petani tambak dalam memilih pekerjaan sebagai petani tambak; komoditas yang dibudidayakan oleh petani tambak; hubungan sosial atau relasi kekuasaan antar aktor yang terlibat di dalamnya; budaya, ekonomi, dan politik; dan dengan pertumbuhan kependudukan dan ekonomi di wilayah Marunda. Berdasarkan aspek sejarah, tambak di Marunda mulai mengalami peningkatan pada tahun 1980-an. Saat itu terjadi peningkatan jumlah penduduk Marunda yang mulai beralih memanfaatkan tanah yang mereka garap dari yang sebelumnya memanfaatkan tanah untuk pertanian padi sawah menjadi lahan tambak.

Sejumlah penduduk Marunda yang bekerja sebagai petani tambak mengaku sebelum menjadi petani tambak, mereka bekerja sebagai petani padi, nelayan, dan sektor informal seperti pedagang warung. Wilayah Marunda sebelum berkembangnya tambak di lokasi ini memang merupakan lahan pertanian padi sawah. Menurut penuturan salah seorang petani tambak, Pak Sakri, lahan pertanian padi sawah ini meliputi wilayah Gudang Peluru TNI AL, wilayah KBN, dan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi (sebelum Marunda masuk wilayah DKI Jakarta). Pada tahun 1970-an pertanian padi sawah dapat mencukupi kebutuhan hidup sejumlah penduduk Marunda. Penduduk Marunda yang saat itu masih bergantung pada ekosistem pantai dengan ketiga tipe sumber dayanya yaitu laut, sawah, dan tambak yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda pada saat itu. Di dalam

---

<sup>7</sup> Dalam skripsi ini seringkali saya menggunakan istilah tambak dan *empang* secara bergantian. Namun, hal ini bukan berarti terdapat perbedaan di antara keduanya, melainkan menunjuk pada hal yang sama yakni sebuah kolam untuk budidaya hewan air payau.

ekosistem pantai tersebut, kegiatan ekonomi yang mereka lakukan atas dasar pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.

Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian nelayan dan pertanian lahan basah (sawah dan tambak ikan) yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya memperlihatkan ciri-ciri kehidupan pedesaan yang berlangsung di Marunda. Merujuk kepada Suparlan (2004:39), yang membedakan kota dan desa yakni di kota terdapat kegiatan-kegiatan yang kebanyakan tidak bergantung pada pengolahan langsung sumber-sumber daya alam, tetapi sebaliknya lebih banyak dalam bidang jasa dan penggunaan teknologi. Macamnya mata pencaharian lebih banyak dan kompleks dibanding dengan di desa yang relatif homogen. Ciri-ciri lainnya yang dapat dilihat dari aktivitas sejumlah penduduk Marunda yakni dari cara pengelolaannya masih tradisional. Penuturan ini disampaikan oleh Sakri (66 tahun).

“Dulu sebelum adanya proyek-proyek pembangunan, warga di sini masih bergantung sama alam. Ada yang tani, ada yang jadi nelayan, ada juga di tambak. Kalo mau ke mana-mana juga jalan kaki, belum ada kendaraan soalnya. Di sini juga dulunya masih banyak sawah. Ini nih di belakang rumah (Pak Sakri menunjuk ke arah belakang rumahnya yang merupakan tanah-tanah kosong milik TNI AL), dulunya mah sawah semua, sebelum jadi tambak.” (wawancara tanggal 2 Maret 2011).

Ketergantungan sejumlah penduduk Marunda terhadap ekosistem pantai mulai mengalami kendala. Permasalahan mulai mencuat ketika lingkungan tersebut diambil-alih dan diubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM) pada tahun 1980-an. Pusat Perkayuan Marunda (Marunda Wood Centre) adalah realisasi gagasan bersama antara Gubernur DKI Jakarta dengan Direktur Jenderal Kehutanan pada tanggal 9 September 1971 untuk membangun terminal kayu di Jakarta, yang sekaligus dimaksudkan untuk membangun kawasan industri perkayuan di Marunda (Adrian, 1988:103).

Proyek pembangunan PPM ini menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan ini berdampak pada

keseluruhan sistem mata pencaharian mereka yang bergantung pada ekosistem pantai.

Dampak ini tidak hanya dapat dilihat dari berubahnya luas lahan garapan sejumlah petani tambak, tetapi juga berdampak pada nelayan yang menggantungkan penghidupannya di laut. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan perubahan yang terjadi di Marunda, penduduk dituntut untuk mengembangkan upaya untuk menghadapinya terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan lingkungan yang ada setelah perubahan. Upaya yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih oleh sejumlah penduduk Marunda untuk menanggapi perubahan lingkungan tersebut adalah diversifikasi mata pencaharian.

Upaya yang dianggap paling tepat untuk beralih ke pekerjaan lainnya di luar dari ekosistem pantai ternyata tidak menjadi pilihan utama yang dipilih oleh sejumlah penduduk Marunda. Sejumlah penduduk Marunda masih tetap menggantungkan hidupnya ke pekerjaan semula walaupun dengan komposisi yang berbeda antara ketiga sumber daya ekosistem pantai yakni laut, sawah, dan tambak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adrian (1988) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda pada waktu itu yang relatif sangat rendah dan pengetahuan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai dan sekitarnya menyebabkan sebagian besar penduduk Marunda tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya.

Berbagai motif dan pertimbangan ikut mempengaruhi pilihan petani dalam memilih jenis pekerjaan. Berdasarkan penuturan Atilah, salah satu informan saya mengatakan bahwa keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki tidak mampu untuk bekerja di luar dari pertanian lahan basah. Ada sebuah anggapan bahwa pertanian padi sawah dan tambak tidaklah berbeda, keduanya menggarap tanah. Walaupun pembangunan pada tahun 1980-an sudah mulai berlangsung, sepertinya sejumlah petani tambak tidak begitu khawatir mata pencahariannya akan berhenti beroperasi. Selain dari aspek pengetahuan, pertimbangan situasi ikut berperan dalam peralihan mata pencaharin sejumlah

penduduk Marunda. Salah satunya yang dialami oleh nelayan Marunda. Peralihan mata pencaharian terjadi sejak adanya larangan penggunaan alat tangkap *trawl* atau *trawler* (pukat harimau) pada tahun 1980 (DKP, 2009:9).

Petani tambak di Marunda membudidayakan udang dan bandeng secara tradisional. Pengetahuan mengenai budidaya tambak ini diperoleh secara turun-temurun. Alat-alat yang digunakan petani tambak masih peralatan tradisional. Peralatan ini diperoleh dari hasil pembelian atau membuat sendiri. Walaupun masih terbilang tradisional, terdapat langkah-langkah yang harus dilalui dalam budidaya tambak. Langkah-langkah ini meliputi proses pembuatan tambak, proses penyebaran nener dan benur, proses perawatan tambak, proses panen, dan proses pemasaran hasil budidaya tambak.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan tambak adalah menentukan lokasi yang paling memenuhi persyaratan untuk media pemeliharaan budidaya tambak. Pemilihan lokasi tambak ini tidak hanya untuk menentukan kecocokan lahan sebagai media pemeliharaan budidaya tambak, tetapi juga untuk mendukung modifikasi disain tambak, tata letak tambak, pembuatan konstruksi tambak dan manajemen pengelolaan yang akan diterapkan.

Petani tambak di Marunda menentukan lokasi tambak berdasarkan lahan kosong. Mereka tidak mempunyai pilihan yang banyak untuk menentukan lokasi pembuatan tambak. Walaupun lahan kosong di Marunda relatif masih banyak, namun tidak semua berpotensi untuk dijadikan tambak. Faktor pengairan menjadi salah satu pertimbangan petani tambak dalam memilih lahan tambak. Selain itu, faktor perizinan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi yang boleh digarap dan lokasi yang tidak boleh digarap. Dari sejumlah petani tambak yang saya temui, beberapa di antaranya memperoleh lahan tambak dari warisan orang tua. Antari misalnya, dia meneruskan usaha tambak milik ayahnya setelah ayahnya meninggal.

“Lahan tambak yang saya garap ini punya orang tua saya. Sebelum saya ke tambak, orang tua saya yang sudah lebih dulu di tambak. Waktu itu saya kerjanya di pabrik selama tujuh tahun. Cuma karena orang tua meninggal, saya yang nerusin usaha tambak orang tua saya bareng sama kakak saya”. (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Hal yang sama juga dialami oleh Atilah. Atilah tidak terlibat dalam penentuan lokasi pembuatan tambak karena dia hanya meneruskan usaha tambak milik majikannya. Begitu juga halnya dengan petani tambak lainnya yang sebagian besar meneruskan lahan tambak milik petani tambak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani tambak yang ada di Marunda saat ini tidak ikut terlibat dalam penentuan lokasi pembuatan tambak. Hal ini disebabkan sejumlah petani tambak hanya meneruskan lahan tambak milik petani tambak sebelumnya.

Meskipun tidak ikut terlibat dalam pembuatan tambak, petani tambak memiliki suatu pengetahuan mengenai lokasi yang potensial untuk dijadikan lahan tambak. Antari, salah seorang petani tambak, mengatakan bahwa lokasi yang potensial dijadikan lahan tambak yakni lokasi yang dekat dengan irigasi atau sungai. Di lokasi penelitian yang saya teliti sumber air untuk tambak berasal dari Sungai Tirem. Sungai Tirem ini yang mendukung pasokan air untuk pengairan tambak. Sungai Tirem ini pula yang menjadi pembatas antara wilayah tanah milik TNI AL dengan tanah milik swasta atau perorangan.

Sebenarnya tanah kosong milik TNI AL di Marunda masih cukup banyak. Namun, karena lokasinya jauh dari sumber air, petani tambak enggan untuk membuka budidaya tambak di lokasi tersebut. Simak penuturan Antari berikut ini

“Sebenarnya sih tanah sebelah sana yang dekat Gudang Peluru TNI masih banyak yang kosong. Tapi petani ogah buat garap di sana. Dapetin airnya susah, kebanyakan airnya air tawar, jadi ga cocok buat tambak”. (wawancara 17 Maret 2011)

Lokasi tambak yang memang sudah begitu adanya menuntut petani tambak untuk memodifikasi disain tambak miliknya. Di tambah lagi debit air yang seringkali melonjak jika terjadi banjir rob. Disain tambak yang dibuat petani tambak cenderung lebih tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada kemungkinan banjir rob atau meluapnya debit air Sungai Tirem. Dampak meluapnya debit air ini pernah dirasakan oleh Matrozi ketika tambaknya tidak ditinggikan. Ikan dan udang yang dibudidayakan sempat terbawa arus Sungai Tirem. Namun, Matrozi tidak dapat menghitung berapa jumlah kerugian yang dialaminya.

“Dulu pernah kena banjir. Lahan tambak saya meluap. Ikan-ikan sama udang pada ikut kebawa air sungai. Waktu itu saya lupa buat ninggiin tambaknya, biasanya saya tinggiin pake lumpur-lumpur yang ada di dalem tambak.” (wawancara tanggal 22 Februari 2011)

Pengalaman Matrozi adalah sebagian kecil kisah yang dialami oleh petani tambak dalam mengantisipasi perubahan lingkungan terutama banjir rob. Petani tambak mengembangkan strategi untuk menghadapi banjir rob tersebut. Pengalaman arus sungai yang meluap menyebabkan petani tambak terus memantau ketinggian tanggul tambak. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal yang serupa seperti yang dialami oleh Matrozi



Gambar 3. Kegiatan membuat tanggul tambak (Fahrudin,2011)

Menurut Puspita (2005:64), dalam pemilihan lokasi tambak, hal penting yang harus dipertimbangkan adalah faktor ekologis yang meliputi elevasi dan topografi areal pantai, sumber air dan karakteristik pasang surut (kualitas dan kuantitas), sifat fisik dan kimiawi tanah (kesuburan), kondisi vegetasi mangrove, dan keadaan prasarana (jalan atau sungai) untuk mengangkut barang-barang kebutuhan operasional tambak dan pemasaran hasil. Pada tambak-tambak tradisional yang pengairannya sangat tergantung pada karakteristik pasang surut, tambak harus dibangun pada lokasi yang elevasinya terletak di antara air pasang rata-rata dan air surut rata-rata. Dari segi topografi, lahan yang bergelombang atau berbukit sebaiknya dihindari untuk dibangun tambak, karena lahan demikian

harus dipapas dan diurug sehingga akan meningkatkan biaya pembangunan tambak (Puspita, 2005:64).

Selain aspek ekologis, faktor sosial ekonomis juga penting untuk diperhatikan. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, banyak faktor yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menentukan lahan yang akan digunakan untuk pembuatan tambak. Lahan yang akan digunakan untuk areal pertambakan harus dekat dengan lokasi benih, baik yang berasal dari alam maupun dari panti benih setempat. Semakin dekat dengan sumber benih (terutama benih alam), kualitas lahan biasanya relatif lebih mendekati kondisi lingkungan yang dikehendaki oleh udang (Afrianto dan Liviawaty, 1991).

Bagi petani tambak Marunda, memilih lokasi tambak yang dekat dengan lokasi benih merupakan hal yang sulit. Keterbatasan lahan untuk dijadikan tambak di Marunda menuntut petani tambak untuk mencari cara lain untuk mendapatkan benih tambak. Salah cara untuk mendapatkan benih yakni membudidayakan secara mandiri oleh petani tambak. Simak penuturan Pak Antari mengenai pembenihan benih tambak.

“Kami di sini membudidayakan sendiri benih yang akan digunakan untuk tambak. Kami melakukannya dengan dua cara yakni pembenihan dilakukan di empang yang khusus untuk pembenihan. Kedua, pembenihan dilakukan di darat, biasanya di wadah besar khusus untuk benih. Sebelum menebar benih ke tambak, kami mencocokkan terlebih dahulu kualitas air tambak dengan benih. Kami ambil sejumlah air dari tambak, dimasukkan ke dalam wadah kemudian beberapa benih dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Wadah didiamkan beberapa hari, terus kita liat benih cocok apa ngga. Kalo cocok, benih baru bisa ditebar ke tambak.” (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Keterbatasan lahan yang mereka miliki menuntut mereka mengembangkan cara-cara dalam menyediakan kebutuhan produksi tambak termasuk kebutuhan benih. Tidak ada pilihan lokasi menyebabkan petani tambak mengantisipasi kebutuhan tambak dengan cara mereka sendiri. Namun, tidak semua petani tambak mampu menyediakan benih secara mandiri. Adalah kelompok tambak Bina Marunda Windu (BMW) yang berusaha membudidayakan benihnya secara mandiri.

Keberadaan kelompok tambak BMW dimanfaatkan anggotanya untuk menyediakan benih untuk para anggotanya. Semua anggota diberikan kemudahan dalam mendapatkan benih. Harga yang diberikan kepada anggota relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di tempat penjualan benih lainnya. Namun hal ini tidak dirasakan oleh petani tambak yang tidak masuk dalam kelompok tambak. Bagi petani tambak, di luar kelompok yang ingin membeli benih di kelompok ini harus membayar secara tunai benih yang akan mereka beli. Bisa saja dicicil, tetapi jangka waktunya pendek yakni hanya seminggu. Penuturan hal ini jelas terucap dari pernyataan Pak Antari

“Kalo untuk benih, kami sediakan di sini (kelompok tambak BMW). Anggota bisa mendapatkan benih dengan mudah. Harganya bisa dinego. Bisa dicicil juga. Ya namanya anggota kami saling bantu. Kalo ada orang lain yang mau beli harus bayar cash. Kalo pun di cicil, jangka waktunya seminggu.” (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Hasil budidaya tambak yang dikelola petani tambak di Kelurahan Marunda dipasarkan ke pelelangan ikan yang ada di Cilincing. Petani tambak membawa hasil budidaya tambak tersebut pada malam hari. Penentuan harga dilakukan oleh orang yang berperan sebagai bos dalam pelelangan tersebut. Berikut penuturan Pak Sakri.

“... nah kalo Bandeng ini biasanya saya bawa ke pelelangan ikan yang ada di Cilincing, bawanya malem kan orang banyak beli subuh-subuh. Kalo bawanya siang rugi karena mesti dipakein es, rugi deh. Ini yang kebanyakan beli ikannya orang Madura, mereka kalo beli langsung 30kg. Yang nentuin harga dari bosnya nanti saya tinggal ambil berapa persen.”

Penjualan hasil budidaya tambak biasanya dilakukan kepada satu pihak saja. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh petani tambak ketika memilih tempat untuk menjual hasil budidaya tambak. Salah satu pertimbangannya yakni pemberian THR. Seperti yang dilakukan oleh Pak Atilah. Pak Atilah menjual ke Pak Cang yang merupakan salah satu pengepul di Marunda. Beliau menjualnya kepada pengepul tersebut karena setiap tahun Pak

Cang memberikan THR kepada petani tambak yang menjual hasil budidaya tambaknya kepada Pak Cang. Setiap hari raya Pak Atilah dan petani tambak lainnya yang menjual hasil budidaya tambak kepadanya mendapat THR berupa baju, minuman, roti kaleng, dan makanan. Selain itu, pertimbangan harga juga mempengaruhi petani tambak dalam memilih tempat untuk menjual hasil budidaya tambak. Harga penjualan yang relatif tinggi dan stabil juga menjadi pertimbangan petani tambak dalam menjual hasil budidaya tambaknya.

### **4.3. Pengelolaan Lahan Tambak**

#### **4.3.1 Tambak yang Dikerjakan Sendiri**

Tambak yang dikerjakan sendiri merupakan tambak yang dibiayai dan dikelola oleh pemilik lahan sendiri. Dalam pertanian pedesaan, pemilik lahan yang menggarap lahannya sendiri disebut sebagai pemilik penggarap murni (Wiradi, 2008:364). Semua biaya produksi ditanggung oleh pemilik penggarap murni. Biaya ini meliputi biaya untuk pembuatan tambak, penyebaran benih, perawatan, dan biaya panen. Untuk memenuhi biaya-biaya ini, biasanya seorang petani tambak yang memiliki keterbatasan modal akan meminta bantuan keluarga atau kerabatnya. Seperti halnya yang dilakukan Pak Antari dan Pak Atilah. Keduanya melibatkan anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pak Antari misalnya, menggarap tambaknya dengan bantuan kakaknya. Selain memberikan bantuan modalnya, kakaknya juga terlibat dalam proses produksi tambak. Sementara itu, Pak Atilah meminta bantuan menantunya untuk membantu usahanya. Begitu juga halnya dengan petani tambak lainnya yakni Pak Kasmuri, Pak Kasman, dan Pak Sakri melibatkan anggota keluarga atau kerabatnya dalam budidaya tambak. Data ini menunjukkan bahwa petani tambak yang mengelola sendiri tanahnya tidak terlepas dari bantuan orang lain dalam proses produksi tambak. Namun pemilihan bantuan ini pun dengan pertimbangan tertentu. Biasanya orang yang pertama kali dimintai bantuan adalah keluarga dekat kemudian kerabat terdekat. Bantuan yang diberikan pun tidak hanya bantuan modal tetapi bantuan tenaga karena ada beberapa kegiatan tambak yang sangat berat apabila dilakukan sendiri.

### 4.3.2 Tambak dengan Bantuan Buruh Tambak

Seringkali beberapa kegiatan tambak dirasa berat untuk dilakukan sendiri. Beberapa petani tambak yang memiliki modal lebih, menggunakan tenaga upahan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan tambak. Di kalangan petani tambak di Marunda, tenaga upahan terdiri dari tenaga harian dan tenaga borongan. Pekerja harian ini diperkerjakan perharinya dengan upah sebesar Rp. 50.000,00. Uang ini merupakan uang bersih yang diterima oleh pekerja harian atau disebut juga buruh tambak harian. Buruh tambak harian ini selain mendapat uang bersih juga mendapat pelayanan lainnya yakni makan siang, kopi, dan rokok. Penggunaan jasa buruh tambak ini dilakukan ketika seorang petani tambak mempunyai modal cukup banyak. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pak Atilah. “... *kalo untuk kuli ya 50 rebu, itu belum termasuk uang makan sama uang rokok. Pokoknya seharinya 50 rebu bersih perharinya buat kuli. Uang makan sama uang rokok kita yang nanggung.*” Orang yang biasa digunakan jasanya untuk membantu budidaya tambak yakni Pak Namin. Beliau adalah langganan Pak Atilah.

Jam kerja buruh tambak harian mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Pekerjaan buruh tambak harian ini biasanya diawasi oleh pemilik tambak. Bentuk pekerjaan yang diberikan oleh pemilik tambak kepada buruh tambak biasanya pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga besar seperti membuat tambak dan menguras tambak. Sedangkan pekerjaan menebar benih dan panen biasanya dilakukan oleh pemilik tambak sendiri.

Pekerjaan membuat tambak merupakan pekerjaan yang dianggap paling berat di kalangan petani tambak karena tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Seseorang yang membuat tambak harus menggali tanah untuk dibuat petakan tambak kemudian mendisainnya. Disain tambak ini meliputi di bagian sisi tambak dibuat lebih dalam dibanding bagian tengahnya. Bagian pinggir tambak dibuat sedalam 1,5 meter, sedangkan bagian tengah dibuat sedalam 1 meter. Menurut penuturan sejumlah petani tambak, bagian sisi dibuat lebih dalam dengan alasan tempat ini digunakan untuk tempat tidur udang dan bandeng. “... *udang dan bandeng juga butuh tidur, nah itu bagian sisi buat tidurnya.*” Ujar Pak Sakri. Dalam istilah petani tambak di Marunda, proses pembuatan tambak ini dikenal dengan istilah *mendadani*.

Sementara itu, buruh tambak borongan yakni buruh tambak yang dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan waktu dan biaya. Sejumlah petani tambak di Marunda mengaku buruh tambak borongan ini tidak mendapat uang perhari melainkan satu kali saja. Pak Antari mencontohkan seorang buruh tambak diberikan pekerjaan membuat tambak, misalnya, pemilik tambak tinggal memberikan sejumlah uang untuk membuat tambak sampai tambak tersebut jadi. Biasanya harga yang dikeluarkan bervariasi tergantung luas tambak tersebut. Harga tersebut berkisar antara Rp. 5 juta – Rp. 12 juta. Pemilik tambak tidak perlu memberikan uang makan maupun uang rokok. Semua pembiayaan sudah termasuk di dalam harga tersebut. Biasanya buruh tambak borongan mempekerjakan beberapa tenaga bantuan untuk mengerjakan tambak tersebut. Jumlah pekerjaannya tidak dibatasi. Namun biasanya mencapai tiga sampai lima orang. Si pemilik tambak sendiri tidak mau ambil pusing berapa orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut karena sudah dilimpahkan tugasnya ke buruh tambak borongan (biasanya ada mandornya).

Pekerjaan yang biasanya dilakukan sendiri oleh pemilik tambak yakni menebar benih dan panen. Kedua pekerjaan ini dilakukan oleh pemilik tambak sendiri karena pekerjaannya tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga. Selain itu, pekerjaan ini dilakukan sendiri untuk menghindari adanya kecurigaan di kalangan petani tambak terutama ketika panen. Dalam proses panen, sebenarnya tidak semua pemilik tambak mengerjakannya sendiri. Pemilik tambak biasanya memperkerjakan orang lain. Petani tambak yang memperkerjakan orang lain adalah petani tambak yang tidak mempunyai alat mesin pompa. Di Marunda, memang tidak semuanya memiliki mesin pompa. Keterbatasan modal menjadi alasan utamanya. Namun hal ini bukan berarti petani tambak yang tidak mempunyai mesin pompa tidak bisa menggunakan mesin pompa. Di tempat ini ada yang menyewakan mesin pompa untuk keperluan panen. Adalah Pak Kasman salah satunya.

Pak Kasman menyewakan mesin pompanya untuk kebutuhan panen petani tambak di lokasi ini. Mesin pompa ini dia beli dari hasil uang tebusan lahan tambaknya yang berada di Poncol, Kabupaten Bekasi yang lokasinya persis di

sebelah kanan Banjir Kanal Timur (BKT)<sup>8</sup>. Mesin pompa ini disewa dengan harga Rp. 200 ribu – Rp. 250 ribu. Harga Rp. 200 ribu adalah harga sewa mesin pompanya saja. Untuk bahan bakar ditanggung oleh penyewa. Sedangkan harga Rp. 250 ribu merupakan harga bersih yang meliputi keperluan bahan bakar dan upah pekerja yang mengoperasikan mesin pompa. Penentuan waktu sewa sampai panen selesai. Petani tambak mulai memompa tambaknya pada malam hari. Pilihan mulai dari malam hari agar pagi hari air tambak sudah habis dipompa, biasanya jam 5 atau jam 6 pagi air tersebut sudah habis. Setelah itu, pemilik tambak bisa langsung *merogoh* dan mengumpulkan hasil panennya untuk segera dijual ke pasar atau tengkulak pada pagi hari.

#### 4.3.3 Tambak dengan Sistem Sewa, Kontrak atau Gadai

Pemilik tambak di Marunda tidak hanya menggunakan tanahnya untuk digarap sendiri, tetapi dapat juga dialihkan kepada orang lain melalui sistem kontrak/gadai. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan untuk mengambil keputusan menggadaikan atau mengontrakannya tambaknya. Pertama, alasan jenuh atau sedang bosan di tambak. Alasan ini kerap muncul di kalangan petani tambak apabila produktivitas tambaknya menurun. Padahal kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Biasanya petani tambak mengambil pekerjaan lain seperti buruh bangunan atau membuka warung. Kedua, alasan kebutuhan uang yang mendadak dalam jumlah relatif besar dari pihak pemilik tambak, misalnya untuk biaya pernikahan, biaya pengobatan, biaya kematian, biaya sekolah, biaya melahirkan, musibah kecelakaan dan untuk membayar hutang. Dalam melihat sistem kontrak atau gadai, petani tambak memiliki berbagai pandangan.

Di kalangan petani tambak, sistem gadai merupakan sistem yang paling menguntungkan. Apabila sebidang tambak sudah digadaikan, maka seluruh keputusan dan hak-hak yang menyangkut penggarapan tambak tersebut menjadi

---

<sup>8</sup> Lokasi tambak Pak Kasman cukup jauh dari Sungai Tirem. Butuh waktu kurang lebih satu jam berjalan kaki untuk mencapai lokasi tersebut melewati Kampung Bambu Kuning dan melewati jembatan Banjir Kanal Timur (BKT). Tambak ini merupakan tambak gadaianya. Tambak ini diminta untuk segera ditebus lantaran sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan tempat budidaya tambak. Dari segi kualitas air, airnya bersifat tawar karena telah tercampur dari air BKT. Selain itu, seringkali di tempat ini banjir. Tambak Pak Kasman seringkali terkena banjir yang menyebabkan udang dan bandeng yang dibudidayakan terkena banjir. Keputusan untuk segera ditebus oleh pemiliknya pun dipilih Pak Kasman. Uang tebusan ini salah satunya digunakan untuk membeli mesin pompa.

hak sepenuhnya pemegang tambak. Begitu juga halnya dengan seluruh hasil panen. Namun tidak semua bisa jadi pemegang gadai. Diperlukan modal yang relatif besar apabila ingin memegang gadai. Biasanya uang gadaian ini diperoleh dari hasil patungan keluarga atau kerabat. Dua keuntungan dapat didapatkan apabila menggunakan sistem gadai. Pertama mendapatkan hasil panen secara penuh. Kedua, mendapat uang tebusan apabila si pemilik tambak hendak menebusnya.

Sistem pengelolaan tambak di Marunda jarang sekali ditemukan sistem bagi hasil. Dari sejumlah informan yang saya temui, mereka biasanya menggunakan sistem kontrak/gadai, mengerjakan tambak sendiri, atau dengan bantuan buruh tambak. Petani tambak lebih memilih mengeluarkan uang atau modal lebih banyak, dibandingkan harus berbagi hasil panen tambak dengan orang lain. Petani tambak di Marunda yang tergolong miskin ini mengaku tidak mau hasil yang diperoleh dari bagi hasil tidak sesuai dengan harapan mereka.

Sistem-sistem yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa di kalangan petani tambak pun menerapkan aturan-aturan yang mengatur mengenai pemanfaatan tanah. Merujuk kepada pemikiran Ribot dan Peluso (2003) mengenai mekanisme, mekanisme yang terjadi di antara aktor yang terlibat tidak hanya secara struktural berlangsung dengan pemilik tanah aslinya, tetapi juga hubungan secara horizontal di kalangan petani tambak kerap kali terjadi. Apabila proses berjenjang terjadi pada hubungan petani tambak dengan pemilik aslinya seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka di kalangan petani tambak pun terjadi proses berjenjang antara petani-pemilik tambak dengan buruh tambak atau tuna kisma (petani tambak yang tidak memiliki lahan sendiri). White [(2004) dalam Soehendera, 2010:4] mengatakan bahwa masalah pertanahan secara prinsipil bukanlah soal hubungan antara “penduduk dengan tanah” atau “penduduk dengan sumber daya”, melainkan merupakan persoalan hubungan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat (*social relations and power*). Hubungan demikian bisa terjalin antara sesama warga, ataupun antar kelompok-kelompok masyarakat, dan terutama warga dengan pemerintah. Hubungan-hubungan demikian dapat pula terwujud dalam bentuk pranata dalam hal ini terkait dengan pranata penguasaan tanah.

Untuk konteks pemanfaatan tanah di Marunda menunjukkan bahwa hubungan sosial dapat berlangsung berdasarkan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.

Merujuk kepada konsep sebundel hak-hak (*bundel of rights*) yang dikemukakan oleh Schlager dan Ostrom (1992), pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk dijadikan lahan tambak di Marunda menunjukkan hak-hak yang melekat pada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pemilik tanah (dalam hal ini Mabes TNI AL) merupakan aktor yang memiliki hak atas akses dan pemanfaatan, hak pengelolaan, hak pembatasan, dan hak pelepasan. Mabes TNI AL memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur dan mengarahkan penggarap (petani tambak) dalam menggarap tanah mereka. Sementara itu, petani tambak sebagai penggarap hanya memiliki hak atas akses dan pemanfaatan dan hak pengelolaan. Dalam hak pemanfaatan, petani tambak mempunyai hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu (dalam hal ini tanah Mabes TNI AL) dan memanfaatkan serta mengambil sesuatu atau untuk memanen sesuatu dari tanah tersebut. Sementara itu, hak pengelolaan yang dimiliki petani tambak merupakan hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah tanah untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi dari tanah tersebut. Tujuan atau produksi dari tanah tersebut digambarkan dalam pemanfaatan tanah untuk usaha budidaya tambak.

## BAB 5

### PRANATA PENGUASAAN TANAH PADA PETANI TAMBAK MARUNDA

#### 5.1 Pemanfaatan Tanah di Marunda

Data tentang tata guna tanah di Kelurahan Marunda dapat diperoleh dari sumber Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Namun, saya mengalami kesulitan ketika mencari data mengenai status kepemilikan tanah di Marunda. Sulitnya menelusuri data mengenai kepemilikan tanah di Marunda disebabkan intensitas jual beli tanah di Marunda cukup tinggi sehingga suatu saat kepemilikan tanah di Marunda bisa berubah. Selain itu, seringkali terjadi jual beli tanah di Marunda dilakukan secara “di bawah tangan” tanpa melalui badan pertanahan setempat. Oleh karena itu, saya hanya mendapatkan data mengenai lahan milik pemerintah pusat dan daerah yang sudah mendapatkan surat izin penunjukkan dan penggunaan tanah di Marunda (lihat tabel izin penunjukkan dan penggunaan tanah di Marunda).

Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang DKI<sup>9</sup> Jakarta pada tahun 2010 izin penunjukkan dan penggunaan tanah di Kelurahan Marunda didominasi oleh penggunaan tanah untuk Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang mencapai luas tanah 117 hektar<sup>10</sup> dari total wilayah Kelurahan Marunda seluas 791,69 hektar. Data tersebut juga menunjukkan bahwa izin penunjukan dan penggunaan tanah di Kelurahan Marunda cukup beragam meliputi pemanfaatan untuk kawasan industri, kawasan militer, kawasan pendidikan, kawasan rekreasi dan kawasan pemukiman.

Di Marunda, izin penggunaan tanah yang mendominasi wilayah ini adalah penggunaan tanah untuk kawasan industri. Adalah Kawasan Berikat Nusantara

---

<sup>9</sup> Informasi ini diperoleh dari Surat kabar *Bisnis Indonesia* pada hari Jumat, 15 April.

<sup>10</sup> Surat kabar *Bisnis Indonesia* pada hari Jumat, 15 April 2011 menyatakan bahwa izin penggunaan tanah di Marunda akan dikaji ulang. Hal ini terkait dengan rencana pembangunan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek ini akan mendukung Jakarta sebagai kota jasa dan pusat logistik yang terintegrasi mencakup aktivitas kepabeanan, ekspor-impor, pergudangan dan transportasi. Rencananya, KEK Marunda dibagi menjadi tujuh zona terdiri dari zona reklamasi seluas 2.036 ha, zona industri dan pergudangan dengan stasiun kereta dan pemerintahan 268 ha, zona pemukiman 154,2 ha, zona industri dan pergudangan 121,47. Apabila rencana ini direalisasikan, besar kemungkinan komposisi penggunaan tanah di Marunda akan mengalami perubahan.

(KBN) yang memperoleh izin penggunaan tanah paling luas di Marunda yakni 117 hektar. Berikutnya adalah lahan Mabes TNI AL yang mendominasi izin penunjukan dan penggunaan tanah di Marunda. Kedua instansi ini mendominasi izin penunjukan dan penggunaan tanah di Marunda, sisanya yakni diperuntukan untuk kawasan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), rumah susun sederhana milik (rusunami), lahan milik PT Karya Teknik Utama, cagar budaya kuburan si Pitung, makan Kapten Jongker, waduk dan tempat pengelolaan sampah terpadu, rumah susun sewa Marunda, tempat pemakaman umum (TPU) Malaka, PT Liguna Usaha, dan Multiland. Berdasarkan data statistik memang terlihat bahwa KBN dan Mabes TNI AL mendominasi izin penggunaan tanah di Marunda (lihat tabel mengenai izin penunjukan dan penggunaan tanah di Marunda).

Kawasan KBN lebih banyak menguasai wilayah pesisir yang berdekatan dengan bibir pantai. Kawasan ini hampir setiap hari ramai dilalui truk-truk besar berisi muatan peti kemas dari dan menuju KBN. Keramaian ini sudah nampak terlihat di perempatan jalan Kelurahan Cilincing yang menghubungkan Marunda dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Tabel. 9 Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah di Marunda

<b>Keterangan Tanah</b>	<b>Luas Tanah (hektare)</b>
Kawasan Berikat Nusantara	117
Lahan Mabes TNI AL	110
Waduk dan TPST Marunda	76
Taman Pemakaman Umum (TPU) Malaka 1	52
Rumah Susun Sederhana Milik	41,8
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	37
Rusunawa Marunda	35,3
Multiland	26,2
Lahan PT Karya Teknik Utama	3,5
Cagar Budaya Kuburan Si Pitung	3,5
Makam Kapten Jongker	3,4
PT Liguna Usaha	2,2

Sumber: Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, 2010

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara atau biasa disingkat dengan KBN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1986 yang merupakan penggabungan antara PT. Bonded Warehouses Indonesia (BWI) dan PT. Sasana Bhandra, PT (P) Pusat Perkayuan Marunda dan PT (P) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia. Pemegang saham PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara terdiri dari Pemerintah Pusat (88,74 %) dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (11,26 %). Usaha pokok PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara adalah mengelola kawasan berikat yang berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (Export Processing Zone – EPZ) dan kawasan industri, layanan jasa Logistik dan kepelabuhanan. Wilayah usaha KBN meliputi Kelurahan Cakung, Kelurahan Tanjung Priok, dan Kelurahan Marunda<sup>11</sup>.

Kawasan berikutnya yang mendominasi izin penunjukan dan penggunaan tanah yakni Mabes TNI AL. Lahan yang digunakan Mabes TNI AL di Marunda seluas 110 hektar. Kawasan ini mempunyai dua pintu masuk berupa gerbang besar bertuliskan Pangkalan Utama TNI AL III.



Gambar 4. Pintu masuk kawasan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III  
(Fahrudin, 2011)

Untuk memasuki kawasan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III ini dari arah Cilincing dapat menggunakan angkutan umum KWK 02 menuju

<sup>11</sup><http://www.kbn.co.id/id/files/peraturan/KAWASAN%20EKONOMI%20KHUSUS%20INDONESIA.pdf> diakses pada tanggal 28 November 2011 pukul 11.40 WIB

Marunda. Ketika masuk kawasan ini ada pos penjagaan di pintu masuk dari arah Cilincing. Namun, di pintu gerbang lainnya dari arah kantor Kelurahan Marunda tidak ada pos penjagaan. Kawasan ini dihuni oleh warga Komando Armada Barat (Koarmabar) yang menempati rumah flat TNI AL. Di sekitar kawasan rumah flat Koarmabar ini masih terdapat lahan-lahan kosong yang dijadikan tempat budidaya tambak yang digarap warga sekitar dengan status hak garap.



Gambar 5. Tambak di atas tanah milik TNI AL (Fahrudin, 2011)

Lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemilik tanah digunakan oleh warga setempat untuk tempat tinggal dan kegiatan ekonomi terutama budidaya tambak. Secara hukum formal, petani tambak di lokasi ini tidak mempunyai surat izin penunjukkan dan penggunaan tanah di Marunda. Namun, dalam praktik di lapangan, lahan-lahan kosong di Marunda dimanfaatkan oleh sejumlah warga Marunda untuk mencari nafkah, salah satunya yakni untuk usaha budidaya tambak. Pemanfaatan dan penguasaan tanah oleh petani tambak ini dilakukan berdasarkan pranata sosial yang secara sadar maupun tidak sadar disepakati oleh pemilik tanah dan petani tambak. Pranata inilah yang mengatur bagaimana petani tambak menguasai tanah dan mempertahankan akses terhadap tanah di Marunda.

## 5.2 Proses Pengajuan Hak Garap Tanah

Di Marunda, untuk mendapatkan tanah untuk dijadikan lahan tambak dilakukan melalui berbagai cara tergantung pada siapa pemilik tanah yang bersangkutan. Di lokasi penelitian saya yakni di RW 04 Kelurahan Marunda, kepemilikan tanah terdiri dari tanah milik Mabes TNI AL, tanah milik swasta, dan tanah milik perorangan. Ketiga pemilik tanah ini menerapkan aturannya masing-masing kepada pihak yang akan menggarap tanah mereka.

Tanah-tanah kosong milik TNI AL dimanfaatkan oleh petani tambak untuk budidaya tambak udang dan bandeng. Pemanfaatan tanah untuk budidaya tambak ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Sejak saat itu, petani tambak diberikan kuasa atas lahan kosong untuk dimanfaatkan selagi lahan tersebut belum digunakan oleh pihak Mabes TNI AL. Untuk mendapatkan hak garap tanah milik Mabes TNI AL tersebut, petani tambak harus mengikuti beberapa proses yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh petani tambak ketika ingin memanfaatkan tanah kosong milik Mabes TNI AL yakni harus mendatangi langsung kantor Lantamal Pusat yang berada di Jl. Gunung Sahari. Namun menurut penuturan Pak Atilah, kantor Lantamal Pusat ini bukan menjadi patokan utama petani tambak untuk mengajukan penggarapan tanah di tanah milik TNI AL, melainkan orang-orang atau bagian yang mengurus pemanfaatan tanahlah yang menjadi patokan utamanya. Pak Atilah menambahkan bahwa patokan utamanya yakni keberadaan orang yang mengurus bagian masalah pemanfaatan tanah itu berada. “... kadang-kadang kita ke kantor yang ada di Kelapa Gading, kadang-kadang ke Mangga Dua. Tergantung orangnya lagi ada di mana ya kita datangin.” Ujar Pak Atilah ketika ditanya di mana tempat mengurus “perizinan” menggarap tanah milik Mabes TNI AL. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Sakri ketika ditanya bagaimana proses pertama kali seorang petani tambak menggarap tanah milik Mabes TNI AL. Pak Sakri berusaha mengingat-ingat pengalamannya yang sudah hampir dua puluhan tahun tersebut.

Dulu waktu pertama kali Pak Sakri dan rekan-rekannya mengajukan diri untuk menggarap tanah milik TNI AL, mereka mendatangi langsung kantor pusat bukan kantor yang berada di Marunda. Waktu

itu lokasinya di Kepala Gading. Mereka berbondong-bondong mengajukan diri untuk menggarap tanah untuk dijadikan lahan tambak. Saat itu jumlah petani tambak masih sedikit dibandingkan saat ini. Dengan bekal alamat yang diberikan oleh pihak TNI AL setempat yakni Lantamal III, mereka pergi ke kantor pusat menggunakan kendaraan umum. Setibanya di kantor pusat, mereka mendatangi bagian yang mengurus masalah tanah milik Mabes TNI AL. Sejak saat itulah Pak Sakri bersama rekan-rekannya pertama kali bertemu dengan orang-orang pusat Mabes TNI AL (Catatan Lapangan, 2 Maret 2011).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani tambak di Marunda, sebenarnya penggarapan tanah milik Mabes TNI AL itu gratis. Petani tambak tidak dimintai biaya administrasi atas penggarapan tanah milik Mabes TNI AL. Informasi ini diperoleh ketika petani tambak diundang rapat di kantor pusat pada tahun 2000. Pada saat rapat tersebut, pihak pusat menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya yang harus dibayar oleh petani tambak. Pesan yang disampaikan oleh pihak TNI AL Pusat yakni agar petani tambak menjaga tanah milik Mabes TNI AL dan tidak menjualnya. Pernyataan inilah yang dipegang oleh petani tambak sebagai pelindung mereka menggarap tanah milik Mabes TNI AL.

Sementara itu, di kalangan petani tambak sendiri, mereka memberikan bagian hasil panen tambak kepada pihak pusat sebagai bentuk “terima kasih” karena mereka diberikan izin untuk menggarap tanah. Komposisi bagi hasil panen yakni 1:5. Satu bagian untuk pihak TNI AL dan lima bagian untuk petani tambak (lihat Sub Bab berikutnya mengenai pemeliharaan bentuk akses petani tambak atas tanah).

Untuk memudahkan pengawasan dari pihak pusat Mabes TNI AL, pihak tersebut memberikan kuasa kepada pihak Lantamal III yang berlokasi di Marunda untuk mengawasi pemanfaatan tanah milik Mabes TNI AL. Pemberian kuasa ini mulai berlangsung ketika dibangunnya rumah flat warga Koarmabar Marunda. Pihak Lantamal III ini merupakan “perpanjangan-tangan” dari pihak pusat untuk memudahkan pengawasan dan juga sebagai perantara penyampaian informasi dari pihak pusat kepada petani tambak. Sejak adanya “perpanjangan-tangan” ini, petani tambak jika ada urusan mengenai pemanfaatan tanah tidak perlu lagi pergi ke kantor pusat. Salah satu informasi yang disampaikan oleh pihak Lantamal III

dari kantor pusat yakni mengenai biaya administrasi pertanahan atau biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh petani tambak.

Petani tambak yang menggarap tanah milik Mabes TNI AL diminta untuk membayar biaya administrasi yang disesuaikan berdasarkan luas tanah yang digarap petani tambak. Menurut penuturan petani tambak, biaya administrasi ini akan digunakan untuk biaya operasional pengawasan terhadap para penggarap. Namun informasi mengenai penggunaan uang ini masih samar-samar di kalangan petani peruntukannya untuk apa. Petani tambak sendiri, terkesan tidak mau ambil pusing mengenai penggunaan uang ini. Mereka menganggapnya sebagai uang sewa seperti pada umumnya berlaku di pertanian.

Rupanya, pihak pos Lantamal III yang merupakan “perpanjangan-tangan” Lantamal Pusat memanjangkan lagi perannya kepada warga setempat untuk memudahkan tugasnya menarik uang sewa. Warga yang dijadikan “perpanjangan-tangan” dari “perpanjangan-tangan” pusat yakni Pak Munin. Pak Munin inilah yang bertugas sebagai mediator antara petani tambak dan pihak TNI AL (Lantamal III). Pak Munin bukanlah pengurus RT/RW, melainkan warga biasa. Walaupun warga biasa, Pak Munin ini memiliki kedekatan dengan pihak Lantamal III dan petani tambak. Secara hierarki, posisi Pak Munin berada di bawah atau *klien* dari pihak Lantamal III. Namun di sisi lain, ketika berhadapan dengan petani tambak, Pak Munin adalah *patron* karena memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan petani tambak.

Peran Pak Munin cukup efektif dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak Lantamal III. Sebagai *patron* dari petani tambak, Pak Munin mempunyai wewenang untuk mengawasi pemanfaatan tanah oleh petani tambak, memberikan informasi dari pihak TNI AL, dan menyediakan jasa berupa peralihan nama atau daftar penggarap tanah milik Mabes TNI AL. Seperti halnya yang dialami oleh Pak Antari ketika mengurus peralihan nama penggarap dari orang tuanya kepada dirinya. Pak Antari tidak perlu datang ke kantor pusat ataupun ke pos Lantamal III. Pak Antari cukup mendatangi Pak Munin mengurus peralihan nama tersebut dan memberi “uang tip” kepada Pak Munin untuk mengurus peralihan nama tersebut. Keberadaan Pak Munin dianggap memberikan peranan bagi keberlangsungan klien-klien (petani tambak).

Mekanisme pengajuan izin menggarap di tanah milik TNI AL merupakan mekanisme berjenjang berdasarkan kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme tersebut. Kedudukan ini menunjukkan jenjang mulai dari kedudukan paling tinggi yakni Lantamal Pusat, kemudian Lantamal III, lalu ke Pak Munin sebagai perantara, barulah petani tambak yang berada dalam kedudukan paling rendah. Sadar akan kedudukannya paling rendah dalam sistem berjenjang ini, menyebabkan petani tambak “terpaksa” menyepakati cara kerja berjenjang tersebut. Petani tambak tidak bisa langsung menerabas atau “lompat” ke jenjang yang lain, tetapi harus melewati jenjang yang persis digambarkan di atas yakni Pak Munin lalu ke Lantamal III, kemudian Lantamal III ke Lantamal Pusat.

Proses berjenjang terkait dengan pemanfaatan tanah milik Mabes TNI AL ternyata tidak hanya berhenti sampai petani tambak yang menggarap tanah tersebut, tetapi masih berlangsung di kalangan petani tambak itu sendiri. Petani tambak yang memiliki hak garap atau izin memanfaatkan tanah milik Mabes TNI AL ternyata memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan petani tambak lainnya yang tidak mempunyai tambak sendiri atau tuna kisma. Petani tambak yang memiliki lahan tambak secara *de facto* dapat dengan bebas memanfaatkan tanahnya tersebut, apakah akan digarap sendiri atau dikelola oleh petani tambak lainnya melalui sistem sewa, kontrak, sistem gadai, atau sistem bagi hasil.

### **5.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penguasaan Lahan Tambak**

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pemilikan, penguasaan, dan pengusahaan tanah untuk dijadikan lahan tambak. Pihak-pihak ini memiliki kedudukan dan perannya masing-masing tergantung dengan siapa pihak-pihak tersebut berhadapan.

Pihak yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam penguasaan tanah milik TNI AL yakni Lantamal Pusat (Mabes TNI AL). Lantamal Pusat merupakan pemilik tanah yang tanahnya digunakan oleh warga Marunda untuk berbagai kegiatan dan peruntukan. Lantamal Pusat adalah sebuah institusi yang di dalamnya terdapat bagian atau divisi yang bertugas menjaga dan mengawasi keberadaan tanah yang dimiliki oleh Mabes TNI AL salah satunya yang berlokasi di Marunda. Pihak Lantamal Pusat harus memperhatikan betul keberadaan tanah

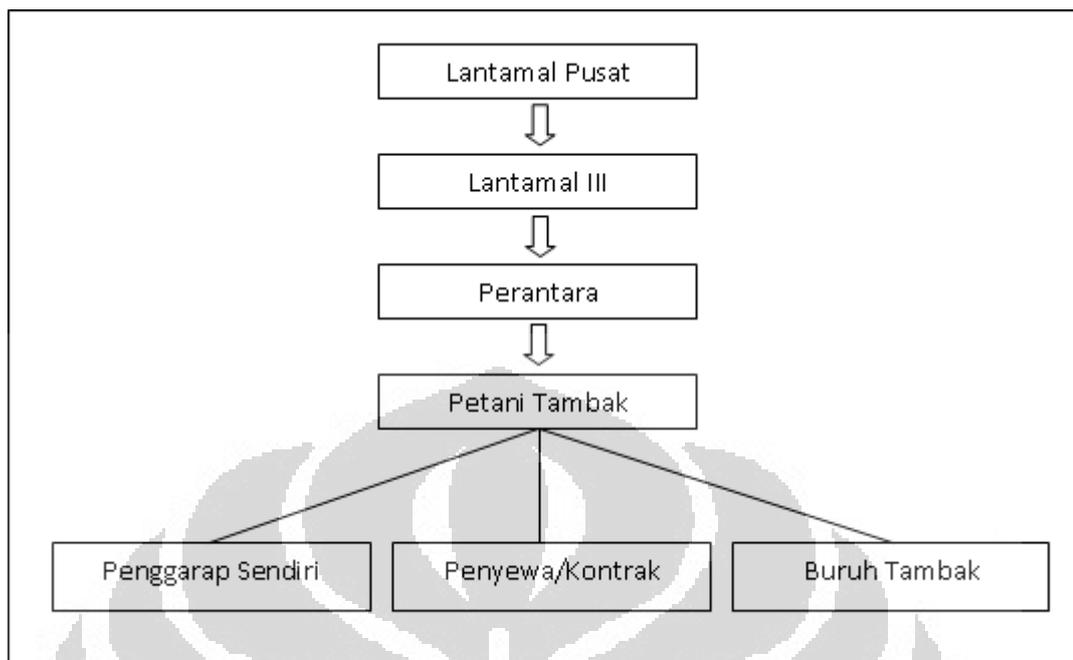
Mabes TNI AL terutama di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan keberadaan tanah di perkotaan rawan terjadi sengketa dan konflik tanah. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat di perkotaan, sedangkan lahan penopangnya tetap (dalam hal ini tanah) memunculkan kondisi di mana tanah menjadi barang langka.

Merujuk kepada konsep Schlager dan Ostrom (1992), Lantamal Pusat (Mabes TNI AL) merupakan pemilik (*owner*) tanah yang memiliki hak-hak yang melekat di dalamnya yakni hak atas akses dan hak atas pemanfaatan; hak pengelolaan; hak pembatasan; dan hak pelepasan. Hak atas akses yang dimiliki oleh Lantamal Pusat selaku pemilik tanah yakni hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu; sedangkan hak pemanfaatan adalah hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanen sesuatu atas tanah yang dimiliki oleh Lantamal Pusat seperti untuk memancing ikan, memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya. Hak pengelolaan merupakan hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi. Hak pembatasan adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain). Sementara itu, hak pelepasan adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

Untuk memudahkan tugas Lantamal Pusat dalam menjaga dan mengawasi keberadaan tanah TNI AL, pihak Lantamal Pusat melakukan “perpanjangan tangan”. Pihak yang dijadikan perpanjangan tangan oleh Lantamal Pusat yakni Lantamal III yang berada di Marunda. Pihak Lantamal III ini terdiri dari warga koarmabar yang tinggal di rumah flat milik TNI AL di Marunda. Keberadaan pihak Lantamal III yang menjadi perpanjangan tangan Lantamal Pusat dianggap mampu melaksanakan tugas dari Lantamal Pusat dalam menjaga dan mengawasi keberadaan tanah milik Mabes TNI AL. Lokasi Lantamal III yang berdekatan dengan petani tambak yang menggarap tanah milik Mabes TNI AL dianggap mempermudah pengawasan dan penyampaian informasi apabila ada informasi yang hendak disampaikan oleh petani tambak.

Perpanjangan tangan ternyata tidak hanya berhenti sampai Lantamal III, tetapi perpanjangan tangan juga dilakukan oleh Lantamal III yang diberi tugas oleh Lantamal Pusat. Lantamal III pun merasa perlu adanya perantara yang menjembatani pihak TNI AL dengan warga terutama petani tambak. Lantamal III kemudian menunjuk salah seorang warga untuk membantu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lantamal Pusat. Adalah Pak Munin yang dijadikan perpanjangan tangan dari pihak Lantamal III yang juga perpanjangan tangan dari Lantamal Pusat. Pak Munin kerap menjadi *patron* atau perantara. Ketika berhadapan dengan petani tambak, Pak Munin dapat berperan sebagai *patron* karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan petani tambak. Pak Munin mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh petani tambak. Salah satu wewenang tersebut yakni terkait pengalihan nama penggarap yang menggarap tanah milik TNI AL. Petani tambak yang ingin mengalihkan nama (biasanya dari orang tua ke anaknya), harus melalui Pak Munin. Petani tambak tidak bisa menerobos langsung ke Lantamal Pusat. Begitu juga halnya dengan Lantamal III, belum tentu mau menerima pengajuan pengalihan nama yang dilakukan langsung oleh petani tambak. Hal ini ditegaskan oleh Pak Antari, petani tambak yang sempat mengajukan pengalihan nama penggarap dari orang tuanya kepada beliau. Orang tuanya yang juga petani tambak meninggal dan Pak Antari mengajukan pengalihan nama penggarap kepadanya. Prosesnya harus melalui Pak Munin yang bertindak sebagai *patron*. Pak Munin-lah yang bertugas mengurusnya ke pihak TNI AL.

Petani tambak merupakan pihak yang berada pada kedudukan atau lapisan paling bawah di dalam mekanisme penguasaan tanah milik TNI AL. Kebanyakan petani tambak, menyepakati mekanisme berjenjang dalam penguasaan tanah tersebut. Sadar akan posisinya yang berada pada lapisan bawah “memaksa” petani tambak mengikuti pola patronase dalam mekanisme penguasaan tanah.



Gambar 6. Mekanisme Berjenjang dalam Penguasaan Tanah Mabas TNI AL di Marunda

#### 5.4 Pemeliharaan Akses Penguasaan Lahan Tambak

Petani tambak di Marunda mengembangkan beberapa cara agar dapat mempertahankan dan memelihara akses mereka terhadap tanah yang dijadikan usaha budidaya tambak. Pemeliharaan terhadap akses ini telah dilakukan sejak dulu ketika generasi sebelumnya yakni orang tua mereka menggarap tanah di Marunda. Pemeliharaan akses ini mengalami perubahan dan terus berkembang sejak dulu sampai saat ini ketika penelitian berlangsung. Sayangnya, data lengkap mengenai perkembangan pemeliharaan terhadap akses tersebut setelah dua-puluhan tahun berselang tidak tersedia lagi. Sebagian penduduk, misalnya di RW 04, memang masih mengingatnya, namun itu pun sudah samar-samar. Alasannya karena waktunya sudah lama berlalu (yakni lebih dari 20 tahun), dan ketika itu wilayah Kelurahan Marunda belum ramai seperti saat ini. Ditambah lagi, petani tambak di Marunda merupakan generasi kedua. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Antari yang orang tuanya terlebih dulu menggarap tanah di Marunda.

### 5.4.1 Pemeliharaan Hubungan Antar Aktor

#### 5.4.1.1 Pemeliharaan Hubungan Vertikal

Menurut penuturan Antari, bentuk pemeliharaan akses terhadap tanah yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya yakni menggunakan sistem bagi hasil dengan komposisi 5:1. 5 bagian untuk petani tambak dan 1 bagian untuk pemilik tanah. Saat itu, orang tua Pak Antari menggarap tanah milik TNI AL. 1 bagian dari hasil panen tambak diberikan kepada pihak TNI AL yang berada di kantor pusat yakni di Kelapa Gading. Pak Antari masih ingat betul ketika orang tuanya pergi ke Kelapa Gading untuk memberikan bagian berupa uang atau bandeng tergantung saat itu panen apa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua Pak Antari, tetapi dilakukan juga oleh petani tambak lainnya yang berbondong-bondong membawa hasil panen tambak mereka. Kegiatan membawa hasil panen untuk pemilik tanah ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Saya melihat fenomena ini seperti masa-masa feodal yang masih begitu kentara di Jawa di mana rakyat memberikan upeti berupa hasil bumi (pertanian, perkebunan, atau perikanan) kepada raja.

Bentuk pemeliharaan berupa pemberian hasil panen tambak mengalami perubahan. Menurut penuturan Antari, bentuk pemberian ini diubah karena pihak Lantamal pusat tidak mau menerima lagi bentuk pemberian berupa hasil panen. Alasannya karena seringkali terjadi penumpukan hasil panen di kantor pusat. Kantor pusat terkesan seperti tempat pelelangan ikan karena tidak semua orang yang ada di kantor pusat suka mengonsumsi ikan, walaupun ada yang suka, belum tentu mereka mau membawa hasil panen tambak dalam jumlah besar. Namun, petani tambak punya pandangan lain. Mereka beranggapan bahwa pihak Lantamal pusat takut mendapat fitnah karena memperoleh hasil panen tambak dari petani. Kekhawatiran lain yakni khawatir dituduh menarik upeti dari petani tambak. “..... *ya takut disangka ngambil upeti kali, kaya jaman-jaman dulu.*” Ungkap Pak Antari. Perubahan bentuk pemeliharaan akses terhadap tanah pun diganti melalui pembayaran uang sewa.

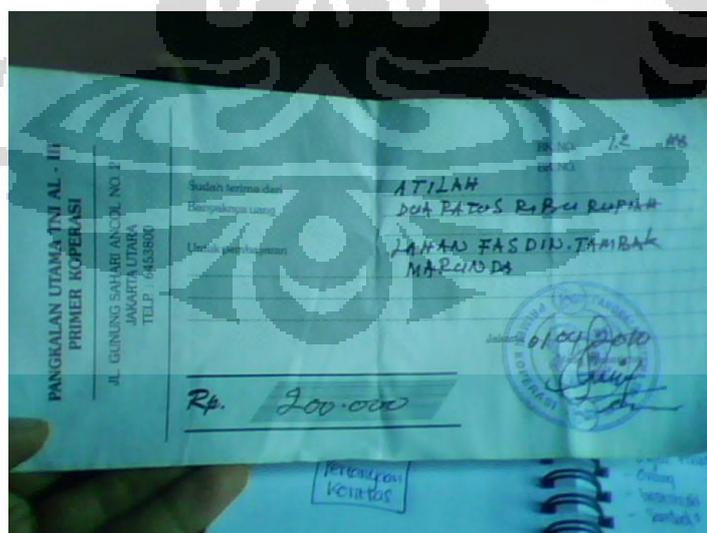
Bentuk pembayaran uang sewa mulai diberlakukan pada sekitar tahun 2000-an. Sebenarnya dari pihak Lantamal pusat tidak membenarkan adanya pembayaran uang sewa. “... *pas lagi rapat di kantor pusat. Orang pusat bilang ga*

*ada pembayaran apa pun. Kita cuma diminta jagaian tanah mereka. Ga boleh dijual.” Ungkap Pak Atilah, salah satu petani tambak Marunda.*

“... Sebagian memang tidak boleh dari atasannya. Hari pertama ga boleh bayar pas udah ngumpul di pusat. Ga boleh bayar, tetep aja bayar. Bapak denger sendiri dari pusat. Orang-orang di sini mah ngikut aja. Bisa aja mereka ngacak-ngacak di sini. Komandan pusat juga tahu”. Ujar Pak Atilah (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Aturan yang diberikan dari pihak Lantamal pusat ini ternyata berbeda dengan aturan yang diterapkan oleh pos penjagaan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III yang merupakan “perpanjangan-tangan” di Marunda. Pembayaran uang sewa diterapkan oleh pihak pos tersebut kepada petani tambak.

Pembayaran uang sewa yang diberlakukan oleh pos penjagaan TNI AL dilakukan secara rutin setiap tahunnya di bulan keempat. Setiap bulan keempat pihak pos penjagaan mendatangi petani tambak yang menggarap tanah milik TNI AL. Pihak pos penjagaan memudahkan dalam penarikan uang sewa karena daftar petani tambak yang menggarap tanah TNI AL sudah mereka miliki. Di pihak petani tambak, setiap bulan keempat sudah menyiapkan uang pembayaran uang sewa jika sewaktu-waktu orang pos datang menagih uang sewa.



Gambar 7. Bukti pembayaran uang sewa yang diberikan kepada petani tambak yang menggarap tanah milik TNI AL

Jumlah biaya uang sewa yang dikeluarkan petani tambak cukup bervariasi. Besarnya uang sewa ditentukan oleh luas lahan yang digarap oleh petani tambak. Penentuan jumlah uang sewa ini ditentukan oleh pihak pos penjagaan Lantamal III. Semakin luas lahan yang digarap, maka uang sewa yang dikeluarkan pun akan besar. Setiap orang yang membayar uang sewa akan diberikan bukti pembayaran dari pihak pos. Bukti pembayaran ini dilengkapi korps surat dari pihak Pangkalan Utama TNI AL III.

Gambar di atas merupakan bukti pembayaran salah satu petani tambak yang menggarap tanah milik TNI AL di Marunda. Dalam bukti pembayaran tersebut terdapat nama instansi yang mengeluarkan bukti pembayaran yakni dari Pangkalan Utama TNI AL – III Primer Koperasi yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Ancol No. 2 Jakarta Utara. Dari pihak petani tambak, bukti pembayaran ini dijadikan bukti “*legal-formal*” petani tambak yang menggarap tanah milik TNI AL.

Pihak yang dijadikan “perpanjangan tangan” oleh Lantamal pusat diberi tugas untuk menjaga tanah milik TNI AL di Marunda. Keberadaan lahan kosong terutama di daerah perkotaan Jakarta rawan terjadi sengketa dan konflik tanah. Dengan ditugaskannya pihak pos sebagai perpanjangan tangan diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa atau konflik tanah. Tugas utama yang diberikan pihak Lantamal Pusat ketika direalisasikan oleh “perpanjangan-tangan” ternyata tidak semuanya persis dengan apa yang ditugaskan. Pihak yang menjadi “perpanjangan-tangan” yakni pos penjagaan Lantamal III membuat aturan-aturan informal ketika merealisasikan tugasnya tersebut. Alasan penyesuaian dengan kondisi di lapangan menjadi alasan yang sering dilontarkan pihak “perpanjangan-tangan” tersebut. Salah satu aturan-aturan informal yang dibuat yakni terkait dengan besarnya jumlah uang sewa yang harus dibayar petani tambak. Proses “perpanjangan-tangan” tidak hanya berhenti sampai pos penjagaan Lantamal III, tetapi pos penjagaan Lantamal III melakukan “perpanjangan tangan” kepada warga setempat.

Proses perpanjangan-tangan yang dilakukan pihak Lantamal III bertujuan untuk memudahkan tugas dari Lantamal pusat. Pihak yang dijadikan perpanjangan-tangan dari pos penjagaan Lantamal III bukanlah pengurus RT/RW,

melainkan warga biasa bernama Munin. Munin dijadikan perpanjangan-tangan pos penjagaan Lantamal III karena mempunyai kedekatan dengan pihak pos dan juga petani tambak. Muninlah yang kerap mendata petani tambak, menyampaikan aturan-aturan mengenai penggarapan tambak, menentukan lahan mana yang boleh digarap dan mana yang tidak, dan yang mendaftarkan petani tambak ke pihak Lantamal yang ada di pusat atas persetujuan Lantamal III yang ada di Marunda<sup>12</sup>.

Petani tambak membangun hubungan yang baik ketika berhadapan dengan pihak yang menjadi “perpanjangan-tangan” Lantamal pusat. Ketika berhadapan dengan pos penjagaan, petani tambak menjaga hubungan baik dengan cara berusaha membayar uang sewa tepat waktu. Selain itu, petani tambak juga berbagi hasil panen tambak mereka kepada pihak pos penjagaan. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu mereka gagal panen atau belum ada uang sewa, mereka mendapat kompensasi berupa penundaan pembayaran. Cara ini dianggap berhasil oleh sejumlah petani tambak yang menggarap tanah milik Mabes TNI AL.

#### 5.4.1.2 Pemeliharaan Hubungan Horisontal

Berbeda halnya ketika berhadapan dengan petani tambak lainnya. Petani tambak juga membentuk pranata. Petani tambak yang sudah bosan atau sedang mengalami kejenuhan bekerja di tambak menyewakan tanah mereka kepada orang lain yang mau menggarapnya. Aturan mainpun dibentuk yang terdiri dari sistem pembayaran dan jumlah uang yang harus dibayar. Biasanya uang sewa yang ditentukan kepada orang lain lebih besar dibanding dengan jumlah uang sewa yang harus dibayar petani tambak tersebut kepada pihak pos penjagaan. Sewa-menyewa ini dilakukan di kalangan petani tambak saja, tanpa harus melibatkan pihak pos penjagaan.

“.... Bisa, kalo ada orang yang mau tinggal bilang sama saya nanti saya kasih lahannya tapi dia gak usah bayar ke orang atas langsung

<sup>12</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah informan, pendaftaran untuk mengajukan penggarapan tanah milik Mabes TNI AL sudah dihentikan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab. Pertama, lahan kosong yang diperuntukan untuk petani tambak sudah dibatasi karena lokasi lahan kosong sudah mendekati gudang peluru. Kedua, faktor pengairan yang sulit di lahan-lahan kosong. Petani tambak tidak mau mengambil resiko apabila menggarap tanah yang sulit pengairan. Hal ini disebabkan tambak sangat bergantung dari pasokan air yang masuk ke dalam tambak.

aja kasih ke saya. Kalo pindah nama lahan juga gak boleh, tetep harus bayar ke saya nanti saya bayarin ke AL.”  
(wawancara tanggal 2 Maret)

Nama yang tercantum dalam daftar penggarap tanah milik TNI AL masih tetap sama, yakni penggarap pertama. Sedangkan penggarap kedua yakni penggarap yang menyewa tanah dari penggarap pertama tidak dicantumkan di dalam daftar pos penjagaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri saya, apakah pihak pos penjagaan tidak mengetahui “transaksi” yang dilakukan oleh sesama petani tambak tersebut?

Pada kenyataannya pihak pos penjagaan mengetahui apa yang dilakukan oleh petani tambak yang menggarap lahan milik Mabes TNI AL. Pihak pos penjagaan tidak mau ambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh petani tambak. Hal terpenting bagi pihak pos penjagaan Lantamal III adalah petani tambak tersebut tidak menjual tanah milik Mabes TNI AL. Sebagai bentuk pengawasan atas hal ini, pihak pos penjagaan dalam hal ini sebagai pihak pertama tetap menagih uang sewa kepada pihak kedua yakni petani tambak yang terdaftar dalam data penggarap tanah milik Mabes TNI AL. Pihak ketiga (petani tambak yang menggarap lahan tambak milik penggarap pertama) membayar uang sewa kepada penggarap pertama. Setelah itu, penggarap pertama yang membayar uang sewa tanah garapannya kepada pihak pos penjagaan.

Pranata yang mengatur pembayaran uang sewa yang berlaku di lahan milik Mabes TNI AL menunjukkan adanya jenjang yang harus dilewati oleh setiap pihak yang terlibat dalam penguasaan tanah milik Mabes TNI AL. Ada semacam alur yang harus dilalui tahap demi tahap. Setiap orang tidak boleh menerobos untuk menuju ke jenjang berikutnya terutama hubungan antara petani tambak, perantara (warga), pos penjagaan, dan pihak Lantamal pusat. Keempat aktor ini menunjukkan hubungan struktural yang disebabkan kedudukan yang mereka miliki berbeda dan dapat dipastikan peran atau *role* yang mereka jalankan berbeda pula. Kedudukan manusia untuk melakukan tindakan interaksi itu biasanya menganggap dirinya berada dalam suatu kedudukan sosial tertentu yang juga dikonsepsikan untuknya oleh norma-norma yang menata seluruh tindakan tadi (Koentjaraningrat, 1990:168-9). Kedudukan ini menurut konsepsinya Koentjaraningrat menunjukkan

bahwa peran atau *role* seseorang ditentukan oleh kedudukannya. Dalam pranata pembayaran uang sewa ini kedudukan yang paling tinggi adalah Lantamal pusat, sedangkan petani tambak berada di kedudukan paling bawah. Pranata-pranata ini muncul dan menjadi baku di dalam kehidupan warga masyarakat tersebut karena diperlukan keberadaannya demi terwujudnya keteraturan-keteraturan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat (Suparlan, 2008:139)

Pranata yang mengatur sewa-menyewa tidak hanya berlangsung di tanah milik Mabes TNI AL, tetapi berlangsung juga di tanah milik swasta dan pribadi. Kedua tanah yang disebutkan terakhir ini menurut penuturan sejumlah informan lebih *njlimet* dan memberatkan bagi kalangan petani dalam hal pembayaran. Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa pranata di kedua tanah ini lebih *njlimet*. Pertama, pihak yang diberikan kuasa dari pemilik tanah memiliki kuasa penuh terhadap tanah. Pihak ini yang menentukan berapa jumlah uang sewa yang harus dibayar. Biasanya harga uang sewa yang harus dibayar lebih besar dibanding uang sewa di tanah milik Mabes TNI AL. Tidak ada kontrol penuh dari pihak pemilik menyebabkan orang yang diberi kuasa, bebas menentukan siapa yang dapat menggarap lahan. Pertimbangan siapa yang bisa membayar uang sewa yang lebih didahulukan oleh orang ini. Berbeda halnya dengan tanah garapan milik Mabes TNI AL. Tanah di Mabes TNI AL tidak ada batasan waktu. Masa sewa petani tambak di lahan milik Mabes TNI AL tidak terbatas selagi tanah tersebut belum digunakan. Orang yang pertamalah yang akan mewariskan lahan tersebut kepada orang yang akan diwariskan. Hal ini menyebabkan sejumlah petani tambak mulai mendekati ke petani tambak yang menggarap tanah milik Mabes TNI AL dan berharap tanahnya tersebut mau disewakan.

Perbedaan terkait pembayaran uang sewa memang nampak terlihat pada tanah milik Mabes TNI AL dan tanah milik swasta/perorangan. Namun, terdapat persamaan dalam hal memelihara akses terhadap tanah. Sejumlah petani tambak mengembangkan berbagai cara untuk dapat menjaga aksesnya tersebut. Salah satunya yakni menjaga hubungan yang baik dengan pemilik tanah atau orang yang diberi kuasa. Cara menjaga hubungan yang baik pun seringkali berbeda-beda tergantung pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani tambak.

Sejumlah petani tidak hanya memberikan uang sewa, tetapi juga memberikan hasil panen kepada orang yang diberi kuasa. Pemberian hasil panen ini ditujukan karena petani tambak beranggapan bahwa orang yang diberi kuasa tidak mendapat bagian dari hasil uang sewa tersebut. Walaupun mendapat bagian, belum tentu jumlahnya besar. Petani tambak sebenarnya tidak mengetahui berapa jumlah yang diterima orang yang diberi kuasa dan berapa jumlah yang diberikan kepada pemilik tanah. Ketidaktahuan ini tidak menjadi masalah bagi petani tambak. Yang ada dibenak mereka yakni bagaimana mereka mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang yang diberi kuasa.

#### **5.4.2 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tambak**

Sejumlah kelompok petani tambak yang ada di Marunda membentuk suatu kelompok untuk mengorganisir kebutuhan petani tambak. Pembentukan kelompok tambak ini didasari atas inisiatif salah satu petani tambak di RW 04 Kampung Sungai Tirem Kelurahan Marunda. Dia adalah Ahmad Taufik. Ahmad Taufik yang juga dikenal sebagai seorang Ustadz di lokasi ini mengajak rekan-rekannya yang berprofesi sebagai petani tambak untuk membentuk kelompok tambak yang diberi nama kelompok tambak Bina Marunda Windu.

Kelompok tambak ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 2010. Kelompok ini bukan yang pertama kalinya dibentuk di tempat. Sebelum kelompok ini dibentuk sudah ada beberapa kelompok yang sudah dibentuk di lokasi ini. Namun, kelompok yang sudah dibentuk lebih banyak berorientasi mencari keuntungan. Kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dibentuk karena ada iming-iming bantuan modal yang akan diberikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Jakarta Utara. Sejumlah warga disibukkan untuk membentuk kelompok. Tidak tanggung-tanggung pengurus RW dan RT ikut terlibat membentuk kelompok ini. Berdasarkan informasi dari sejumlah informan, yakni Pak Atilah. Kelompok-kelompok yang dibentuk tidak semuanya bekerja sebagai petani tambak. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang becak, pedagang warung, dan orang-orang yang memang tidak bekerja. Orang-orang ini dimintai data dirinya untuk dimasukkan ke dalam proposal pembentukan kelompok.

Pak Atilah merupakan salah satu warga yang merasa dimanfaatkan namanya untuk pengajuan proposal pembentukan kelompok tambak. Data diri beserta persyaratan lainnya yang sudah dia berikan ternyata tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Dari pengajuan dana yang diajukan, Pak Atilah hanya memperoleh dana sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kalo pertama sih saya dapet di RT Rohali. Bantuan pertama cuma 1 juta. Total dana bantuan yang masuk 12 juta. Cuma dibohongin sama ketuanya, Pak RW Rohali. RW 06. Nama aslinya Sutrisna. (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Dana yang tersalurkan kepada petani tambak tidak sesuai dengan dana yang diajukan dalam proposal pengajuan dana. Menurut Pak Atilah, dana yang telah tersalurkan untuk masing-masing anggota mencapai Rp. 12 juta. Namun, Pak Atilah hanya memperoleh satu juta. Pak Atilah tidak mau menuntut dana ini. Ada perasaan tidak enak dari Pak Atilah untuk menuntut haknya tersebut. Alasan sebagai pendatang yang melatarbelakangi rasa tidak enak Pak Atilah untuk menuntut haknya tersebut. Terlebih lagi jika dia mau menuntut, pihak yang akan dia tuntut adalah Ketua RW dan Ketua RT. *“Yah, mau gimana lagi. Kita mah di sini pendatang. Mau nuntut ga enak. Soalnya di sini kan kita mah numpang di tempat orang. Dari pada nyari ribut, kita mah ngalah aja.”* Tutur Pak Atilah. Dalam konsep *kebudayaan kemiskinan* Oscar Lewis (1993), cara yang dipilih Pak Atilah merupakan suatu bentuk adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus reaksi terhadap kedudukan marginal Pak Atilah.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Pak Sakri. Pak Sakri merasa namanya hanya sebagai pelengkap saja untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pembentukan kelompok. Pak Sakri dimintai Kartu Keluarga dan KTP untuk dimasukkan ke dalam proposal. Ditambah lagi, dia juga harus memberikan foto dirinya untuk dilampirkan di proposal. Namun, dana yang dijanjikan belum turun ke tangannya. Padahal dia tahu bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada kelompok petani tambak.

Kondisi seperti ini memang seringkali dialami oleh petani tambak yang mempunyai posisi lemah dibandingkan pengurus RT/RW. Mereka terkesan menuruti apa yang disarankan oleh pihak-pihak tersebut untuk memberikan data

dirinya dalam pengajuan proposal pengajuan dana. Setelah dana turun, mereka seringkali tidak menerima dana tersebut. Walaupun menerima, jumlahnya jauh berbeda dengan dana yang diajukan dan disalurkan oleh penyandang dana. Kondisi ini memperparah kehidupan petani tambak yang masih bergelut dengan kemiskinan yang mereka alami.

Pengalaman petani terhadap pembentukan kelompok yang dianggap tidak menguntungkan akhirnya memunculkan inisiatif petani tambak untuk membentuk atas inisiatif sendiri tanpa melibatkan pengurus RT/RW. Pembentukan kelompok ini bukan untuk diajukan dalam proposal pengajuan kelompok, melainkan atas kebutuhan petani untuk saling membantu karena perasaan senasib. Inisiatif dimulai dari dalam diri Pak Taufik. Pak Taufik sadar akan kondisi warga terutama petani tambak yang tergolong berpenghasilan pas-pasan dan miskin<sup>13</sup>. Kondisi ini dirasa perlu dibantu atas rasa saling membantu. Selain itu, inisiatif terhadap kesadaran beragama dinilai masih sangat rendah di kalangan petani tambak. Oleh karena itu, Pak Taufik berinisiatif untuk mengajak mereka membentuk kelompok tambak Bina Marunda Windu (BMW).

Pemilihan nama kelompok tambak atas usulan dari Pak Taufik. Kata “bina” dipilih agar kelompok ini dapat membina petani tambak dari segi ekonomi dan segi agama. Kata “Marunda” menandakan lokasi kelompok berada yakni di Kelurahan Marunda. Sedangkan kata “windu” lebih mengarah kepada salah satu jenis komoditas yang dibudidayakan oleh petani tambak yakni udang windu. Sebenarnya di lokasi ini tidak hanya udang windu yang dibudidayakan petani tambak, tetapi petani tambak juga membudidayakan ikan bandeng. Alasan Pak Taufik cukup sederhana ketika memilih nama “windu” dibandingkan “bandeng”. *“Nama windu dipake supaya kalo disingkat jadi bagus namanya. Jadinya BMW.”*

---

<sup>13</sup> Merujuk kepada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Suparlan (2008:138), kemiskinan adalah sebuah kondisi serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan orang-orang lain dalam yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kekurangan harta atau benda berharga (tanah atau alat-alat produksi lainnya) menyebabkan bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut kurang atau tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana layaknya dibandingkan dengan kehidupan warga masyarakat yang tidak tergolong miskin.



Gambar 8. Sekretariat kelompok tambak BMW (Fahrudin, 2011)

Kelompok Bina Marunda Windu (BMW) secara resmi didirikan pada tanggal 1 Maret 2010 yang diinisiasi oleh Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara. Namun di kalangan anggota kelompok BMW sendiri, kelompok ini sudah dibentuk sejak tahun 2006. Sejak saat itu kegiatan berkelompok sudah mulai berjalan. Saat ini jumlah anggota kelompok sebanyak 20 orang yang menggarap lahan seluas 14,6 hektar. Kegiatan kelompok berjalan cukup efektif mulai dari kegiatan pertemuan rutin sampai dengan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Ditambah lagi peran pendampingan dan advokasi dari petugas penyuluh cukup efektif. Dalam menghadapi permasalahan kelompok, menurut Ustad Taufik kelompoknya rutin melakukan pembinaan melalui pendekatan moral dan keagamaan. *“Kegiatan arisan dan pengajian, bagi kami sebagai senjata ampuh dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab moral antar anggota”*, tambahnya. Melalui kerja keras dan peran aktif dari anggota kelompok, bahkan kelompok BMW mampu menjadi salah satu kandidat juara kelembagaan kelompok yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta. Harapannya keberhasilan kelompok BMW akan menjadi embrio bagi munculnya pokdakan-pokdakan sejenis.

Kegiatan pengajian dilakukan secara rutin oleh kelompok BMW setiap seminggu sekali. Kegiatan pengajian ini dilakukan secara bergilir di rumah anggota kelompok. Semua anggota mendapatkan giliran tempat tinggal dijadikan

tempat pengajian kelompok. Bentuk pengajian yang dilaksanakan yakni pengajian Surat Yasin dan ceramah. Menurut penuturan Pak Taufik, kegiatan ini dilakukan selain untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab moral antar anggota, juga untuk membina anggota kelompok yang menurutnya masih kurang dalam urusan agama dan ibadah. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak Sakri yang juga salah satu pemuka agama di tempat ini. Ketika saya tanya bagaimana kebiasaan warga di tempat ini. “... Yaaa, kerja. Paling ngobrol gak karu-karuan gitu malem nanti paling. Maklumlah pengetahuan agama disini mah masih cetek. Orangnya sih ramah tapi yaa gitu, sholatnya cuma pas jumat'an lainnya jarang.” (Wawancara 2 Maret 2011).

Kegiatan pengajian tidak hanya dilihat sebagai suatu cara untuk mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai suatu wadah untuk membangun hubungan yang baik di antara petani tambak. Hubungan baik ini menjadi penting untuk dikembangkan terkait kondisi mereka yang memiliki kondisi marjinal di bandingkan lapisan lainnya dalam mekanisme berjenjang penguasaan tanah.

Kelompok Bina Marunda Windu melakukan kegiatan budidaya yang dilakukan secara polikultur yaitu antara udang windu dengan bandeng dengan menerapkan teknologi tradisional. Namun komoditas bandeng masih mendominasi dibudidayakan pada tambak yang dikelola kelompok seluas 14,6 ha. Menurut Pak Taufik (ketua kelompok), masing-masing anggota saat ini mengelola lahan seluas 0,5-1 ha. Kesadaran petani tambak akan pentingnya berkelompok menjadikan usaha budidaya bisa bertahan sampai saat ini. Keberadaan kelompok ini mampu memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses modal produksi, akses pasar dan permodalan. Kelompok memfasilitasi anggotanya untuk mendapat akses modal produksi tambak berupa penyediaan benih yang dikelola kelompok. Kelompok membudidayakan benih secara mandiri di sebuah empang yang khusus untuk pembenihan. Anggota diberikan kemudahan dalam mengakses benih melalui pembayaran yang relatif ringan bahkan pembayarannya pun dapat dilakukan ketika budidaya tambak anggota panen. Di mata anggota, hal ini sangat membantu petani dalam membudidayakan tambaknya.

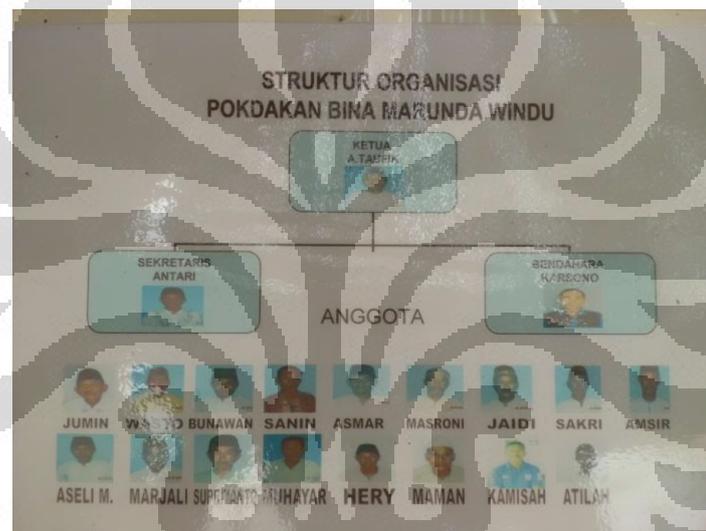
Keberadaan kelompok tambak BMW mulai mendapat perhatian dari Dinas Peternakan, Perikanan (P2) dan Kelautan Jakarta Utara ketika disurvei oleh salah satu penyuluh yang ditugaskan mensurvei lokasi tambak di Marunda. Menurut penuturan Pak Antari (salah satu anggota kelompok BMW), pihak dinas tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya bahwa sedang melakukan survey di lokasi tersebut. Pak Antari masih ingat betul ketika kelompok tambak BMW mulai dikenal oleh pihak Dinas. Berikut ulasan dari Pak Antari terkait dengan awal mula perkenalan pihak Dinas dengan kelompok tambak BMW.

Saat itu ada seorang perempuan yang berpakaian rapi seperti layaknya seorang mahasiswa. Perempuan tersebut mendatangi kami yang sedang bekerja di tambak. Dia mengamati setiap gerak-gerik kami. Sesekali dia meminta izin kepada kami untuk diambil gambar menggunakan kameranya. Saat itu kami tidak ada pikiran sama sekali bahwa orang tersebut utusan dari Dinas. Kami baru tahu orang tersebut dari Dinas ketika beberapa minggu kemudian orang Dinas datang ke tempat kami. Orang-orang Dinas menawarkan bantuan modal produksi kepada kami karena kami dinilai benar-benar petani tambak dan sudah ada kelompok yang dibentuk. Orang-orang Dinas memperlihatkan kepada kami foto-foto kami ketika kami berada di tambak. Di foto tersebut terlihat ada kegiatan yang kami lakukan. Ada foto ketika kami mengambil ikan, menebar benih, dan foto-foto kegiatan kami lainnya. Sejak saat itu, kami mulai kenal dengan orang Dinas. (wawancara tanggal 17 Maret 2011)

Sejak kedatangan Dinas Peternakan, Perikanan (P2) dan Kelautan Jakarta Utara, kelompok BMW diminta untuk menyusun struktur organisasi agar pengelolaannya lebih terorganisir oleh kelompok dan memudahkan dalam pengawasan dan pembinaan oleh dinas tersebut.

Sebagai wujud dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2011 telah dialokasikan dana penguatan modal melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan budidaya. Melalui Program ini diharapkan akan dikelola secara efektif dan mampu menopang peningkatan produksi bandeng. Tahun ini Kota Jakarta Utara mendapat alokasi PUMP sebanyak 3 (tiga) paket atau senilai Rp.300 juta seluruhnya untuk mendukung kegiatan budidaya baik payau maupun budidaya air tawar. Menurut Pak Taufik, dana PUMP akan

digunakan untuk membeli sarana dan prasarana pendukung khusus untuk budidaya bandeng. Melalui PUMP ke depan aktivitas budidaya secara total akan didominasi oleh budidaya bandeng. Pilihan tersebut menurutnya karena budidaya bandeng sangat minim resiko dibanding udang windu yaitu tingkat kelulushidupan mampu mencapai lebih dari 95 persen. Keberadaan PUMP tentunya diharapkan akan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan anggota kelompok. Mendorong diversifikasi produk budidaya Jakarta sebagai basis orientasi pasar bagi komoditas di semua sektor merupakan peluang tersendiri bagi pasar produk hasil perikanan.



Gambar 9. Struktur organisasi kelompok tambak Bina Marunda Windu  
(Fahrudin, 2011)

Keberadaan kelompok tambak ternyata mampu menjadi tempat untuk membangun hubungan baik dengan pihak pos penjagaan. Hubungan vertikal seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjadi cair ketika petani tambak berbagi pengetahuan tentang tambak. Orang yang dijadikan “perpanjangan-tangan” dari pihak Lantamal pusat termasuk warga Koarmabar yang tinggal di rumah Flat Marunda di tanah milik TNI AL ternyata ada yang membudidayakan budidaya tambak. Mereka melihat potensi tambak cukup menjanjikan, terlebih lagi waktu kosong mereka relatif banyak dan lahan kosong di dekat tempat tinggal mereka (rumah flat) masih ada yang kosong. Keterbatasan pengetahuan pihak pos

penjagaan mengenai tambak menuntut mereka untuk mencari tahu bagaimana cara budidaya tambak. Salah satu cara yang mereka lakukan yakni belajar tambak kepada petani tambak. Namun tidak semua petani tambak dijadikan tempat belajar mereka. Mereka memilih untuk belajar kepada kelompok tambak BMW untuk mendapatkan pengetahuan tentang tambak. Simak penuturan Pak Antari terkait dengan orang-orang pos yang belajar tambak kepada petani tambak.

“... biasanya orang-orang pos datang kemari buat belajar tambak. Ga cuma nanya-nanya tentang tambak. Mereka juga beli benur dan nener ke kami. Karena kami di sini juga membudidaya benur dan nener untuk keperluan kami dan juga untuk dijual.” Ujar Pak Antari.

Proses belajar yang dilakukan pihak pos penjagaan menyebabkan interaksi mereka dengan petani tambak cukup intensif dan cair. Proses interaksi ini dimanfaatkan kedua belah pihak untuk kepentingan mereka masing-masing. Bagi pihak pos, interaksi ini dijadikan tempat belajar tambak mereka sehingga mereka mampu menggarap lahan kosong di dekat rumah flat mereka untuk budidaya tambak. Jika hasil panen bagus, maka mereka mendapat penghasilan tambahan dari usaha budidaya tambak tersebut. Sedangkan bagi petani tambak, interaksi ini digunakan untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Hubungan yang baik ini diharapkan mampu menjalankan usaha-usaha tambak mereka terutama yang terkait dengan penguasaan tanah. Interaksi yang terus-menerus berlangsung ini menjadikan hubungan mereka relatif cair. Keberadaan kelompok tambak BMW memberikan manfaat dalam hal membangun hubungan yang baik dengan pihak pos penjagaan Lantamal III dan warga Koarmabar.

Dari satu segi adanya patron-klien atau sistem berjenjang dalam penguasaan tanah di Marunda sebenarnya menunjukkan corak kehidupan yang individualistik menjadi tidak berlaku karena digantikan oleh pola kehidupan yang tunduk kepada patron atau pelindung klien. Patron-klien terbentuk karena kesamaan dalam mata pencaharian yang tergolong berpenghasilan rendah dan kesamaan dalam hal asal mereka, maka terwujud semacam solidaritas sosial atau komunitas etnik di antara mereka yang tergolong sebagai klien-klien dari patron yang sama (Suparlan, 2004:80).

**BAB 6**  
**PRANATA PENGUASAAN TANAH DI KOTA**  
**BEBERAPA KESIMPULAN**

Penjabaran dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah yang dilakukan oleh petani tambak diatur dalam sebuah pranata penguasaan tanah yang melibatkan berbagai aktor. Masing-masing aktor ini turut mempengaruhi pembentukan pranata penguasaan tanah yang mengatur pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Pemilikan dan penguasaan tanah di tanah milik TNI AL di Marunda menunjukkan rangkaian proses yang membentuk suatu mekanisme berjenjang mulai dari pemilik tanah (Mabes TNI AL) kemudian perantara (pos penjagaan Lantamal III dan salah seorang warga Marunda) barulah ke petani tambak. Begitu juga sebaliknya dari petani tambak lalu ke perantara kemudian ke pemilik tanah. Setiap lapis dalam mekanisme berjenjang ini menunjukkan kedudukan dan peran yang dimiliki oleh setiap aktor dan setiap lapis merupakan patron bagi kliennya dalam hal ini aktor yang berada di bawahnya.

Mekanisme berjenjang ini dibentuk untuk mempermudah kontrol dan pemeliharaan akses terhadap tanah. Pemilik tanah melalui perpanjangan tangannya mengatur mekanisme pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh petani tambak. Pihak yang dijadikan perpanjangan tangan ini menerapkan aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur dan mengarahkan petani tambak dalam memanfaatkan tanah untuk dijadikan usaha budidaya tambak. Sementara itu, petani tambak yang berada pada lapisan atau kedudukan paling rendah mau tidak mau menuruti mekanisme berjenjang ini.

Sebagai bentuk kontrol dan pemeliharaan akses terhadap tanah, pihak pemilik tanah (Lantamal Pusat) dan perpanjangan tangan (pihak pos penjagaan Lantamal III) menerapkan biaya administrasi pertanahan kepada petani tambak. Bagi pihak pemilik tanah, penerapan biaya administrasi pertanahan ini merupakan suatu cara untuk mengawasi pemanfaatan tanah oleh petani tambak. Pengawasan melalui sistem pembayaran ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya setiap bulan

keempat. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, pihak yang dijadikan perpanjangan tangan menunjuk salah seorang warga dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Keberadaan warga ini mampu menjembatani pihak TNI AL dan petani tambak di Marunda.

Warga yang dijadikan perpanjangan tangan dari pos penjagaan Lantamal III yang merupakan perpanjangan tangan dari Lantamal Pusat menjadi *patron* dari petani tambak. Segala bentuk informasi yang terkait dengan pemanfaatan tanah, biaya administrasi, dan penarikan uang administrasi pertanahan dibantu oleh perantara ini. Sementara itu, petani tambak yang merupakan pihak yang berada pada kedudukan paling rendah dalam mekanisme berjenjang ini mau tidak mau menyepakati cara kerja berjenjang seperti ini.

Masyarakat menanggapi mekanisme berjenjang dalam pemanfaatan tanah dengan berbagai macam cara. Mereka mengaktifkan pranata-pranata dan membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang menjadi *patron*-nya. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan patron yakni memberikan sejumlah hasil panen tambak kepada patron terutama kepada pihak pos penjagaan Lantamal III. Pemberian ini sebagai bentuk “terima kasih” petani tambak kepada pihak yang memberikan izin kepada petani tambak untuk memanfaatkan tanah milik Mabes TNI AL. Cara ini dianggap efektif mencairkan mekanisme berjenjang dalam urusan pemanfaatan tanah.

Hubungan petani tambak dengan pihak pos penjagaan Lantamal III yang merupakan perpanjangan tangan Lantamal Pusat menjadi lebih cair ketika munculnya kelompok tambak. Keberadaan kelompok tambak mampu memberikan keuntungan ketika pihak pos penjagaan Lantamal III yang ditugaskan menjaga tanah milik Mabes TNI AL ikut membuka usaha budidaya tambak di dekat tempat tinggalnya. Hubungan timbal balik pun muncul ketika pihak pos belajar tambak kepada kelompok tambak. Bagi kelompok tambak, hal ini dijadikan sebagai cara untuk membangun hubungan yang lebih intensif dengan pihak pos penjagaan. Mekanisme berjenjang pun terlihat lebih dinamis dan cair.

Pranata penguasaan tanah yang dikembangkan oleh aktor-aktor yang terlibat ternyata tidak berakhir sampai petani tambak yang berada pada kedudukan paling rendah dalam mekanisme berjenjang. Petani tambak juga mengembangkan

pranata ketika berhadapan dengan sesama petani tambak. Pranata ini terbentuk untuk mengatur bagaimana suatu lahan tambak dikelola. Penggarap pemilik memiliki hak untuk mengelola tambaknya sendiri, dengan bantuan buruh tambak atau mengalihkan kepada orang lain. Pengalihan tambak kepada pihak lain dapat melalui sistem sewa, sistem kontrak, sistem gadai, atau sistem bagi hasil. Pranata yang berkembang ini menunjukkan bahwa seorang petani tambak yang memiliki lahan sendiri (penggarap pemilik) dapat menjadi *patron* bagi penyewa atau buruh tambak lainnya yang tidak memiliki lahan tambak.

Hubungan yang terjadi antar aktor ini menunjukkan hubungan vertikal dan horisontal. Hubungan vertikal terjadi ketika mekanisme berjenjang diaktifkan yang melibatkan pemilik tanah, perantara, dan petani tambak. Sedangkan hubungan horisontal berkembang ketika petani tambak berhadapan dengan sesama petani tambak dan warga setempat.

Penguasaan tanah yang dikuasai dan dimiliki petani tambak ternyata menunjukkan simbiosis mutualisme bagi pemilik tanah dan bagi penggarap tanah. Bagi pemilik tanah, penguasaan tanah oleh petani tambak mampu mengurangi resiko terjadinya sengketa dan konflik tanah di saat tekanan tanah atas tanah di kota semakin meningkat. Kontrol dan pemeliharaan akses melalui perpanjangan tangan dari pemilik tanah dianggap mampu menghindari terjadinya sengketa dan konflik tanah karena dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Sementara itu, bagi petani tambak, penguasaan tanah di Marunda untuk dijadikan lahan tambak mampu memberikan alternatif pemasukan di saat kesempatan kerja di kota mulai terbatas mengingat terbatasnya keterampilan dan pengetahuan formal petani tambak. Manfaat ini juga tidak hanya dirasakan oleh penduduk Marunda yang bekerja sebagai petani tambak, tetapi juga bagi warga sekitar. Keuntungan ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti mencari sisa ikan hasil panen, tempat rekreasi pemancingan, serta sumber ikan dan udang segar.

Bagi tingkat yang lebih luas lagi, Kelurahan Marunda memiliki potensi pengembangan budidaya tambak. Potensi pengembangan budidaya tambak ini didukung dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah kelurahan Kalibaru dan Cilincing yang lokasinya dekat dengan Kelurahan Marunda. Keberadaan TPI ini diharapkan mampu menjadi sarana pemasaran hasil budidaya

tambak sehingga dapat mensuplai hasil budidaya tambak terutama udang dan bandeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, budidaya tambak perlu mendapat perhatian terutama dalam peningkatan produktivitas hasil budidaya tambak.

Saran yang saya tawarkan dari hasil penelitian skripsi ini yakni dilakukannya intensifikasi tambak di mana petani tambak didorong untuk mau meningkatkan produksi udang dan bandeng supaya pendapatannya meningkat, sehingga meningkat pula kesejahteraan dan taraf hidupnya yang tergolong dalam golongan bawah. Usaha ini dapat ditempuh melalui: penyediaan sarana produksi perikanan, pemberian kredit dan bimbingan penyuluhan tentang teknologi pertambakan yang mencakup: perbaikan konstruksi tambak; penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan; pengolahan tanah, pemupukan dan pemberian pakan; penebaran benih unggul; pengendalian hama/penyakit yang merugikan bagi udang dan bandeng; pengolahan dan pemasaran hasil budidaya tambak; dan manajemen usaha budidaya tambak. Jika dilakukan secara intensif, budidaya tambak mampu memberikan nilai ekonomis tinggi. Dari aspek ekonomi akan memungkinkan adanya peningkatan nilai tambah produksi budidaya tambak. Sementara itu, dari aspek sosial akan mampu memberikan peluang tenaga kerja lebih banyak di sekitar kawasan budidaya. Di tengah kesenjangan sosial dan ekonomi di pinggiran Jakarta ini, sub sektor budidaya diharapkan menjadi alternatif utama dalam merubah nasib masyarakat pinggiran menjadi lebih baik. Sesuatu yang tidak mustahil untuk dicapai, jika ada kemauan, komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak.

## DAFTAR REFERENSI

Adrian

- 1998 *Perubahan Lingkungan Sumberdaya Ekonomi dan Upaya Adaptasi Sosial Penduduk: Studi Kasus Dampak Pembangunan Kawasan Industri Perkayuan Marunda terhadap Sistem Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara*". Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Departemen Antropologi UI.

Agar, Michael H.,

- 1980 *The Professional Stranger. An Informal Introduction to Ethnography*. Orlando, San Diego, New York: Academic Press, Inc.

Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara

- 2010 *Hasil Sensus Penduduk 2010: Kota Administrasi Jakarta Utara (Data Agregat per Kecamatan)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara.

Badan Pusat Statistik

- 2011 "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010". ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas

- 2001b *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Borofsky, R.

- 1994 "Introduction," dalam R. Borofsky, (peny.) *Assessing Cultural Anthropology*. New York: McGraw-Hill. Hlm. 1-28.

Brewer, John D.,

- 2000 *Ethnography*. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Creswell, John W.

- 2010 *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daldjoeni,

- 1979 *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: Alumni, 1979

Dorleans, Bernard R. G.

- 2000 "Dari kampung ke pengembangan pemukiman: Beberapa Kecenderungan dalam Pembangunan Jakarta Raya" dalam buku *Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural*. Jakarta: KITLV-Banana

- Eddy, Afrianto., Evi Liviaty  
1991 *Teknik Pembuatan Tambak Udang*. Yogyakarta: Kanisius
- Emmerson, R.M. dkk.,  
1995 *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ery Damayanti  
2004 “Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil: Kebingungan Tenurial”. Makalah untuk dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.
- Evers, Hans-Dieter  
1995 *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Evers, Hans-Dieter dan Rudiger Korff  
2002 *Urbanisme di Asia Tenggara, Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fauzi, Noer.  
1998 "Dari Aksi-aksi Protes Petani Menuju Embrio Organisasi Massa Petani." Pp. 85-97 in *Perlawanan Kaum Tani: Analisis terhadap Gerakan Petani Indonesia Sepanjang Orde Baru*. Medan: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera
- Flick, Uwe  
2005 *An Introduction to Qualitative Research*. London, California, New Delhi: Sage Publications.
- Gilbert, Alan & Josef Gugler  
1996 *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Harian Umum Pelita  
2008 “Air Laut Pasang Disertai Angin Kencang Puluhan Rumah dan Tambak Ikan di Marunda Kebanjiran.” 31 Maret 2008.
- Hardjono.  
1990 *Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Yogyakarta: Gama Press
- Have, Paul ten,  
2004 *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.

- Inoguchi, Takashi, Edward Newman dan Glen Paoletto (peny.)  
2003 *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Jakarta: LP3ES
- Kitagawa, Takayoshi  
1996 “Keistimewaan Urbanisasi dan Industrialisasi di Indonesia” dalam buku *Pengkajian Urbanisasi di Asia Tenggara*. Hardjowijono (peny.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Koentjaraningrat  
1990 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Layn, Safrudin Bustam  
2008 “Dinamika Ikatan Patron-Klien: Suatu Tinjauan Sosiologi”. *Jurnal Populis*. Volume 3 No. 1 September.
- Lewis, Oscar  
1993 “Kebudayaan Kemiskinan” dalam buku *Kemiskinan di Perkotaan* (peny. Suparlan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Liebow, Elliot  
1993 “Manusia dan Pekerjaan” dalam buku *Kemiskinan di Perkotaan* (peny. Suparlan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, L. J.  
2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Puspita, L., E. Ratnawati, I N. N. Suryadiputra, A. A. Meutia.  
2005 *Lahan Basah Buatan di Indonesia*. Bogor: Wetlands International – IP
- Rajagukguk, Erman  
1995 *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah, dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Chandra Pratama
- Redfield, Robert  
1985 *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali
- Ribot, Jesse C., dan Nancy Lee Peluso  
2003 “A Theory of Access”. Dalam *Rural Sociology*. Academic Research Library. Hlm. 153
- Schleger, Edella dan Elinor Ostrom  
1992 “Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis”. Dalam *Land Economics*. University of Wisconsin Press.

Scott, James C.

- 1972 *Patron Client Politics and Change in South East Asia*. London: University of California Press.  
 1989 *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Cetakan ketiga. Jakarta: LP3ES

Soehendera, Djaka

- 2010 *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta*. Jakarta: HuMa

Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni

- 1997 *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga

Suparlan, Parsudi

- 1995 *Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
 2004 *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.  
 2008 “Pengentasan Kemiskinan dan Mobilitas Sosial: Perspektif Lintas Budaya” dalam buku *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural* (peny. Chryshanda DL dan Yulizar Syafri). Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Spradley, James P.

- 2007 *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Kencana

Swasono, Meutia Hatta

- 1991 *Proyek Pembangunan, Pemandangan Kampung dan Stres Pada Masyarakat Marunda Besar Jakarta Utara*. Disertasi S3 tidak diterbitkan. Jakarta: Departemen Antropologi UI.

Wiradi, Gunawan

- 2008 “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria” dalam buku *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

### **Dokumen dan Laporan**

Anonim

- 2009 *Profil Kelurahan Marunda*  
 2009 *Profil Kota Administrasi Jakarta Utara*  
 2010 *Indikator Keberhasilan Pembangunan Jakarta Utara*. Jakarta: Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara  
 2011 *Laporan Bulanan Kelurahan Marunda: Bulan September*.

## LAMPIRAN

### Kuesioner Untuk Pemetaan Awal

#### A. Profile Petani Tambak

1. Nama : .....
2. Usia : .....
3. Agama : .....
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Asal Daerah : .....
6. Suku : .....
7. Status Perkawinan : .....
- Jika sudah berkeluarga, jumlah anaknya berapa:  
.....
- Pengeluaran rata-rata perbulan:  
.....
8. Awal mula menjadi petani tambak (Usia berapa) : .....
9. Sudah berapa tahun menjadi petani tambak : .....
10. Alasan menjadi petani tambak :  
.....  
.....  
.....  
.....
11. Peralatan yang digunakan : .....
12. Waktu kerja : .....
13. Materi pekerjaan:  
.....  
.....  
.....  
.....

14. Fasilitas kerja:

.....  
 .....  
 .....

### B. Lahan Tambak

1. Jumlah petak yang digarap : .....
2. Luas lahan tambak : .....
3. Kedalaman tambak : .....
4. Kepemilikan tambak :
  - a. Milik sendiri
  - b. Milik orang lain (sebutkan) :  
 .....
5. Bagaimana cara mendapatkan lahan (Beli, buka sendiri, sewa, pemberian, dll):

.....  
 .....  
 .....

### C. Produksi hasil tambak

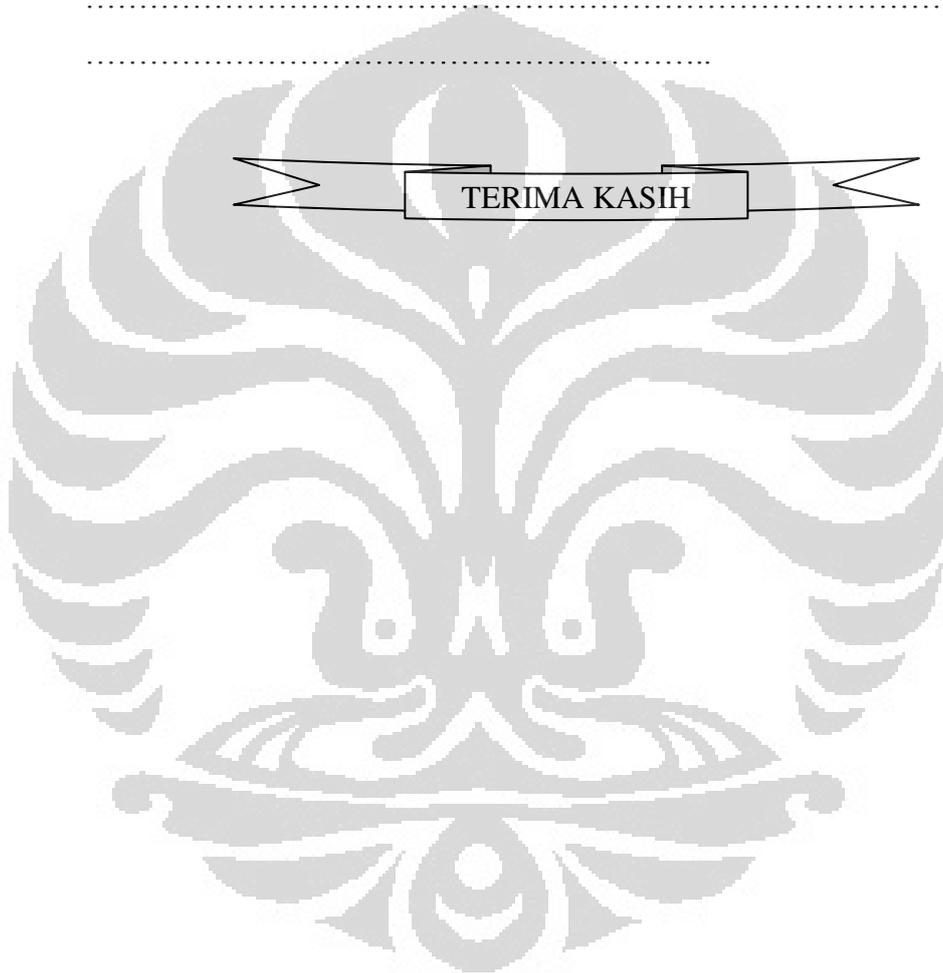
1. Jenis komoditas : .....
2. Alasan memilih komoditas tersebut :  
 .....  
 .....  
 .....
3. Jumlah komoditas yang dipanen :

.....  
 .....

.....  
.....

4. Sistem pengelolaan tambak (mempekerjakan orang, pengupahan, pembagian hasil tambak, dll):

.....  
.....  
.....  
.....



## **Pedoman Pengumpulan Data Petani Tambak Marunda**

### **I. Karakteristik lingkungan dan Penduduk Sekitar Kawasan**

1. Kondisi umum lingkungan di lokasi penelitian
  - a. Profil Kelurahan
    - Letak Administrasi
    - Letak Geografis
    - Topografis
    - Batas wilayah
  - b. Kondisi Kependudukan
    - Jumlah Penduduk (Kelurahan Marunda dan RT03/RW04)
    - Pendidikan
    - Agama
    - Mata pencarian
2. Pola Pemukiman penduduk
3. Sejarah persebaran penduduk
4. Komposisi penduduk berdasarkan etnis, agama, pendidikan dan pekerjaan
5. Fasilitas umum

### **II. Profil Tambak di Marunda**

1. Sejarah tambak di Marunda
2. Kepemilikan lahan
3. Musim tambak

### **III. Profil Petani Tambak**

1. Daerah asal petani tambak
2. Ceritakan alasan memilih menjadi petani tambak
3. Komoditas yang dibudidayakan
  - a. Jenis komoditas
  - b. Alasan pemilihan komoditas
  - c. Siapa yang menentukan pemilihan komoditas
  - d. Proses pemilihan komoditas
4. Jenis tambak
5. Akses petani tambak ke lahan tambak
  - a. Bagaimana memperoleh akses menggarap lahan.
  - b. Proses untuk memperoleh akses.
  - c. Apakah ada kesepakatan yang dibuat
6. Praktik budidaya tambak
  - a. Kegiatan tambak
  - b. Waktu bekerja
  - c. Kegiatan yang dilakukan petani tambak ketika di lahan tambak
  - d. Kegiatan yang dilakukan petani tambak ketika berada di luar empang
  - e. Peralatan yang digunakan petani tambak dan bagaimana memperolehnya.
  - f. Kendala yang dihadapi petani tambak

- g. Aktor-aktor yang terlibat dalam budidaya tambak
- h. Relasi antar aktor
- i. Kebutuhan rumah tangga petani tambak
  - a. Apa saja kebutuhan petani tambak dan bagaimana mereka mencukupinya

#### **IV. Sistem sosial Penduduk sekitar kawasan**

1. Sistem kepemimpinan
2. Kelompok Sosial
  - a. Identifikasi Kelompok sosial dalam masyarakat
  - b. Peranan kelompok sosial dalam masyarakat
  - c. Hubungan antar kelompok sosial
  - d. Kelompok sosial yang sering mengakses lahan tambak
3. Struktur sosial masyarakat (pelapisan masyarakat)

#### **V. Pola penguasaan Lahan**

1. Sistem pemilikan dan penguasaan lahan
2. Perolehan Lahan
3. Katagorisasi lahan
4. Pengelolaan lingkungan

#### **VI. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan**

1. Ragam mata pencaharian penduduk dan kontribusinya terhadap ekonomi rumah tangga
2. Pola konsumsi penduduk
3. Pola distribusi
4. Kondisi ekonomi rumah tangga penduduk sekitar kawasan
  - Tingkat kesejahteraan
  - Kemiskinan
  - Penyebab kemiskinan.

#### **VII. Penduduk dan Tambak**

1. Katagorisasi tambak menurut penduduk
2. Akses penduduk ke dalam lahan tambak
3. Pola pemanfaatan dan pengelolaan lahan tambak oleh penduduk
  - Aturan
  - Sangsi
  - Denda
4. Pandangan penduduk terhadap lahan dan manfaat lahan bagi penduduk
5. Pandangan penduduk terhadap para pihak yang bekerja
6. Peranan pemerintah dalam penanganan lahan dan tambak
7. Potensi konflik dalam penanganan masalah lahan tambak
8. Pengetahuan masyarakat tentang tambak

#### **VIII. Program yang berjalan di masyarakat**

1. Program terkait budidaya tambak
2. Tanggapan petani terhadap program